EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Iskandar, M.Si

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga
2023

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Penulis:
Iskandar, M.Si

Editor:
Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.SI.

Cetakan: 2023
15,5 x 23 cm; x + 386 hlm.

ISBN: 978-623-6862-xx-x

Penerbit:
LP2M UIN Salatiga
Jalan Lingkar Salatiga Km. 02 Sidorejo Salatiga 50716, (0298) 323706
lp2m@uinsalatiga.ac.id

Anggota IKAPI & APPTI

All Right reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi, buku yang merupakan proses diskusi dan pembelajaran dengan para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga akhirnya bisa selesai juga. Proses diskusi dengan pembelajaran bersama ini berlangsung selama 14 kali pertemuan, data dan sumber acuan buku tentunya diambil dari para senior-senior ahli Ekonomi Syariah yang sudah ternama. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini sebagai bagian dari setetes ilmu Ekonomi Syariah dalam Kajian Ekonomi Pembangunan Islam. Semoga buku ini lebih mempermudah para mahasiswa Ekonomi Syariah untuk memahami Ekonomi Pembangunan Islam secara lebih Komprehensif. Kelebihan dari buku ini adalah mencoba untuk menambahkan sektor-sektor publik dan struktur ekonomi yang lebih banyak sehingga Ekonomi Pembangunan Syariah benar-benar dapat berfungsi sebagai bagian dari ilmu Ekonomi yang Lengkap.

Semoga Allah membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu penerbitan buku ini dan kepada para Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga semakin semangat dalam belajar, berkarya, dan mengembangkan serta menjadi bagian dari Ekosistem Ekonomi Syariah. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I PROBLEMATIKA EKONOMI IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 1

PENDAHULUAN 3
A. Permasalahan yang Dihadapi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara 5
B. Problematik Ekonomi dalam Konsep Islam 16
C. Rencana Pembangunan IKN 18
D. Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara 23

BAB II PEMANFAATAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PRESPEKTIF SYARIAH 29

PENDAHULUAN 31
A. Pandangan Islam dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 32
B. Potensi Kelautan di Indonesia 42
C. Potensi kelautan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kategori, yakni: 44
D. Kelompok Sumber Daya Perikanan di Indonesia ..45
E. Upaya Pemerintah Mengembangkan Keunggulan Ekonomi Maritim dan Kelautan 46
F. Upaya Pemanfaatan Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia 46
G. Faktor Penyebab Potensi Kelautan Belum Maksimal 46
H. Langkah-langkah Strategis Untuk Memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan 47

I. Daerah Produksi Ikan Tangkap Terbesar di Indonesia 47

BAB III SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI 49

PENDAHULUAN 51
A. Sektor Pemerintah 52
B. Intervensi Pemerintah Terhadap Pasar 53
C. Sektor Swasta 56
D. Intervensi Pemerintah dalam perspektif Islam 56
E. Peran Pemerintah dan Swasta dalam Perekonomian 58
J. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah atau Daerah 62
K. Peran Swasta dalam pembangunan 63
L. Kerja sama Pemerintah dan Swasta 63
M. Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian 65

BAB IV INSTRUMEN DANA PEMBANGUNAN ISLAM 81

PENDAHULUAN 83
A. Dasar Hukum Instrumen Dana Pembangunan I slam 85
B. Zakat 87
C. Wakaf 95
D. Ghanimah 103
E. Jizyah 104

BAB V SUMBER DAYA PEMBANGUNAN ISLAM 107

PENDAHULUAN 109
A. SUMBER DAYA MANUSIA 111
B. SUMBER DAYA ALAM 127
C. SUMBER DAYA TEKNOLOGI 145
D. SUMBER DAYA MANAJEMEN 148

BAB VI INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI NEGARA ASEAN 159

PENDAHULUAN 161
A. Sistem Pemerintahan 164
B. Jumlah Penduduk, Mayoritas Agama dan Mata Uang 165
C. Luas Wilayah dan Hasil Utama 166
D. Laju Inflasi (%) 167
E. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) % 168
F. Penanaman Modal Asing Langsung (%) dari PDB 168
G. Indeks Modal Manusia *(Human Capital Index – HCI)* Skala 0-1 169
H. Indeks Harga Konsumen (IHK) % *(Consumer Price Index – CPI)* 170
I. Jumlah Pengangguran (% dari total angkatan kerja) 171
J. Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa) 171

BAB VII MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI 173

PENDAHULUAN 175
A. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 177
B. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 180
C. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi 183
D. Faktor Pertumbuhan Ekonomi 186
E. Faktor-faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi 188
F. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 189
G. Produk Domestik Bruto 189
H. Teori Pertumbuhan Ekonomi oleh Harrord-Dommar 190
I. Strategi Pertumbuhan Ekonomi 191

J. Aspek Hubungan Ekonomi Internasional dalam Pertumbuhan Ekonomi 192
K. Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 193
L. Pendekatan Aksiologis Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi 195
M. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam 195

BAB VIII HISTORITAS EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM 199

PENDAHULUAN 201
A. Masa Rasulullah (571-632 M) 203
B. Masa Khulafaur Rasyidin 207
C. Masa Dinasti 213
E. Masa Ekonomi Modern 224
F. Paradigma Ekonomi di Negara Mayoritas Muslim 227

BAB IX EKONOMI POLITIK ISLAM 229

PENDAHULUAN 231
A. Definisi Ekonomi Politik Islam 233
B. Konsep Dasar Ekonomi Politik Islam 235
C. Peran Ekonomi Politik Islam 236
D. Pergerakan dan Perkembangan Ekonomi Politik Islam di Indonesia 237
E. Ekonomi Politik dalam Lintasan Sejarah 241
F. Ekonomi Politik Islam Zaman Rasulullah 244
G. Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin 246
H. Peranan Partai Politik Islam di Indonesia 251

BAB X KEMISKINAN 255

PENDAHULUAN 257
A. Pengertian Kemiskinan 259
B. Kemiskinan dalam Prespektif Islam 260

C. Konsep Kemiskinan 261
D. Sebab – Sebab Kemiskinan 263
E. Jenis dan Bentuk Kemiskinan 266
F. Indikator Kemiskinan 268
F. Kriteria Kemiskinan 270
G. Cara Menghitung Kemiskinan 271
H. Model CIBEST) Dalam Mengukur Kemiskinan ... 276
I. Studi Kasus Kemiskinan di Negara Muslim 278
J. Penanggulangan Kemiskinan 280

BAB XI KESENJANGAN DAN DISTRIBUSI EKONOMI 285

PENDAHULUAN 287
A. Tujuan Distribusi dalam Islam 288
B. Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi 292
C. Faktor Penyebab Distribusi Pendapatan Tak Merata 293
D. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga 293
E. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Negara 296
F. Kebijakan-kebijakan Islam dalam Mendukung Pemerataan Distribusi Kekayaan 297
G. Menuju Kondisi Distribusi yang Adil 300
H. Kesenjangan Ekonomi 302
I. Distribusi dalam Islam Sebagai Solusi Menanggulagi Kesenjangan Ekonomi 302
J. Kesenjangan Bidang Pembangunan Nasional 304
K. Penyebab Kesenjangan Ekonomi di Indonesia 306
L. Penanggulangan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia 307
M. Contoh Kesenjangan di Indonesia 308

BAB XII PARADOK EKONOMI DI NEGARA–NEGARA MUSLIM (Indonesia, Malaysia, dan Kuwait) 317

PENDAHULUAN 319
A. Definisi dari Paradok 321
B. Permasalahan Perekonomian di Negara-Negara Dunia 321
C. Paradok di Negara Indonesia 323
D. Paradok Ekonomi di Negara Malaysia 334
E. Paradok Ekonomi di Negara Kuwait 335

BAB XIII POPULASI DAN KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI 339

PENDAHULUAN 341
A. Pengertian Penduduk dan Populasi 342
E. Qanun Kependudukan dan Pertumbuhan Penduduk 344
F. Piramida Kependudukan 346
G. Teori Kependudukan 347
H. Konsep Kependudukan 352
I. Perkembangan Penduduk Di Indonesia 353
J. Kebijakan Kependudukan 355
K. Jumlah Penduduk dan Pembangunan 357
L. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Pada Pembangunan Ekonomi 359
M. Pertumbuhan Penduduk Yang Cepat di Negara Berkembang 365
N. Fenomena Bonus Demografi Di Indonesia 366
O. Potensi Ekonomi Syariah dengan Mayoritas Penduduk Muslim Terbesar di Dunia 371

DAFTAR PUSTAKA 374

BIODATA PENULIS 385

BAB I
PROBLEMATIKA EKONOMI IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Di antaranya adalah Umer Chapra yang mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Masalah ekonomi merupakan masalah yang tidak terelakkan akan terjadi pada setiap individu, masyarakat, negara bahkan dunia. Masalah ekonomi yang biasanya

dihadapi masyarakat adalah terkait kesejahteraan yang berkurang. Selain itu pengangguran juga merupakan masalah ekonomi yang dihadapi negara pada umumnya sebagai akibat dari kemiskinan itu sendiri. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Pendapat di atas berbeda dengan konsep permasalahan ekonomi yang diungkapkan oleh para ekonomi muslim, salah satunya adalah Baqir As-Sadr. Dia berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatunya telah diukur secara sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. (F. Fadilla, 2017)

Dilihat dari upaya pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke kota lain menyatakan bahwa konsep *nation state* yang merupakan salah satu konsep politik kembali berkembang. *Nation states* merupakan sekelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan solidaritas dan loyalitas umum dengan berlandaskan kesadaran yang tinggi untuk membangun sebuah negara-bangsa. *Nation state* juga menjadi faktor penentu untuk memperjelas identitas suatu negara sama halnya dengan ibu kota negara.

Dalam Al-Qur'an tidak ada yang menegaskan tentang pendirian negara namun, dalam al-Qur'an, istilah ummah disebut 64 kali dalam 24 surat. Dalam frekuensi sebanyak itu, ummah mengandung sejumlah arti, umpamanya bangsa (*nation*), agama (*religion*) atau kelompok keagamaan (*religious*

community), waktu (*time*) atau jangka waktu (*term*), juga pemimpin sinonim dengan imam. Sementara itu, di dalam istilah lain yang menunjuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. (Adibah, 2016)

Pandangan Islam mengenai *nation-state* berdasar Al-Quran An-Nisa:59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya". Makna surat di atas hanya membahas tentang ketaatan kita pada pemerintah (ulil amri).*

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *nation-state* di dunia Islam beragam dalam penjabarannya dan perihal dasar penerimaan konsep *nation-state* ini dikarenakan teori politik Islam klasik dan pertengahan tidak memiliki konsep yang jelas dan detail tentang penyelenggaraan negara sehingga menimbulkan pengertian yang mengandung pro dan kontra, adanya kesadaran bersama dalam mengakui praktik dunia Islam menggunakan konsep *nation-state* pasca kolonialisme (Adibah, 2016).

A. Permasalahan yang Dihadapi Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Secara bahasa, ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *capital city* berasal dari bahasa latin yakni *caput* yang

berarti kepala (*head*). Berkaitan dengan ibu kota, Black's Law Dictionary mengartikan *Capital* sebagai *place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis*. *Capita*l juga dapat diartikan sebagai *seat of government*. Gottmann dan Harper mendefinisikan ibu kota (*capital*) sebagai berikut: *"The capital is by definition a seat of power and a place of decisionmaking processes that affect the lives and the future of the nation ruled, and that may influence trends and events beyond its borders. Capitals differ from other cities: the capital function secures strong and lasting centrality; it calls for a special hosting environment to provide what is required for the safe and efficient performance of the functions of government and decision-making characteristics of the place".* (Fikri Hadi & Ristawati Rosa, 2020)

Jauh sebelum Jakarta menjadi Ibu Kota Negara, setidaknya Indonesia telah tiga kali berpindah tempat untuk ibu kota negara ini. Pemindahan Ibu Kota sejak hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berikut ini, rangkuman redaksi (Kuswandi, n.d.) mengenai sejarah tiga kali Indonesia berpindah ibu kota negara selama masa kemerdekaan.

1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

   Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ternyata momen itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 16 September 1945 tentara sekutu datang ke Indonesia, tepatnya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tujuan mereka adalah untuk memulangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, kedatangan sekutu ini ditumpangi oleh Belanda (NICA). Belanda saat itu belum rela melepas Indonesia dan menganggap Indonesia masih negara jajahannya. Pada akhir tahun

1945 kondisi Ibu Kota Jakarta menjadi sangat tidak aman, pasalnya Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) mendirikan kantor di bawah kepemimpinan H.J Van Mook dalam rangka ingin merebut kembali Ibu Kota. Upaya penculikan dan pembunuhan pun dilakukan NICA terhadap para pemimpin Indonesia yang baru berusia sangat muda.

Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim pesan ke Jakarta melalui kurir yang menyarankan agar Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta. Hal ini ditanggapi positif oleh Presiden RI ke-1 Soekarno, dan menyetujui bahwa Ibu Kota Indonesia akan dipindahkan ke Yogyakarta. Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno bersama rombongan berangkat dari Jakarta secara diam-diam menuju Yogyakarta. 15 pasukan khusus ditugaskan untuk mengawal rombongan presiden dalam perjalanannya ke Yogyakarta. Rombongan sampai Yogyakarta dengan selamat pada 4 Januari 1946 sekitar jam 09.00 WIB. Pada malam harinya, Wakil Menteri Penerangan RI, Mr. Ali Sastroamidjojo dalam siaran RRI mengumumkan secara resmi pemindahan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Selama di Yogyakarta, Presiden Soekarno berkantor di Gedung Agung yang terletak di seberang Benteng Vredeburg.

2. Bukittinggi, Sumatera Barat

   Bukittinggi, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu Ibu Kota negara Indonesia. Latar belakang pemilihan Bukittinggi menjadi Ibu Kota Indonesia berawal dari Agresi Militer Belanda II. Setelah sebelumnya Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Belanda masih

tetap ingin merebut Indonesia kembali untuk menjadi jajahannya, yaitu dengan melakukan Agresi Militer II. Kala itu Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dan juga melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, tokoh kemerdekaan Sutan Sjahrir, dan beberapa tokoh penting lainnya. Setelah ditangkap, Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya diasingkan oleh Belanda. Menjelang penangkapan Presiden Soekarno dan tokoh penting lainnya, Soekarno dan Hatta sempat mengadakan sidang kabinet darurat yang melahirkan keputusan bahwa pemerintahan untuk sementara diserahkan ke Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk pemerintah darurat.

3. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
   Selanjutnya roda pemerintahan Indonesia kembali normal, pada 17 Agustus 1950 para tokoh kemerdekaan pun akhirnya memutuskan DKI Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara Indonesia. Kala itu masih bernama dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tanggal 16 Agustus 2019 pada hari Jumat tepatnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Presiden Joko Widodo melakukan pidato Kenegaraan di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat yang secara khusus meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Adanya gagasan untuk memindahkan ibu kota negara sudah ada sejak kepemimpinan Soekarno yang berpendapat bahwa ibu kota negara akan dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan, begitu pula dengan Soeharto yang memiliki rencana menjadikan Jonggol, Kabupaten

Bogor sebagai ibu kota negara. Terdapat alasan yang mendasari mengapa ketiga presiden mengusulkan pemindahan ibu kota negara ke tempat lain karena tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintah, adanya ke tidak meratanya pembangunan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, dan mereka berharap ibu kota negara mampu melaksanakan visi pembangunan yang menyeluruh. Dari ketiga alasan dasar di atas secara empiris belum mampu mendorong instrumen kebijakan pemindahan ibu kota yang benar-benar terlaksana serta tidak ada kejelasan seberapa penting pemindahan ibu kota yang akan berdampak kepada masyarakat.

Di awal tahun 2022, Pemerintah bersama dengan parlemen telah menyepakati dan menyetujui landasan hukum untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara. Setelah melewati banyak proses yang tidak sederhana dan mudah, serta memakan waktu yang tidak singkat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), akhirnya secara resmi menjadi landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru yang berbentuk otoritas dengan nama Nusantara (Parlementaria DPR RI, 2020 dalam Pusat Riset Politik, 2022) (Kementerian_PPN/Bappenas, 2020). Adanya kemungkinan bahwa ibu kota negara akan dipindah karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur dengan tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tidak ada pasal yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Maka dari itu adanya fleksibilitas dalam mengatur pemindahan ibu kota negara namun harus memiliki alasan yang kuat tentang tujuan dan fungsinya.

Fungsi ibu kota negara digunakan untuk pusat pemerintahan atau sebagai pusat perekonomian utama

dari suatu wilayah dan menjadi titik pusat kekuatan politik, budaya serta intelektual. Sehingga ibu kota negara harus yang ideal secara optimal. Maksud dari ibu kota negara yang ideal secara optimal adalah suatu wilayah yang bisa memineralisasi berbagai hal negatif yang dialami dalam suatu negara. Karena kondisi Jakarta sebagai ibu kota memiliki Multi fungsi yang berdampak negatif terhadap sistem pemerintahan memusat di Jakarta dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan ekologi, seperti:

a. Pemerintah yang otoriter atau sistem kekuasaan memusat menjadikan sistem pemerintahan daerah kehilangan kepercayaan sehingga tidak dapat berkembang melayani masyarakat dengan baik.
b. Banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pemerintahan yang merugikan semua pihak terutama masyarakat.
c. Karena Jakarta sebagai pusat ekonomi maka hal ini mengakibatkan meledaknya jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, kerawanan sosial, kekerasan dan kejahatan, hal ini diikuti dengan adanya krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, air, tanah sehingga mengakibatkan sering terjadinya banjir di berbagai daerah yang tidak sedikit memakan korban.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu kota negara saat ini sudah tidak ideal digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan selama ini. Dimana Rencana Umum Tata Ruang yang semula bagus sekarang yang terjadi dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai degan tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilihat dari aspek ke ruangan, dalam aspek ekologi yaitu sering terjadinya banjir dan tanah

longsor, dan kewilayahan yang direncanakan oleh Rencana Induk 1965-19985 tidak mengalami perubahan dan kelanjutan pada rencana Induk 1985-2005, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik menghasilkan keputusan bahwa ibu kota negara harus dipindah tetapi dengan tenggang waktu dan tidak dijadikan wacana lagi tapi benar-benar dilakukan.

Berdasarkan pemahaman di atas maka pembangunan ibu kota harus bertujuan untuk mendukung roda pemerintahan agar berjalan dengan baik. Namun dilihat Jakarta sekarang memiliki multi fungsi tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintah namun juga berfungsi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dampak dari multifungsi tersebut mengakibatkan beban ibu kota semakin banyak sehingga terjadi beberapa masalah terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal di atas yang menjadi salah satu dasar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain. Didasarkan pemahaman di atas apabila dihubungkan dengan masalah Indonesia saat ini, maka rencana pemindahan ibu kota harus didukung oleh semua kalangan agar pemindahan ibu kota berjalan konsisten dan berkelanjutan dengan baik.

Maka dari itu Presiden Joko Widodo mengusulkan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dan dengan di dukung oleh pertimbangan yang berdasarkan kajian kementerian PPN/Bappenas dalam menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diantara-Nya sebagai berikut:

a. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) bahwa di tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi penduduk di pulau Jawa mencapai 151,59 juta atau sekitar 56,10 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Data ini membuktikan bahwa beban kependudukan Indonesia

selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

b. Terkait dominasi dan kontribusi ekonomi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) di mana Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,89 persen dari PDB nasional pada tahun 2021 yang mencapai Rp16.970,8 triliun dengan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau USD4.349,5. (infoindonesia.id, 2022). Mayoritas kontribusi PDB Pulau Jawa tersebut berasal dari kawasan Jakarta sebagai ibu kota dan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai 20,85 persen. Jika dilihat dari PDB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp274,7 juta, sementara rata-rata nasional hanya mencapai Rp62,2 juta. Artinya PDB per kapita DKI Jakarta lebih dari empat kalinya PDB rata-rata nasional.
c. Berhubungan dengan kondisi ketersediaan air bersih di Jawa yang tengah menghadapi krisis air berdasarkan data tahun 2016 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Sementara dengan potensi dan kerawanan lingkungan yang dihadapi oleh kota Jakarta seperti banjir, longsor, abrasi air laut, polusi yang sangat serius di berbagai sungai, maupun terkait kemacetan lalu lintas. (Bappenas, 2019).
e. Lokasinya yang strategis di mana letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia yang di mana Kalimantan merupakan pusat dari wilayah Nusantara.
f. Lahannya masih luas yang dimiliki oleh pemerintah/ BUMN perkebunan untuk mengurangi investasi.
g. Lahan yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru harus bebas dari bencana gempa bumi, tsunami, banjir, erosi, kebakaran hutan, lahan gambut dan gunung berapi.

h. Tersedia sumber daya air yang tidak tercemar dan untuk efisiensi inventaris infrastruktur maka kota tersebut harus dekat dengan existing. Meliputi:
    1) Adanya Pelabuhan laut guna mewujudkan Indonesia sebagai negara Maritime melalui konektivitas tol laut antar pulau
    2) Jaringan komunikasi, tingkat layanan air, sanitasi dan listrik harus memadai
    3) Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang
    4) Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan
    5) Adanya akses logistik contohnya, Pelabuhan, jalan dan bandara. (H.M. Yahya, 2018)

Berdasarkan pertimbangan yang harus dibahas oleh pemerintah maka, Presiden Jokowi Dodo harus memenuhi syarat yang perlu dipenuhi dalam pemindahan ibu kota sesuai dengan analisis peneliti seperti:

1. Kepemimpinan ideal visioner dan konsistensi komitmen yaitu pemimpin Lembaga tinggi negara harus mampu mengubungkan masalah ibu kota saat ini dengan potensi pengembangan ibu kota di masa depan. Pertama, seorang Presiden sebagai inisiator harus mampu memberikan sebuah alasan yang dapat diterima semua pihak mengapa harus dilakukannya pemindahan ibu kota itu sendiri, Kedua, Presiden sebagai komunikator yang mampu mendapat kepercayaan dari semua pihak antara internal dan eksternal pemerintahan bahwasanya gagasan yang disampaikan mampu menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada di ibu kota saat ini. Ketiga, sebagai penggerak yang bisa mengajak pemangku kepentingan dan masyarakat ikut andil dalam proses pemindahan

ibu kota. Keempat, Presiden sebagai penanggung jawab dalam kegiatan pemindahan ibu kota. Tidak hanya sebagai pemimpin visioner namun Presiden juga harus memiliki sikap komitmen terhadap kebijakan yang sudah dibuat bersama para pemimpin selanjutnya. Di mana Presiden memiliki masa jabatan yang terbatas maka para pemimpin Lembaga tinggi yang selanjutnya yaitu pengganti Presiden Joko Widodo harus memiliki komitmen yang sama dengan presiden saat ini, agar pembangunan pemindahan ibu kota negara mengalami keberlanjutan.

2. Aturan hukum yang komprehensif ialah sebuah landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah melakukan suatu kebijakan Bersama di mana landasan tersebut memiliki 5 aspek dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan pemindahan ibu kota, Pertama, yang mencakup kelayakan dan kepatutan serta adanya ketentuan cara pemindahan ibu kota. Kedua, pengaturan mengenai rencana infrastruktur ibu kota secara fisik seperti lokasi ibu kota, desain ibu kota, konstruksi dan sebagainya. Ketiga, aspek pengaturan sumber daya manusia dan administrasi yang dimulai dari kependudukan yang akan tinggal di ibu kota baru. Keempat, aspek pengaturan pengangguran yang mencakup alokasi dana yang harus transparan dan akuntable. Kelima, aspek pengaturan keterlibatan pihak non-pemerintah yaitu swasta guna memperlihatkan bahwa pihak non-pemerintah ikut andil dalam kegiatan pemindahan ibu kota.
3. Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif digunakan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota merupakan masalah yang lahir dari sebuah tuntutan semua pihak sehingga akomodasi sebagai bentuk kepentingan

publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian keterbukaan yang diperlihatkan oleh pemerintah dalam kegiatan pemindahan ibu kota dalam segala aspek dapat menimbulkan rasa kepemilikan atas keputusan yang diambil secara bersama. Selanjutnya menjelaskan akan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan sehingga pemangku kepentingan merasakan keberhasilan berkat kerja sama dan usaha Bersama.

4. Sumber daya manusia yang profesional harus dipilih dengan cermat oleh pemerintah agar mampu melengkapi keberhasilan pemindahan ibu kota dengan berdasarkan dua pemanfaatan fungsi, yang pertama manajerial yang akan melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota sesuai dengan tujuan awal sehingga fungsi sumber daya manusia ini sangat penting karena bertugas untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah di ibu kota baru tidak mengalami masalah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional yang harus mewujudkan berbagai aspek material dan aspek imaterial tidak terjadi tumpeng tindih dalam melaksanakan tugas.
5. Karakteristik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal menjadi dasar pentingnya keberhasilan kebijakan pemindahan ibu kota yaitu masyarakat lokal sebagai pemilik tanah dan pemilik adat istiadat, budaya yang membentuk suatu wilayah yang berkarakter, sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pembangunan ibu kota maka dari itu pemerintah perlu menjaga dukungan dari warga lokal agar selalu berkelanjutan dengan melakukan ganti rugi atas dampak yang menimpa di masyarakat atas adanya pembangunan ibu kota berupa pelestarian budaya, akses pendidikan dan

penghidupan. Kemudian memastikan bahwa akan terjadi peningkatan kualitas kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat lokal terjamin meskipun terdapat pendatang.

6. Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial yang harus ada dalam ibu kota baru seperti, pelayanan publik yang baik sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing organisasi pemerintah, menjadikan organisasi pemerintah berkembang sehingga mampu mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat, adanya komitmen untuk menyejahterakan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. (Herdiana, 2020)moving the capital is not only limited to moving the function of government to a new place. It involves many complex matters that require consistent, systematic, measurable, and sustainable measures. Based on these problems, this article is intended to illustrate the conditions that must be met for successful relocation of the nation's capital. The research method used is descriptive research in nature with a qualitative approach. The data used is sourced from secondary data in the form of books, journals and other relevant references. The results revealed that there are 6 (six.

B. Problematik Ekonomi dalam Konsep Islam

Problematik memiliki arti bahwa adanya permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan. Sedangkan Ekonomi Islam memiliki arti sebagai suatu kajian ilmu yang membahas masalah pengelolaan sumber daya alam berdasarkan aturan Syariah yang bersumber dari Al-Quran, sunah, dan Ijma' guna untuk mendapatkan Ridha Allah SWT jadi tidak semata-mata hanya untuk mendapat kebahagiaan di dunia saja melainkan di akhirat pun juga mendapat kebahagiaan yang abadi. Maka

Problematik Ekonomi dalam Konsep Islam maksudnya adalah sebuah permasalahan tentang suatu kajian ilmu yang membahas masalah pengelolaan sumber daya alam berdasarkan aturan Syariah.

Tokoh pemikir muslim yang membahas mengenai masalah ekonomi Islam salah satunya adalah Muhamad Baqir al-Sadr. Dalam kitabnya yang bernama Kitab Iqtishduna sebagai salah satu studi komparatif dalam sistem ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis Marxisme, dan dikutip oleh hampir semua ekonomi modern. Menurut ulama ini dikarenakan sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dimana yang kuat memiliki kuasa terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sementara yang lemah menjadi sangat miskin karena tidak memiliki sumber daya sehingga terjadi distribusi yang tidak merata dan adil.

Dalam sistem ekonomi distribusi Islam, menurut ulama terdapat 2 bentuk teori yaitu:

1. Peluang ialah pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik hasil kerjanya.
2. Usaha untuk menggunakan kekayaan alam yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam tersebut. (F. Fadilla, 2017)

C. Rencana Pembangunan IKN







Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari Ibu Kota sendiri adalah tempat yang dijadikan pusat kegiatan pemerintahan di suatu negara yang terdapat lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif. Simbol identitas bangsa yang membentuk suatu negara dilihat dari keberadaan Ibu Kota Negara. Simbol identitas bangsa tersebut merupakan suatu komponen yang menggambarkan identitas nasional yang digunakan sebagai lokasi kekuasaan suatu negara sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. (Kementerian_PPN/ Bappenas, 2020)

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti pemerataan pembangunan serta pengurangan beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional. Pemindahan ini memiliki tujuan dan Visi yaitu pertama, membangun kota berkelanjutan didunia yang di dalam-Nya terdapat unsur keamanan, selaras dengan

alam, sirkuler dan tangguh, *Net Zero emission*, Internet terhubung, aktif dan mudah diakses. Kedua, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yaitu dengan adanya peluang ekonomi tangguh untuk semua kalangan dan bisa mengaplikasikan teknologi dan inovasi dengan nyaman dan efisien. Ketiga, sebagai simbol identitas nasional yang maknanya adalah keindahan Indonesia-Bhineka Tunggal Ika.

Maka dari itu dilihat dari rencana pembangunan IKN di Kalimantan dilihat dari berbagai pembangunan yang akan dilakukan dengan beberapa penjelasan di bawah ini:

1. Rencana pembangunan Istana Kepresidenan
   Pembangunan Istana Kepresidenan yang akan dilakukan di daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencananya luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau di mana Istana Kepresidenan ini dibangun di atas lahan 100 hektare. Khusus untuk bangunan Istana Kepresidenan rencananya akan dibangun dengan luas site 3,5 Ha dengan ketinggian 4 lantai. Dari keseluruhan bangunan yang berada di kawasan bangunan Istana Kepresidenan tidak lebih tinggi dari Bangunan Istana Kepresidenan. (Kemenparekraf.go.id, n.d.)

   Nyoman Nuarta merupakan desain final bangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru yaitu Kalmantan Timur yang sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Bentuk desain yaitu burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap sehingga nama dari desain bangunan tersebut adalah Istana Garuda. Menurut Nyoman alasan menjadikan burung Garuda menjadi desain bangunan istana negara karena Garuda merupakan simbol persatuan yang kaitannya sangat erat dengan indonesia

yang memiliki berbagai perbedaan, cara pandang yang berbeda, segala keragaman adat istiadat dan perilaku serta perbedaan kepercayaan dan agama.

2. Rencana Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
   Hal yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan di IKN Kalimantan Timur ialah melalui peningkatan dan penguatan postur TNI, yang memiliki interoperabilitas dan terintegrasi dalam *Network Centric Warfare* melalui:
   a. Pembangunan kekuatan satuan TNI, seperti: fasilitas, organisasi, , materil dan fasilitas serta personil.
   b. Pengembangan kemampuan Satuan TNI yang berisi: kemampuan intelejen dan dukungan, pertahana dan keamanan, diplomasi serta pemberdayaan wilayah pertahanan.
   c. Penggelaran Satuan TNI, disesuaikan dengan geografi wilayah dan kebutuhan matra.
   d. Grand design zonasi dan rencana pentahapan pembangunan.

   Kesimpulan dari rencana pemindahan ibu kota negara ke kalimantan timur yang dilihat dari aspek pertahanan dan keamaan yaitu pindahnya ibu kota ini akan mempengaruhi postur pertahanan negara dikarenakan akan terjadi yang namanya penataan kembali tata ruang wilayah pertahanan, tidak hanya itu perpindahan IKN juga berdampak terhadap perumusan desain gelar kekuatan dan kemampuan TNI dalam melindungi IKN yang baru. (Kemhan RI, 2022)
3. Rencana Pembangunan Transportasi
   Kementerian Perhubungan merencanakan pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi dan ramah

lingkungan. Budi Karya Sumadi telah menjelaskan dengan terbatasnya ruang fiskal pendanaan oleh APBN, maka pihak swasta dan masyarakat diperkenankan untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha. Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan yaitu, transportasi laut akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang yang di mana menganut konsep *smart port* dan *traffic separation scheme*, transportasi udara yang akan mengusung konsep Aerotropolis yang terintegrasi dan memperhatikan etika lingkungan serta cerdas. Selanjutnya untuk transportasi darat hal yang akan dikembangkan yaitu fasilitas pejalan kaki, kendaraan listrik berbasis baterai, sepeda, dan angkutan bus.

Meskipun di Kalimantan Timur sudah memiliki prasarana transportasi seperti bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Kariangau dan Kaltim Kariangau Terminal, namun kementerian perhubungan akan tetap membangun sejumlah infrastruktur transportasi di Kawasan inti pusat pemerintahan maupun daerah guna mendukung konektivitas di IKN Baru seperti, terminal tipe A, Inteligen Transport System, Bus Rapid Transit, dan bandara khusus VVIP, serta kereta api perkotaan dan antara kota. (*Rencana Pemindahan IKN, Kemenhub Siapkan Sistem Transportasi Cerdas, Terintegrasi, Dan Ramah Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, n.d.)

4. Rencana Pembangunan Komunikasi
   Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan rencana untuk pembuatan program baru untuk membangun komunikasi di ibu kota baru yang

dinamai dengan Kalimantan Ring yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan internet di IKN baru karena akan ada banyak masyarakat yang melakukan migrasi ke Kalimantan Timur sehingga traffic internet akan mengalami peningkatan. Selain itu Kemenkominfo juga berencana untuk membangun gateway internasional di Kalimantan yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kecepatan internet. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai akan lebih mudah dilakukan disebabkan secara geografis bukit di Kalimantan tidak setinggi Papua sehingga pembiayaannya pun juga akan lebih murah. (*Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, n.d.)

5. Rencana Pembangunan Teknologi
   Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate mengatakan bahwa Pemerintah akan menjadikan IKN Baru menjadi *Smart Capital City* dengan didukung teknologi informasi baru 5G. yang dimana 5G tersebut merupakan jaringan *backbone* (tulang punggung) yang sudah dibangun di sekitar IKN melalui Kemenkominfo melalui Badan Layanan Umum badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi maupun operator telekomunikasi seluler dan operator jaringan telekomunikasi kabel *fiber optic*, tujuan dari pembuatan teknologi 5G ini untuk merubah cara kerja, budaya kerja dan meningkatkan efisiensi kerja serta model baru sesuai dengan adanya teknologi digital.

D. Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara

1. Dampak Sosial Ekonomi

Terkait rencana pemindahan IKN, terdapat 2 potensi dampak sosial ekonomi, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang bekerja dan

tinggal di kawasan hutan perkebunan. Agar kepindahan aparatur sipil negara (ASN) dan unsur pendukungnya serta pembangunan IKN menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian diperlukan beberapa strategi yaitu; Pertama, representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN, misalnya digunakannya simbol/ ornamen Dayak pada bangunan, pengembangan zona kebudayaan, pelestarian situs budaya melalui museum atau taman seperti contoh di beberapa kota besar dunia. Kedua, pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan untuk menjadi bekal pengetahuan ASN yang akan dipindahkan, agar terjadi integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh semua masyarakat. Ketiga, untuk keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, misalnya tempat usaha beserta alat produksi, pengelolaan pangan yang dikelola oleh masyarakat setempat, pengembangan smart farming, platform penjualan hasil kerajinan, dan sebagainya. Dari aspek ekonomi, menurut Hartley (1995) pertimbangan ditetapkannya ibu kota menurut perspektif ilmu ekonomi pertanahan adalah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, hingga stabilisasi tanpa adanya pengorbanan kesejahteraan masyarakat. Jakarta yang saat ini menjadi pusat roda perekonomian sekaligus pemerintahan, menjadikan kebijakan pemindahan IKN sebagai rencana long term, menjadi keputusan tepat untuk meringankan ibu kota yang berat beban.

2. **Dampak Populasi**

Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya budaya-budaya Jawa ke masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dapat terjadi pergeseran budaya atau adat istiadat. Dengan kata lain, dapat juga terjadi meleburnya budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan masyarakat asal (Daya) menjadi sebuah akulturasi budaya.

3. **Dampak Politik**

Pemindahan ibukota negara bukan hanya akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit, tetapi juga berdampak pada politik ketatanegaraan. Terkait dengan perpindahan Ibukota negara dimana lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang. Itu berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bersidang di ibukota baru; demikian pula kantor pusat Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berpindah. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap berada di Jakarta dan hanya saat siding Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berangkat ke Ibukota negara baru, dari sisi politik kekuasaan pasti sangat tidak efektif. Apalagi jika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara eksekutif dan

legislatif digelar di Jakarta, sedangkan Presiden dan menterinya berkantor di ibukota negara yang baru, berapa biaya akomodasi dan transportasi yang harus disiapkan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Walau Pemerintah bermaksud memindahkan Ibukota Negara, maka kedudukan seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang yang memang diatur berkedudukan di Ibukota Negara juga harus pindah. Itu berarti bahwa yang akan pindah bukan saja pemerintah dalam arti sempit -eksekutif saja –akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas, termasuk Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD dan Yudikatif yaitu MA dan MK.

4. Dampak Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menilai bahwa pindahnya ibu kota memiliki dampak yang positif bagi pendidikan bangsa dikarenakan terdapat kesenjangan Pendidikan di berbagai daerah disebabkan keputusan yang berhubungan dengan Pendidikan berpusat di Jakarta. Kesenjangan ini terjadi karena sistem Pendidikan di Indonesia tidak merata. System Pendidikan yang tidak merata itu seperti masih adanya kemiskinan, sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru dan prestasi serta rendahnya sarana dan prasarana sekolah. Penyebab dari kemiskinan adalah karena banyak anak yang putus sekolah guna bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Maka pentingnya pengelolaan yang terstruktur dan terencana dalam pemerataan jumlah tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pendidikan. Sehingga tujuan pembangunan Pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

5. **Dampak Pengangguran**
   Perpindahan Ibu Kota Negara menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Sebagian masyarakat dan juga menjadi kecemasan tersendiri untuk yang lainnya. Dimana pindahnya ibu kota negara bagi masyarakat yang mendapat dampak positif yaitu mereka yang akan melakukan migrasi dikarenakan dengan terbentuknya IKN maka lapangan kerja terbuka luas, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran secara signifikan. Namun akan berdampak negatif bagi yang lainnya, yaitu dengan migrasi yang akan terjadi peningkatan sehingga terdapat ketimpangan antara lapangan kerja dan tenaga kerja yang akhirnya kemiskinan akan mengalami kenaikan.
6. **Dampak Transportasi**
   Koneksitas administrasi di tunjang oleh kemudahan jalur transportasi maupun fasilitas transportasi lain di Kalimantan Tengah. Searah dengan hal itu Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan program pembangunan jalan yang menghubungkan seluruh daerah yang ada di Kalimantan Tengah maupun daerah lain yang ada di pulau Kalimantan. Hal ini disebabkan karena jalan sebagai penghubung antar daerah menjadi jalur transportasi utama sehingga secara otomatis mendukung aspek administrasi berjalan normal. Adapun dampak positif lainnya adalah kemudahan akses transportasi mengakibatkan aparatur pemerintah daerah lebih mudah merespons atau menjangkau setiap wilayah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. **Dampak Pertanian, Perkebunan & Pertambangan**
   Kalimantan Tengah memiliki potensi bisnis di sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Potensi tersebut mengakibatkan kualitas hutan mengalami penurunan. Hal

ini dikemukakan oleh anggota DPRD Kalimantan Tengah yang berhasil ditemui, perkembangan kondisi lingkungan hidup dan hutan dalam beberapa tahun terakhir sangat parah, hal itu disebabkan peralihan dari pemanfaatan hutan (kayu) menjadi lokasi pertambangan. Peralihan tersebut menciptakan dampak bagi hutan dan lingkungan hidup. Penurunan luas hutan yang ada di Kalimantan Tengah menjadi dilema tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan termasuk daerah yang berada di sekitar Kota Palangka Raya.

8. **Dampak Perdagangan**

Bertambahnya penduduk di Kota Palangka Raya telah memberikan dampak bagi tumbuhnya sektor ekonomi seperti perdagangan. Tersedianya pasar dengan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat semakin tinggi. Secara umum perkembangan ekonomi menunjukkan nilai positif sekaligus sisi negatif. Adapun sisi negatif dari perkembangan ekonomi adalah munculnya kesenjangan bagi masyarakat ekonomi lemah. Pengamatan ini dikuatkan pendapat tokoh masyarakat Kalimantan Tengah yang mengatakan adanya pendatang mendorong peningkatan pembangunan seperti infrastruktur jalan. Dampak positifnya yaitu, dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antara wilayah di Indonesia, seperti perdagangan di dalam provinsi ibu kota yang baru yaitu Kalimantan. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat terpenuhi. (Ahmad, n.d.)

BAB II

PEMANFAATAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PRESPEKTIF SYARIAH

PENDAHULUAN

Kelautan merupakan anugerah Allah swt. yang tak ternilai harganya bagi umat manusia dimana di dalamnya mengandung beragam potensi sumber daya alam laut yang amat kaya selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya perikanan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan perikanan lainnya, menghasilkan produk dan jasa kelautan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan perikanan bagi perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan kosumsi ikan, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam kelautan perikanan, meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkukuh kedaulatan wilayah NKRI. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor kelautan perikanan yakni meningkatkan inovasi teknologi dan manajemen profesional,

meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan perikanan yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Khusus sektor perikanan, saat ini belum dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional. Padahal potensi perikanannya sangat besar. Namun kenyataannya sektor perikanan dan kelautan hanya dianggap sebagai sektor pelengkap atau penunjang pembangunan sektor lain seperti industri dan pertanian. Oleh karena itu, pembangunan nasional sudah saatnya diperluas ke kawasan pesisir, termasuk sektor ekonomi, persoalan sosial, dan perkembangan kebudayaannya. Dengan demikian, banyak sektor yang dapat digali serta dikembangkan di wilayah lautan.

A. Pandangan Islam dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Laut merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, Islam mengajarkan untuk melindungi serta memelihara ekosistem yang terdapat di darat dan di laut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT terdapat surah (QS. Ar Rum ayat 41) yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Allah merupakan pemilik dari sumber daya alam di alam semesta ini. Karena Allah merupakan pencipta, pengatur, serta

pemilik seluruh yang ada di alam semesta ini. Manusia sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di bumi merupakan pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya. Namun, dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, manusia harus menjalankan kewajiban untuk menjaga lingkungan (hifdzul bilah). Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah (2:60)

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِيْ الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah dari padanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. "

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: " Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. " (Q.S Al A'raf ayat 56)

Ayat di atas apabila dikaji dalam ilmu Usul Fiqh, ketika kita dilarang berbuat kerusakan alam maka kita harus menjaga atau melestarikan alam tersebut. Adapun perintah tersebut bergantung terhadap status larangannya. Apabila status merusak alam adalah haram, maka melestarikan alam hukumnya adalah wajib. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah

(pemimpin) di bumi bertugas untuk melestarikan alam serta menjaga keberlangsungan (sustainability). Dalam tugas tersebut terdapat tiga nilai yang harus dilakukan manusia, yaitu wajib membangun lingkungan, memanfaatkan, serta menjaga keberlangsungan. Nilai tersebut mengajarkan bahwa dalam memanfaatkan alam tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekosistem alam tersebut. Pengelolaan sektor perikanan tangkap, harus berlandaskan dengan asas kerja sama. Bahwa sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia, bukan untuk dikuasai oleh beberapa orang. Islam mengedepankan bahwa kerja sama jauh lebih baik daripada persaingan, dan menjaga ekosistem perikanan tangkap sesuai dengan konsep bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama (Muslim and Boesono 2015).

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-Hujurat Ayat 10)

Ayat di atas merupakan seruan bahwa sesama manusia terutama muslim merupakan saudara. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam terutama sektor perikanan harus mengedepankan prinsip persaudaraan daripada persaingan. Dengan mengedepankan prinsip persaudaraan, maka akan berimplikasi terhadap tanggung jawab bersama dalam pengentasan kemiskinan, terutama membantu mengentaskan kemiskinan saudara sesama muslim. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rerangka Hifdzul Biah, Islam menganjurkan untuk

menyelamatkan spesies, memanfaatkan, dan memperlakukan semua makhluk Allah secara bijaksana. Karena semua hamba Allah senantiasa bertasbih dan menyembah Allah. Hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim "Abu Hurairah menceritakan seperti yang dikisahkan Rasulullah tentang kejadian pada jaman nabi terdahulu. Ada seorang nabi yang disengat semut dan dengan marah sang nabi memerintahkan untuk membakar semua sarang semut. Karena kejadian ini Allah memperingatkan nabi tersebut dalam firman-Nya: 'hanya karena seekor semut engkau membakar semua komunitas yang menyembahku".

Mengelola sumber daya alam, terutama kelautan harus secara komprehensif, tidak berdiri sendiri dan harus memperhatikan pengelolaan sumber daya lainnya. Kemudian dalam mengelola sumber daya alam diharuskan untuk mendalami disiplin ilmu pengetahuan yang terkait. Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2:164) yang berbunyi:

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan".

Ayat di atas menunjukkan bahwa mengelola sumber daya kelautan harus dikelola secara berkelanjutan. Kemudian ayat tersebut menunjukkan disiplin ilmu yang harus didalami untuk pengelolaan sumber daya laut. Ilmu tersebut adalah ilmu astronomi "silih bergantinya malam dan siang", ilmu kelautan "bahtera yang berlayar di laut", ilmu hewan "dia sebarkan di bumi segala jenis hewan", ilmu meteorologi "dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan", serta ilmu sains "kaum yang memikirkan".

Islam mengajarkan bahwa untuk mewujudkan negeri yang makmur harus memenuhi 3 prioritas yang harus dikelola secara optimal. Yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta kedaulatan konservasi. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nahl (16:14) yang berbunyi:

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".

Mengelola sumber daya kelautan, Islam mengajarkan menggunakan standar perlakuan terbaik (ihsan). Allah sangat menyukai manusia yang menjalankan ihsan terhadap segala sesuatu. Hal tersebut terdapat dalam Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh (melaksanakan hukum qishas), maka perbaikilah cara pelaksanaannya. Jika kalian melakukan penyembelihan hewan, maka*

berbuat baiklah dalam penyembelihan. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan binatang sembelihannya. (H.R. Bukhari Muslim)".

Perlakuan terbaik yang dimaksud adalah tidak berlaku berlebihan, memenuhi unsut keberlanjutan serta melakukan upaya konservasi di dalamnya. Rasulullah mengajarkan bahwa mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak boleh membahayakan diri sendiri serta orang lain. Pemanfaatan sumber daya perikanan hampir sama dengan pemanfaatan sumber daya lainnya, yaitu dilarang untuk berlaku monopoli. Hal tersebut terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim "Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur, dengan tujuan agar tidak ada orang yang menggembalakan ternaknya di padang rumput yang tidak memiliki sumur". Islam memandang bahwa lingkungan harus dijaga agar sumber daya alam dapat terbarukan. Dengan menjaga lingkungan serta tidak melakukan kerusakan yang berlebihan, maka alam akan merestorasi sumber dayanya sehingga dapat digunakan secara berlanjut bagi manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am (6:54) yang berbunyi:

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ
مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas DiriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat

setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Muslim harus melihat bahwa alam bukan entitasentitas yang tidak mempunyai nilai sakral. Muslim harus yakin bahwa alam bukanlah milik manusia, kepemilikan manusia hanyalah bersifat amanah, titipan yang suatu saat harus dipertanggung jawabkan kepada pemilik-Nya. Sebagai pengemban amanah, seharusnya tidak berdifa eksploitatif dan merusak alam agar tidak menerima murka Allah SWT dan tergolong sebagai orang zalim. Dengan adanya konsekuensi dalam setiap perbuatan, manusia diharuskan berhati-hati dalam mempersiapkan bekal yang akan ia bawa pada kehidupan di akhirat kelak. Pengelolaan perikanan tangkap menurut perspektif Islam bahwa dalam melakukan eksploitasi dilarang berlebihan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf (7:31) yang berbunyi:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"

Kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa manusia cenderung berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, prinsip ekonomi menjelaskan bahwa manusia berusaha untuk mendapatkan sumber daya dengan maksimal dengan usaha yang minimal., sedangkan dalam Islam, Allah SWT berfirman bahwa manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Efisiensi terhadap sumber daya alam sangat penting terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dikarenakan dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya

alam tersebut maka kerusakan sumber daya alam menjadi tidak dapat diperbaharui, kecuali dengan biaya yang sangat tinggi (Gumilang 2017).

Masyarakat saat ini cenderung mengedepankan keinginan daripada kebutuhan mereka, hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, prinsip konsumsi dalam Islam, keinginan akan diperoleh apabila kebutuhan telah tercapai. Apabila konsumsi berdasarkan keinginan saja, maka hanya memberikan kepuasan dan apabila konsumsi berdasarkan kebutuhan, maka hanya mendapatkan manfaat saja. Sektor perikanan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan keinginan untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa memikirkan resiko dari akibat penangkapan ikan berlebih dan illegal fishing yang mengakibatkan berkurangnya spesies ikan tertentu. Sehingga akan mengurangi jumlah spesies ikan yang berada di perairan Indonesia. Resiko selanjutnya adalah dengan penangkapan berlebih, akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan di perairan yang menjadikan tidak seimbangnya ekosistem. Illegal fishing juga menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang berada di perairan dikarenakan terumbu karang merupakan lingkungan utama untuk ikan berlindung serta mencari makan. Rusaknya terumbu karang juga menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir, hal tersebut merupakan dampak hilangnya penahan ombak yang merupakan salah satu fungsi dari terumbu karang.

Pemerintah telah berusaha mengurangi kerusakan ekosistem serta berkurangnya populasi perikanan di perairan Indonesia. Pemerintah melakukan tindakan dengan cara perumusan kebijakan yang bertujuan agar ekosistem di

perairan Indonesia tetap terjaga, seperti kebijakan tegas untuk menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing dan melarang pengambilan hewan laut yang bertelur. Kebijakan pemerintah saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam menganjurkan untuk menjaga alam serta tidak merusaknya. Kemudian pemerintah menjaga jumlah dan ancaman perikanan tangkap di perairan Indonesia dari Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing nelayan asing, sehingga menyebabkan kerugian bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem untuk meningkatkan hasil tangkapan yang pada akhirnya akan merugikan nelayan serta berdampak pada menurunnya kontribusi sektor perikanan tangkap bagi perekonomian. Kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing yang banyak dilakukan oleh nelayan asing, disebabkan oleh luasnya laut Indonesia serta kurangnya SDM dan pengawasan laut. Sehingga laut Indonesia menjadi sasaran penangkapan ikan bagi nelayan asing.

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Dalam perspektif Islam, manusia beriman adalah manusia terbaik (khairu ummah) yang selalu meningkatkan kualitas hidup.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks Islam mengacu kepada pemikiran sosiologi Ibnu Khaldun, Pertama, adalah pemberdayaan pada matra rohaniah (afektif) Kedua, Pemberdayaan pada matra intelektual, lebih menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan) dan pembelajaran. Ketiga, Pemberdayaan ekonomi mengacu kepada pengembangan sumber daya manusia yang mandiri, sehingga pemberdayaan diarahkan kepada kecakapan hidup (life skill) dan ketrampilan berwirausaha, hal ini ditujukan untuk menghindarkan manusia dari kemiskinan.

Ketiga konsep pemberdayaan tersebut kalau kita kaitkan dengan pemberdayaan nelayan, maka dalam konteks rohaniyah adanya dorongan spiritual untuk mempertebal keimanan nelayan bahwa apa yang dilakukan dengan bekerja dilaut merupakan pengamalan dari ajaran Islam karena begitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan karunia Allah di lautan. Konteks intelektual adanya peningkatan kemampuan khususnya dalam bidnag teknologi tepat guna untuk mengolah karunia Allah tersebut, sedangkan dalam kontek ekonomi hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalahnya harus mengacu kepada sistem ekonomi berbasis Syari'ah. Ini menjadi urgen karena pembangunan ekonomi dalam Islam ditegakan berdasarkan konsep moral dan ketuhanan. Ia bersandar pada ajaran tentang halal, baik, jujur, amanah, saling mencintai dan persaudarann sejati.

Secara teknis pada skala mikro, perlu dirancang suatu pola perbankan sederhana yang dapat ditumbuhkan dilokasi-lokasi pusat industri dan finansial sekunder yang berbasis kelautan. Sistem ekonomi syari'ah harus berani tampil untuk menjadi alternatif solusi financial yang memihak dan memberikan dukungan kepada wirausahawan pemilik

keahlian, kepiawaian, dan keterampilam disektor kelautan. Lembaga semacam ini sangat menolong pedagang dan nelayan kecil karena dapat menggantikan peran tauke dan tengkulak ikan di perkampungan nelayan yang sering kali merupakan pemburu untung besar (rent seeker) atau riba yang haram karena menyengsarakan nelayan. Sudah saatnya hari ini kita implementasikan konsep ekonomi Islam dalam berbagai aspek kehidupan, bukan pada tataran konseptual tetapi pada tataran praktek langsung dilapangan. Sebagai kaum muslimin kita tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam secara verbal yang wujudnya hanya Tabligh saja akan tetapi lebih ditekankan pada aktualisasi nilai-nilai Islam secara universal sebagai wujud penerapan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam (Rahmatan lil Alamiin).

B. Potensi Kelautan di Indonesia

1. Perikanan
   Perikanan di laut Indonesia berperan penting untuk memenuhi protein masyarakat Indonesia. Ikan yang terdapat di perairan Indonesia ini juga diimpor ke berbagai negara, mulai dari ikan tuna, tongkol, kakap, sarden, dan lain sebagainya.
2. Kekayaan Pesisir
   Pesisir adalah perbatasan antara daratan dan laut, tepatnya 12 mil dari garis pantai. Proses sumber dayanya masih dipengaruhi oleh daratan seperti adanya erosi, pengendapan limbah, dan aliran sungai. Berbagai macam kekayaan pesisir adalah terumbu karang, tanaman mangrove, padang lamun, dan juga rumput laut.
3. Terumbu Karang
   Terumbu karang adalah habitat dari berbagai spesies

tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme. Terumbu karang hidup di pinggir pantai, yaitu di perairan dangkal hingga 40 meter. Hal yang paling mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang adalah kejernihan air di sekitarnya. Air yang keruh membuat terumbu karang sulit untuk bertahan dan akhirnya mati.

4. Tanaman Mangrove
   Tanaman mangrove atau tanaman bakau adalah berbagai macam jenis tumbuhan yang tumbuh di pesisir pantai. Tanaman mangrove terdiri dari beberapa tanaman lainnya seperti tanaman jenis bakau, api-api, dan lain-lain.
5. Rumput Laut
   Rumput laut biasanya hidup di tempat yang banyak terumbu karang. Persebaran rumput laut di Indonesia ada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Karimunjawa. Fungsi dari rumput laut antara lain:
   - Sebagai sumber makanan dengan bentuk olahan seperti agar-agar
   - Sebagai pupuk
   - Sebagai produk kosmetik
   - Sebagai produk farmasi
   - Rumput laut menjadi biofuel yang dijadikan sebagai bahan bakar.
6. Pariwisata
   Pantai dan laut adalah salah satu tempat favorit masyarakat yang membutuhkan healing. Selain keindahan laut dan pantai terdapat diving, snorkeling, atau menikmati sunset dan sunrise di pinggir pantai.
7. Energi dan Pertambangan
   Air laut dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Di bidang pertambangan, terdapat minyak

bumi, mineral, dan logam yang terkandung di bawah laut. Endapan minyak bumi dan gas alam terkandung di cekungan sedimen tersier. Indonesia memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi. Diperkirakan, Indonesia dapat menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak.

C. Potensi kelautan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kategori, yakni:

1. Potensi Sumberdaya Dapat Diperbarui
   Sumberdaya yang dapat diperbarui merupakan sumberdaya yang memiliki kemampuan pemulihan alami. Sumberdaya ini meliputi perikanan tangkap, budidaya (payau dan laut), bioteknologi dan biofarmakologi.
2. Potensi Sumber Daya Tidak Dapat Diperbarui
   Sumberdaya yang tidak dapat diperbarui adalah jenis-jenis sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan secara alami, sehingga bila jumlahnya habis, maka tidak dapat diganti. Sumberdaya ini umumnya berupa bahan mineral dan tambang, seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, bijih besi, pasir laut dan lainnya.
3. Potensi Energi Kelautan
   Energi termasuk potensi non hayati yang dapat diperbarui sebagai sumber energi terbarukan (non-konvensional). Potensi energi yang dapat dikembangkan antara lain konversi energi panas laut (ocean thermal energy conversion), konversi energi perbedaan salinitas, energi gelombang pasang pasang surut dan arus, serta angin.
4. Potensi Jasa Lingkungan
   Potensi jasa lingkungan pada dasarnya merupakan potensi dari adanya laut itu sendiri, contohnya adalah pariwisata dan transportasi.

D. Kelompok Sumber Daya Perikanan di Indonesia

1. Pelagis besar
   Tuna mata besar, Madidihang, Tuna strip biru selatan, Cakalang Tongkol, Setuhuk atau Marlin, Tenggiri, Layaran, Ikan Pedangm Lemadang
2. Pelagis kecil
   Alu-alu, Layang, Selar, Tetengkek, Daun Bambu, Sunglir, Julungjulung, Teri, Japuh, Tembang, Lemuru, Parang-parang, Terubuk, Kembung, Ikan Terbang, Belanak, Kacang-kacangan
3. Demersal
   Sebelah, Lidah, Nomei, Peperek, Manyung, Beloso, Swanggi, Layur, Lencam, Kakap Mrah, Kakap Putih, Pari, Sembilang, Buntal Landak, Gerot-gerot, Kerong-kerong
4. Ikan karang
   Ekor Kuning, Kerapu, Baronang, Kakak Tua, Kerondong
5. Ikan hias
   Labridae, Chaetodontidae, Ancanthuridae, Ballistidae, Kuda Laut, dan lain-lain
6. Udang dan krustasea lainnya
   Peneid, Kepiting, Rajungan, Rebon, Lobster, Udang Kipas, Kepiting Kenari, Udang Laut Dalam
7. Kekerangan (bivalva) Moluska dan Teripang
   Kerang Darah, Keran Bulu, Kerang Hijau, Kerang Mutiara, Abalone, Simping, Lola, Kupang, Oyster, Kima, Batu Laga, Tedong-tedong, Kepak-kepak. CUmi-cumi, Sotong, Gurita, Terpang, Ubur-ubur, Bulu Babi, Terung Laut, Nyale (Cacing Laut)
8. Mamalia dan reptilian
   Paus, Lumba-lumba, Duyung, Penyu Laut, Ular Laut
9. Rumput laut

Eucheuma, Gracilaria. Sargassum, Hypnea, Caulerpa

10. Benih alam komersial
    Nener, Benur, impun, barong, Kakap Putih, Kerapu dan Lain-lain.

E. Upaya Pemerintah Mengembangkan Keunggulan Ekonomi Maritim dan Kelautan

1. Perubahan Paradigma Pembangunan Nasional
2. Pembangunan Infrastruktur Maritim
3. Menegakan Aturan Kemaritiman

F. Upaya Pemanfaatan Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia

1. Meningkatkan Pariwisata
2. Memaksimalkan Pertanian laut
3. Memulai Industri Pengolahan Sumber Daya Laut
4. Pengoptimalkan Transportasi Laut
5. Sebagai Sumber Penelitian

G. Faktor Penyebab Potensi Kelautan Belum Maksimal

1. Kebijakan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tingginya pencurian ikan (illegal fishing) oleh negara lain yang menyebabkan kerugian.
3. Teknologi nelayan-nelayan Indonesia belum memadai, dan mayoritas nelayan hanya mencari ikan, padahal masih banyak kekayaan-kekayaan laut yang bisa diambil seperti karang, daun²an, mutiara.
4. eksploitasi sumber daya kelautan yang berlebihan
5. pencemaran laut

H. Langkah-langkah Strategis Untuk Memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan

1. Memanfaatkan sumber daya laut, tidak melakukan pengeboman untuk mendapatkan ikan atau terumbu karang
2. Menjaga kelestariannya dengan tidak mencemari laut, tidak membuang sampah sembarangan, mencegah terjadinya kebocoran minyak, tidak merusak terumbu karang.

I. Daerah Produksi Ikan Tangkap Terbesar di Indonesia

1. Maluku
   Kawasan Provinsi Maluku memiliki potensi sektor perikanan yang cukup baik. Sumber potensi ikan begitu melimpah, tercatat volume produksi ikan tongkol mencapai 70.135,68ton pada tahun 2021. Bahkan nilai produksinya Rp1.123.340.746.
2. Maluku Utara
   Maluku Utara merupakan daerah penghasil ikan karena memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan. Maluku Utara menjadi daerah penghasil ikan tuna terbesar dengan 54.637,77 ton per tahun, nilai produksinya juga begitu tinggi yakni Rp1.213.290.133.
3. Jawa Timur
   Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali lipat luas daratannya, dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. Kawasan ini menghasilkan ikan tongkol sebesar 50.444,65 ton per tahun dengan nilai produksi mencapai Rp724.175.301.
4. Kepulauan Riau
   Ikan kakap merupakan keluarga ikan laut dasaran yang hidup secara berkelompok di dasar-dasar karang atau

terumbu karang. Kepulauan Riau mampu menghasilkan 43.650,03 ton per tahun dan memiliki nilai produksi Rp1.221.537.606.

BAB III
SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional pemerintah di banyak Negara. Dan kerja sama antara Sektor Pemerintah dan Swasta dalam berperan sebagai pembangunan ekonomi.

Perekonomian adalah salah satu sektor yang perlu didorong untuk mencapai target-target pertumbuhan maupun pemerataan. Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat tersebut. Pembangunan ekonomi sendiri bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi mendorong pula pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sendiri adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari pelayanan fungsional hingga masalah ideologis dan spiritual, yang dengan sendirinya dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan lingkungan administrasi. pelaksanaan tata kelola yang baik selalu dilandasi

oleh tugas pokok dan tugas yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan tergantung dari pengelola itu sendiri. Dalam hal ini ada tiga fungsi penting yang harus dipenuhi yaitu: pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, sedangkan pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peran serta fungsi pemerintah dan swasta dalam Pembangunan, dan kebijakan-kebijakan dan tanggung jawab dalam hal masing-masing akan dibahas dalam penulisan ini.

A. Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah atau Sektor publik mencakup semua unit kelembagaan yang terdiri dari negara, negara bagian, dan pemerintah lokal. Beberapa lembaga independen seperti bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan juga termasuk dalam kategori ini. Abdullah (1996) menyebutkan bahwa sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti: kesehatan, pendidikan dan keamanan. Selanjutnya sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi atau pemerintah.

Sektor publik memainkan peran penting dalam semua bidang ekonomi dan kehidupan bisnis. Pemerintah dan lembaganya bertindak sebagai regulator. Mereka mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Langkah-langkah tersebut mungkin memiliki efek langsung atau tidak langsung pada sektor swasta. Sumber pendapatan Sektor pemerintah adalah Pajak. Keynesian beranggapan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang sangat kuat karena mempengaruhi permintaan

agregat, yang mana pada akhirnya berdampak pada tingkat harga, output dan lapangan kerja di dalam perekonomian. Pajak dan Pengeluaran Pemerintah adalah dua alat kebijakan Fiskal.

B. Intervensi Pemerintah Terhadap Pasar

Bahwa intervensi pemerintah memang perlu dilakukan karena kegagalan Pasar dalam perekonomian akan menjadi suatu masalah terhadap kesejahteraan masyarakat secara optimal. Secara garis besar peran pemerintah adalah mengoreksi kegagalan pasar dan mengalokasikan sumber daya dan barang. Dalam mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara peranan tersebut adalah berupa intervensi secara langsung maupun tidak langsung.

1. Intervensi Pemerintah Secara Langsung
    a. Penetapan Harga Minimum (*floor price*)
        Penetapan harga minimum atau harga pasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Contohnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau pihak ketiga yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal nah pembelian produk tersebut di luar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tiga hal itu terjadi maka tidak ada yang namanya pembeli maka pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, penetapan harga

seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang membentuk harganya di luar harga minimum.

b. Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*)
Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini dilakukan pemerintah jika pasar dianggap terlalu tinggi Di Luar Batas daya beli masyarakat. Dan penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contohnya penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi lainnya. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

2. Intervensi Pemerintah Secara Tidak Langsung
   a. Penetapan Pajak
   Kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.
   b. Pemberian Subsidi
   Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok hal ini juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan

biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

Adapun permasalahan ekonomi yang meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ini pun juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga masalah besar dalam pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut adalah yaitu kemiskinan kesenjangan dan pengangguran yang terus meningkat. Adapun permasalahan lainnya seperti inflasi yang tidak terkendali ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.

c. Masalah Kemiskinan

Yang terakhir masalah kemiskinan, kemiskinan ini merupakan suatu keadaan yang tidak mampu yang bersifat ekonomi jadi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan primer karena pendapatannya rendah. Kemiskinan Ini yang menjadikan beberapa faktor karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli selain itu karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak.

C. Sektor Swasta

Sektor swasta termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Selain pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam diseminasi hasil pembangunan. Krisis juga tidak mempengaruhi UKM. Sektor swasta (*private sector*) merujuk pada bagian dari perekonomian di luar kepemilikan atau pengendalian pemerintah. Itu mencakup sektor rumah tangga dan bisnis. Kontribusinya bervariasi antar negara, tergantung seberapa dekat mereka ke ekonomi pasar bebas atau ekonomi komando. Sektor swasta ini terlepas dari sektor publik atau pemerintah dikarenakan terdiri dari sektor bisnis dan sektor rumah tangga.

D. Intervensi Pemerintah dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pelaku pasar harus bertindak sesuai dengan etika dan syariat Islam melakukan pemenuhan kebutuhan Islam, serta memperhatikan kemanfaatan untuk banyak orang (Rahmi, 2015). Permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam, harus dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan) dan tidak ada pihak dirugikan dalam melakukan sebuah transaksi (Azizah, 2012). Islam sudah mengajarkan mengenai konsep mekanisme pasar, sebelum diperkenalkan oleh Adam Smith. Pada zaman Rasulullah saw., beliau menolak adanya *price interventation* (Merlinda et al., 2022). karena kebijakan yang dikeluarkan harus mengutamakan kemaslahatan seluruh pihak. Dalam ekonomi Islam, etika serta nilai-nilai syariah harus dijunjung dan tinggi, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi. Etika tersebut berupa perintah, larangan, anjuran, maupun himbauan untuk mencari Ridha Allah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Mekanisme pembentukan harga dalam perspektif Islam,

didasarkan pada interaksi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan kata lain, harga ditetapkan oleh mekanisme pasar (keteraturan alami), bukan oleh pemerintah ataupun golongan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul SAW pernah bersabda dalam HR. Ibnu Majah No.2191 (versi Al-Alamiyah), No. 2200 (versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh) dalam Kitab Perdagangan, Bab Membenci penetapan harga, derajat hadis Shahih.

Intervensi pasar merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Intervensi pasar atau *market intervention* terjadi ketika pemerintah belum secara efisien dan maksimal dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ekonomi Islam menekankan pada sistem pasar bebas yang terkendali. Bebas dalam hal ini berarti pemerintah menjamin kebebasan pasar untuk melakukan mekanismenya secara alami, melalui interaksi permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, harga yang adil berarti tidak merugikan pembeli maupun penjual. Dengan demikian model *ihtikar* (penimbunan) dengan mengurangi *supply* barang, untuk mendapatkan keuntungan di atas normal atau biasa dikenal dengan istilah *monopolistic rent* tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut pemahaman Islam, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi selama harga ditentukan oleh perubahan penawaran dan permintaan. Namun, kontrol harga dapat dilakukan karena sejumlah alasan. Jika alasannya terletak pada perubahan tingkat permintaan dan penawaran, maka dapat dikendalikan dengan intervensi pasar.

Dalam upaya melindungi hak pembeli dan penjual, Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi pasar. Pentingnya intervensi harga oleh pemerintah adalah untuk: (i) Melindungi penjual dan pembeli dari tingkat

keuntungan (profit) dan daya beli (Purchasing Power). Harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian; (ii) Mencegah ihtikar atau *ghaban fahisy*; dan (iii) Melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen (secara umum). Tujuannya, agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah juga wajib menjalankan perannya sebagai Wilayatul hisbah dalam penetapan harga untuk mewujudkan maslahah dalam masyarakat sebagaimana pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Di sisi lain, intervensi pasar tidak hanya diartikan menaikkan atau menetapkan harga barang. Namun, intervensi negara juga diartikan sebagai jaminan kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen. Kelancaran distribusi ini bertujuan agar arus barang tidak terganggu. Gangguan pada arus penawaran barang dapat menyebabkan kurva penawaran bergeser ke pojok kiri atas, artinya jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang sehingga menyebabkan harga barang tersebut naik. Jenis gangguan pengiriman barang ini dapat disebabkan oleh faktor alam atau niat manusia (seperti aspirasi atau najasy). Ketika terjadi kendala pasokan barang karena faktor alam, pemerintah dapat menerapkan kebijakan impor untuk menjamin ketersediaan barang, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, jika hambatan tersebut disebabkan oleh niat manusia, pemerintah dapat membuat peraturan dengan hukuman yang jelas untuk mengurangi penyalahgunaan pasar.

E. Peran Pemerintah dan Swasta dalam Perekonomian

1. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian
   Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan

masalah pembangunan ekonomi, Pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang di telah dibuat. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali. Menurut Teori Klasik Adam Smith pemerintah memilki 3 Fungsi:

a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial, 4) peran mengelola ekonomi makro. Penjelasan keempat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang

memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.

- Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer *payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai masyarakat.
- Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

Dalam dinamika pengelolaan sistem perekonomian, pemerintah mengembang fungsi pokok ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang serta menjinakkan berbagai ekses negatif siklus usaha seperti inflasi dan pengangguran.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2004), dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu:

a. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
c. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya

jika berada dalam keadaan diequlibirium.

d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

   Rasyid (2000:48) pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

2. Peran dan Fungsi Swasta dalam Perekonomian

   Swasta akan memberikan suatu dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan taraf ekonomi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Sektor swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mempengaruhi sektor swasta berbeda

dengan sektor publik, seperti tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan terakhir ada sistem akuntansi. Sedangkan sektor swasta mendapatkan modal proses kerja fungsi yang berasal dari pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham.

Di dalam pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang atau jasa. Namun, keuntungan yang diperoleh tentu bagi golongan atau individu yang terlibat. Meskipun demikian, pihak swasta dalam perekonomian negara tetap penting karena dalam prosesnya, pihak swasta membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreativitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara. Namun, perekonomian tetap tidak dapat sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta dan perlu adanya pihak pemerintah sebagai pemegang kendali utama.

J. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wilayah atau Daerah

Peranan pemerintah daerah sebagai *entrepreneur* yaitu, pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya *entrepreneur* melalui kebijakan kecil atau industri kecil. Kebijakan bagi usaha kecil yaitu melalui pemberian bantuan dan pelatihan kepada usaha perorangan untuk meningkatkan usahanya. jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit dan subsidi kepada pengusaha di daerah.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran pemerintah daerah menjadi lebih

besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk di dalam-nya dalam hal pembangunan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah memberikan kewenangan, keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya, namun sejak diberlakukan otonomi daerah sampai sekarang, masih banyak daerah-daerah yang pembangunan ekonominya tidak meningkat padahal kalau dilihat potensi daerahnya memungkinkan daerah tersebut ekonominya meningkat.

K. Peran Swasta dalam pembangunan

Salah satu peran sektor swasta dalam pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur, dengan meningkatnya infrastruktur maka akan meningkatkan atau membantu pelayanan terhadap masyarakat.

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah swasta.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan proyek.
3. Memberikan kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan.
4. Memberikan insentif fiskal.
5. Meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta.

Perlu adanya investasi oleh pihak swasta agar lebih mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah dana Swasta maka dikembangkan KPS (Kerja sama Pemerintah dan Swasta).

L. Kerja sama Pemerintah dan Swasta

Skema kerja sama pemerintah dan swasta merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak diandalkan baik

negara maju atau negara berkembang negara-negara maju yang berada di Eropa telah banyak menggunakan skema ini untuk mengisi kesenjangan penyediaan infrastruktur yang menyebar secara merata di berbagai kota besar pada awal 1980-an. Pada saat itu, pihak swasta lebih memegang peranan penting dalam pembiayaan, mendesain, membangun bahkan mengoperasikan fasilitas-fasilitas publik.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 67/2005 perihal kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Rencana ke depan konsep KPS menjadi salah satu potensi skema pendanaan yang harus dioptimalkan, terutama potensinya dalam pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.

Perbankan menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai kegiatan KPS selain juga *self-financing* yang hanya sekitar 30% dari pembiayaan proyek yang berjalan sementara itu, sumber dari dana lembaga non perbankan masih belum banyak yang dimanfaatkan dalam mendanai kegiatan KPS meskipun selama ini pihak swasta lebih banyak mengandalkan pendanaan dari sektor perbankan dibandingkan sumber lainnya masih banyak potensi sumber dana dari perbankan yang belum tergali. Hal ini disebabkan oleh adanya ketiadaanya sumber dana yang tersedia di perbankan dengan kegiatan KPS.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memobilisasi dana perbankan yang ada. Alternatif pembiayaan lain adalah dari pasar modal, *Multi Finance*, asuransi dan dana pensiun. Tantangan besar masih sering dihadapi dari lembaga dan perbankan tersebut termasuk di dalamnya aspek regulasi dan kebijakan.

M. Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD. Keynes menekankan pada penggunaan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Menurut Keynes, dengan cara pembiayaan apa pun, pengaruh kebijakan fiskal ekspansif akan tetap positif. Dalam perkembangannya, teori klasik dan teori Keynesian digabungkan menjadi teori baru yang disebut teori sintesis klasik-Keynesian yang tercermin dalam model IS-LM. Teori ini merupakan perwujudan dari konsep bauran kebijakan yang umum digunakan dalam perekonomian suatu negara.

Turnovsky (2000) dikutip dari penelitian (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD, memfokuskan studi tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan output di Amerika Serikat. Penelitian menemukan bahwa kebijakan fiskal tidak berdampak pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan yang lambat mencerminkan fakta bahwa kebijakan fiskal hanya berdampak jangka pendek selama periode transisi. Selanjutnya, studi setara Ricardian melihat bahwa kebijakan fiskal dengan meningkatkan defisit anggaran dengan utang/obligasi tidak akan mempengaruhi perekonomian (Manurung, 2002) yang dikutip dari (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility

to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD. Analisis ini didasarkan pada pola konsumsi dan kemampuan masyarakat dalam melihat pengaruh defisit anggaran di tahun yang akan mendatang.

Menurut Sadono Sukirno (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk melakukan perubahan di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.

Terdapat Tujuan di Kebijakan Fiskal, dimana Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jumlah total belanja publik, pertumbuhan ekonomi dan jumlah total produksi publik, jumlah kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, dan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan suku bunga dan pasokan uang. Menurut pendapat John F. Due, kebijakan fiskal sebenarnya ditujukan untuk (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD:

a. Memastikan pertumbuhan ekonomi riil dan tingkat pertumbuhan potensial dengan tetap mempertahankan lapangan kerja penuh.
b. Mencapai tingkat harga umum yang stabil dan wajar.
c. Sebisa mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan masyarakat lainnya.

Sedangkan tujuan kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD mengategorikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam:

a. prinsip tauhid,
b. gosok-biyyah,
c. khilafah, dan
d. tazkiyah.

Mahmud Muhammad Bablily (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu:

a. al-ukhuwwa (persaudaraan),
b. al-ihsan (berbuat baik),
c. alnasihah (memberi nasihat),
d. al-istiqamah (sikap teguh), dan
e. altaqwa (bertakwa).

M. Raihan Sharif (Soryan, 2016)the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat prinsip struktural, yaitu:

a. perwalian manusia;
b. kerja sama (kerja sama);
c. kepemilikan pribadi terbatas (kepemilikan pribadi terbatas); Dan
d. perusahaan negara (perusahaan negara).

Pemerintah memiliki segudang kewajiban yang harus

dipikul guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian antara lain mengawasi faktor-faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi produksi dan praktik jual beli, melarang praktik yang tidak benar atau terlarang, dan menetapkan harga bila perlu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan-tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.

Implementasi kebijakan fiskal di Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan dengan instrumen kebijakan fiskal syariah. Hal ini terlihat pada beberapa instrumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, penerimaan hibah. Anggaran negara yang direncanakan terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (Soryan, 2016) the state has an obligation and responsibility to realize public welfare as stated in the fourth paragraph of Undang-Undang Dasar (UUD.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih berlangsung, di samping harus menata

sektor riil, yang tidak kalah penting yaitu meluruskan kembali jumlah kekeliruan akan pandangan di seputar uang. Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sesungguhnya dipicu oleh 2 sebab utama dan semuanya terkait dengan masalah uang (Latifah, 2015).

a. Persoalan mata uang, yang dimana mata uang negara pasti terikat dengan mata uang negara lain, sehingga nilainya tidak stabil karena jika mata uang bergejolak akan mempengaruhi kestabilan mata uang itu.
b. Kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dan ditarik keuntungan alias bunga atau riba dari setiap transaksi (Karim, 2001).

Pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat diatur dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Kebijakan moneter ekspansif. Merupakan kebijakan dalam rangka meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (*public demand*) ketika perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).
b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy). Merupakan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (Rahardja, 2005)dikutip dalam penelitian (Latifah, 2015).

Tujuan dari Kebijakan Moneter sendiri adalah untuk menjaga kestabilan Nilai rupiah yang mana dipegang

oleh Bank Indonesia sebagai sektor Pemerintah Tujuan ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah meliputi stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Peran stabilitas nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia berwenang melakukan kebijakan moneter dengan menetapkan sasaran moneter (seperti jumlah uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama untuk menjaga sasaran tingkat inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan penetapan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan Perdagangan yang dianut suatu negara dapat berdampak besar terhadap pola dan langkah pembangunan industri. Berbagai peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara berkembang sangat berbeda-beda bahkan beberapa negara berkembang mengubah-ubah kebijakan perdagangannya. Perbedaan kebijakan perdagangan ini selanjutnya dapat berkaitan dengan hasil yang dicapai dari perdagangan dan industri yang sangat berbeda-beda.

Kebijakan Perdagangan hendaknya dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan industrialisasi dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Kebijakan perdagangan dapat didefinisikan

sebagai kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan (T. Suharto, 2002):

a. Memungkinkan negara berkembang memperoleh bagian besar dari manfaat perdagangan.
b. Meningkatkan laju pembentukan modal.
c. Meningkatkan Industrialisasi
d. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Berbicara mengenai kebijakan perdagangan maka tidak jauh dengan kebijakan ekspor dan impor di suatu negara.

a. Kebijakan Ekspor

Pada masa terdahulu, sekitar tahun 1950-an dan pertengahan tahun 1960-an, titik berat kebijakan perdagangan luar negeri adalah dengan membatasi impor, pengaturan impor, dan pengontrolan valuta asing, di samping terus berusaha keras untuk melakukan kegiatan ekspor. Yang mana saat ini setiap negara mengetahui bahwa hal ini merupakan tindakan yang sulit untuk dilakukan (T. Suharto, 2002).

- Kesulitan di bidang Ekspor:
    a. Kesulitan yang berkaitan dengan bahan mentah lokal baik berupa harga tinggi, kualitas rendah dan jumlah terbatas.
    b. Jumlah kapal yang minim jadi memperhitungkan harga ekspor atas dasar F.O.B
    c. Tingkat ongkos angkut yang relatif tinggi
    d. Persaingan yang ketat antar negara
    e. Diskriminasi oleh negara tertentu
    f. Kesulitan mencari pasar
    g. Fasilitas pelabuhan
    h. Proses sulit akibat prosedur yang berbelit belit
    i. Kesulitan mencari pengakuan ISO

- Alat Pelaksanaan Kebijakan Ekspor
  a. Subsidi
  b. *Exchange Control* (Kontrol Valuta Asing)
  c. International *Commodity Agreement*
  d. Dumping

b. Kebijakan Impor

Pada Garis besarnya, Kebijakan impor hanya menyangkut masalah tarif, kuota, non tarif dan sebagaimana di bidang ekspor juga kebijakan valuta asing, baik melalui Exchange Control maupun berbagai kebijakan kurs valuta asing (T. Suharto, 2002).

- Tarif Perdagangan. Tarif perdagangan adalah daftar jenis barang yang dikenai pajak, baik impor maupun ekspor. Di suatu negara ingin menggunakan tarif sebagai instrumen kebijakan perdagangan akan menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan. Biasanya ada 3 kemungkinan:
  1. *Advalorem*
  2. *Specific duties*
  3. *Compound duty atay Specific advalorem*
- Kuota Impor. Yaitu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk ke dalam negeri.
- Non-Tarif. Kebijakan yang dilakukan oleh negara guna melindungi industri domestik dengan memberikan hambatan kepada barang luar negeri yang berbentuk tarif.

4. Kebijakan Pemerintah Dalam Ideologi dan Kesejahteraan

a. Ideologi

Ideologi negara sebagai seperangkat gagasan atau konsep pemikiran negara adalah sebagai seperangkat nilai yang

diharapkan dapat diaktualisasikan dengan baik oleh negara yang diwakili oleh pemerintah dan juga oleh warga negara. Ideologi pada dasarnya merupakan nilai yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku sebagai identitas negara dan seluruh warga negara. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu negara. (Silitonga, 2020)

Negara tidak boleh menyerah pada tantangan yang terjadi pada rakyatnya. Keberadaan negara, sebagaimana disebutkan oleh Soltau, adalah agen atau otoritas yang mengatur atau mengontrol masalah umum atas nama masyarakat. Dalam hal ini terlihat pentingnya negara hadir untuk kepentingan masyarakat (Silitonga, 2020).

Dengan kewenangannya, peran negara mengemuka dalam mendorong aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. Nilai bersama bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam lima sila Pancasila, mulai dari Sila I hingga Sila V. Nilai-nilai tersebut tentu sudah tidak asing lagi dan dipahami secara umum.

Langkah prosedural di bidang kebijakan, pemerintah melakukan revitalisasi Pancasila antara lain dengan melaksanakan penempatan Pancasila sebagai sumber nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh negara mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Secara formal, hal tersebut menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dan nilai-nilai bersama. Seperti diketahui, di awal-awal reformasi, pembahasan Pancasila mengalami penurunan.

Dalam perjalanan era reformasi, muncul peraturan daerah yang diskriminatif, kedaerahan, dan tidak sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal itu negara melalui atribut pemerintah yaitu Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan atau mencabut peraturan yang bermasalah tersebut. Pemerintah juga meresmikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diharapkan dapat berperan dalam memajukan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Kemudian secara khusus sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga dipandang penting diberikan kepada siswa karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa. Kekhususan ini bahkan lebih untuk siswa di tingkat sarjana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan selain itu kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pelajaran pengembangan kepribadian Indonesia, seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Efektivitas pembelajaran pembentukan kepribadian Indonesia masih perlu dikaji, namun setidaknya kebijakan tersebut akan menjadi landasan untuk menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila.

Respons pemerintah terhadap nilai-nilai bersama juga didukung dengan penegakan nilai-nilai instrumental ideologis melalui penegakan hukum. Informasi tentang penegakan hukum dapat diamati secara luas baik dari media cetak maupun elektronik. Implikasi dari peran pemerintah dalam aktualisasi nilai-nilai bersama, dari persepsi masyarakat diperoleh respons yang sangat positif atas berbagai kebijakan dan peran yang telah dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat melihat negara sebagai hadir dalam melindungi nilai-nilai bersama. Hal ini menunjukkan semakin menguatnya peran pemerintah meskipun secara prosedural hal tersebut sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah (Silitonga, 2020).

Implikasi terpenting dari peran pemerintah dalam menjaga nilai-nilai bersama tersebut adalah menurunnya eskalasi dan aktivitas yang mengarah pada perilaku yang menonjolkan sentimen primordial. Setidaknya masyarakat pada umumnya yakin bahwa pemerintahan yang ada saat ini cukup konsisten dan tegas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai bersama. Publik juga dapat melihat bahwa kebijakan dan ketegasan pemerintah tidak dilakukan atas dasar sentimen primordial, melainkan atas dasar kepentingan bersama sebagai sebuah negara bangsa.

Jika dilihat lebih jauh, implikasi peran pemerintah tidak secara langsung mempercepat aktualisasi nilai-nilai ideologi secara lebih signifikan. Implikasinya hanya sebagian, terutama dalam mereduksi aktualisasi cara berpikir, sikap, dan perilaku radikal atau nilai-nilai yang menunjukkan sentimen primordial (Silitonga, 2020).

b. Kesejahteraan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Proses pembangunan yang terus berlanjut dan dikembangkan dari waktu ke waktu selalu berupaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut bahkan dijamin oleh undang-undang.

Tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia dilaksanakan dengan melaksanakan proses pembangunan. Secara umum kita dapat mengartikan pembangunan sebagai suatu proses sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh para birokrat untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 lebih jelas disebutkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi (Astuti, 2021):

1) Meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2) Mengembalikan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian;
3) Meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial;
4) Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana pemenuhan kesejahteraan sosial bagi masyarakat juga dituangkan dalam rencana strategis tertentu yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pernyataan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yang meliputi (Astuti, 2021):

1) Peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan;
2) Akses dan kualitas pelayanan sosial dasar;
3) Cakupan pelayanan kesejahteraan sosial yang menyeluruh melalui Kartu Combo Bansos dan kualitas pengelolaan program;
4) Pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; dan
5) Meningkatkan partisipasi potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jika melihat catatan capaian pembangunan dari ketiga aspek, memang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia. Meski masih ada beberapa catatan seperti keberadaan orang miskin di Indonesia. Tidak ada satu pun strategi pembangunan yang sempurna dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Itu sebabnya strategi pembangunan di mana-mana selalu bergeser. Bahkan strategi pembangunan yang diterapkan oleh Indonesia tidak terlepas dari pergeseran strategi pembangunan di tingkat global.

Paradigma pembangunan di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh pergeseran paradigma global. Namun secara khusus, pergeseran paradigma yang paling dominan dalam pembangunan di Indonesia adalah kebijakan desentralisasi. Yakni perubahan dari paradigma top down menjadi paradigma bootm up. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan merupakan bentuk nyata pergeseran pembangunan dari top-down menjadi bottom-up. Perubahan nilai pembangunan meliputi (Astuti, 2021):

a. Sentralisasi ke desentralisasi: otoritas masyarakat untuk melakukan kontrol atas pengambilan keputusan dan sumber daya.
b. Top-down menjadi bottom-up: alur program, identifikasi masalah dan identifikasi kebutuhan dari bawah. (kelas sore)
c. Penyeragaman menjadi variasi lokal: penyeragaman cenderung tidak efektif karena program tidak dapat mengantisipasi dan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang beragam (kelas pagi).
d. Sistem komando menjadi proses pembelajaran: pemberian kewenangan dan pengakuan kemampuan masyarakat

untuk melakukan pembangunan.

e. Ketergantungan menjadi kontinuitas: sistem komando membuat masyarakat menunggu program dari atas, sehingga tidak mengandung unsur kreativitas, sehingga dalam jangka panjang tidak melahirkan inisiatif lokal. Justru akan memunculkan inisiatif dan kreativitas masyarakat.
f. Eksklusif sosial menjadi inklusi sosial: pembangunan dengan standar yang seragam telah menyebabkan marginalisasi (lokal dan nasional) yang mengakibatkan eksklusif sosial. Dengan cara baru akan mengarah pada inklusi sosial.
g. Perbaikan ke arah transformasi: mengenai tingkat pemecahan masalah, mikro, menengah atau makro, pendekatan transformasi ini lebih menitikberatkan pada perubahan pada tingkat sistem dan struktur sosial. Fokusnya hanya pada cara kerja dan proses produksi.
h. Pemberdayaan masyarakat: unsur utama pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Merujuk pada perubahan nilai pembangunan yang bersifat bottom up seperti ini, posisi pemerintah adalah sebagai fasilitator.

Kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan *bottom-up* belum efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apalagi menciptakan kemandirian masyarakat untuk mampu menyelesaikan sendiri masalah kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah tidak hanya terpaku pada kebijakan yang hanya memfasilitasi pembangunan, tetapi juga melakukan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat, sehingga mampu mengelola pembangunan dan mencapai kesejahteraan secara mandiri.

Sehingga diberlakukannya kebijakan desentralisasi dalam pembangunan seharusnya menjadi jalan bagi pemerintah tidak hanya untuk memberikan berbagai fasilitas material tetapi juga untuk menggiring masyarakat menuju kemandirian. Kebijakan desentralisasi ini hendaknya tidak hanya bersifat desentralisasi dalam hal pembiayaan tetapi juga memberikan peluang inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam memperdaya dan mengidentifikasi potensi diri termasuk nilai-nilai positif yang mempercepat proses pembangunan.

Proses pemberdayaan adalah proses pemberian atau pengalihan kekuasaan atau wewenang. Ada dua unsur utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, kedua unsur tersebut adalah transfer *of authority* dan *capacity building*. Artinya pemberdayaan adalah proses pengalihan atau pemberian kewenangan dan proses pengalihan atau pemberian kapasitas. Teori ini sangat tepat untuk melihat kasus pergeseran paradigma dari pembangunan *top-down* menjadi paradigma *bottom-up*, namun tanpa pemberdayaan tidak akan memberikan hasil yang maksimal (Astuti, 2021).

BAB IV
INSTRUMEN DANA PEMBANGUNAN ISLAM

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses meningkatkan pendapatan total dan per kapita dengan memperhitungkan angka pertumbuhan penduduk. Hal tersebut juga disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara yang disertai pemerataan pendapatan penduduknya. Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pembangunan ekonomi yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin

tinggi. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga meliputi segi spiritual dan moral. Oleh sebab itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.

Untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah memiliki tugas untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/primer (ḍarūri), sekunder (haĵi), maupun tersier (taḥsĭnĭ). Sebagaimana Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam tulisannya, mengemukakan bahwa kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

Pemahaman mengenai pembangunan ekonomi didapat dari beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu firman Allah SWT. pada Q.S. Hud ayat 61.

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗهُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗاِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

Artinya: *"Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shalih. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)." Q.S. Hud ayat 61.*

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syarĭah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa falâh meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.

A. Dasar Hukum Instrumen Dana Pembangunan Islam

Instrumen dana pembangunan ke Islam-an dimaknai oleh Abu Zahrah (1974) sebagai jaminan sosial Islam (*takaful ijtima'i*), yang secara harfiah berarti setiap individu dengan kapasitasnya di dalam masyarakat untuk saling melindungi satu sama lain, mewujudkan kemanfaatan (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah) agar tercipta masyarakat yang lebih baik. Dalam sejarahnya, instrumen ini diterapkan sejak zaman Rasulullah sebagai bagian dari upaya pengendalian harta yang disimpan oleh manusia. Dana sosial ke Islam-an terdiri dari empat instrumen, diantara-Nya: dana zakat, infak sedekah, wakaf tunai, dan dana haji (Bappenas, 2016).

Infak dan Sedekah memiliki keserupaan efek pengganda dengan zakat. Infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan akan memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi melalu perputaran aliran uang/modal. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik akan mengurangi penumpukan harta pada segelintir orang sehingga meningkatkan transaksi dan jumlah uang beredar (Bank Indonesia, 2016).

Dari sisi penyaluran, dana infak dan sedekah yang disetorkan dan disalurkan melalui lembaga-lembaga pengelola

infak dan sedekah akan menjadi instrumen redistribusi pendapatan. Di mana dana tersebut berpindah dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta ke orang-orang yang membutuhkan harta (uang). Selanjutnya dari sisi penerimaan, dana infak dan sedekah yang diterima oleh orang-orang yang membutuhkan harta (uang) akan dijadikan media pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi) sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi agregat. Selain itu, dana infak dan sedekah yang diterima oleh orang-orang yang membutuhkan harta (uang) juga bisa dijadikan media peningkatan produktivitas (investasi) sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat.

Dasar hukum wakaf dari Al-Quran menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." Adapun dasar hukum wakaf dari hadis:*

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (HR Muslim, hadis no. 1631)*

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi instrumen distribusi seperti zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah dalam ekonomi Islam, akan

mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat. Bila jaminan sosial Islam dapat diterapkan secara utuh akan tercipta umat yang berkualitas, dihasilkan dari lembaga pendidikan, pelatihan, rumah sakit dan lainnya, yang merupakan hasil dari pemberdayaan instrumen distribusi dalam ekonomi Islam.

Lebih dari itu, jika seluruh instrumen tersebut dapat berjalan dan dikembangkan, akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu, dengan terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pembangunan ekonomi Indonesia.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Makna zakat secara bahasa berarti tumbuh (al-numuw) dan bertambah (al-ziyadah). Secara etimologi adalah suci, dalam artian suci dari dosa dan kemaksiatan. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Istilah lain secara syara zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. (Sulaeman Jajuli).

Zakat adalah ibadah wajib, yang termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Zakat memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari segi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat manusia. Di dalam Al-Qur'an sangat banyak yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Zakat merupakan pilar utama dalam sistem dan instrumen orisinal dari sistem ekonomi Islam. Hakikat dan fungsi zakat bertugas mendistribusikan kekayaan pada golongan masyarakat yang

membutuhkan. Dengan keyakinan bahwa pada tiap harta yang didapatkan oleh seseorang terdapat di dalamnya hak para fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan (8 asnaf).

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At Taubah: 60) (Hindarjo, 2018).*

Zakat pertama kali diwajibkan tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun kewajiban membayar zakat dengan kadar dan nisab itu ditentukan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin al-Khatthab pendapatan zakat sebagai pendapatan negara sangat melimpah. Umar dengan kebijakannya telah menjadikan harta zakat sebagai pendapatan utama. Setelah khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, pendapatan negara dari zakat bertambah secara signifikan. Umar yang diangkat menjadi Amirul Mukminin telah mengeluarkan fatwa sebagai kebijakannya mengenai zakat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar terhadap harta zakat adalah:

a. Zakat barang-barang perniagaan
b. Zakat mata uang emas dan perak
c. Zakat binatang ternak

d. Zakat sayur-sayuran dan buah-buahan
e. zakat madu yang dijual bukan untuk dikonsumsi.
f. zakat kuda yang diperjual belikan.

2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah

Pengelolaan zakat pada masa Rasullah membuktikan bahwa zakat dapat mempengaruhi perekonomian secara mikro dan makro. Seperti yang diungkap dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepada Umar, namun Umar menolak dan berkata: *"berikanlah sedekah ini kepada yang lebih membutuhkan dariku."* Kemudian Rasulullah menjawab: *"ambillah, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu."* Hadist ini menerangkan bahwa zakat dapat disalurkan secara produktif kepada fakir dan miskin sebagai modal usahanya dan pendampingan usaha agar taraf hidupnya sejahtera, setidaknya dapat merubah penerima zakat (mustahiq) untuk menjadi muzakki. Pada masa Rasulullah, barang-barang yang dikenakan zakat adalah meliputi:

a. Barang terbuat dari emas dan perak,
b. Binatang ternak seperti; unta, sapi, domba, dan kambing,
c. Barang dagangan,
d. Hasil pertanian,
e. Harta benda yang ditinggalkan musuh, dan
f. Barang temuan.

Kemudian, Rasulullah memberikan contoh dalam mengelola manajemen zakat dengan membentuk struktur petugas (Amil)

zakat, yang terdiri dari: petugas pencatat jumlah para muzaki, petugas yang menghitung atau menaksir jumlah zakat, petugas yang mengambil zakat, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan petugas yang menyalurkan zakat.34 Setelah zakat itu dipungut, maka dikumpulkan di Baitul mal, yaitu lembaga bendahara negara yang dibentuk Rasulullah SAW sebagai tempat pengumpulan harta milik negara yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang masuk ke dalam 8 kelompok penerima zakat (Nugroho, 2019).

Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif, pada hakikatnya memiliki dua alasan utama, yaitu alasan ibadah dan alasan ekonomi. Alasan ibadah mengungkapkan bahwa eksistensi zakat merupakan salah satu variabel atau ukuran bagi kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Artinya zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang berada pada posisi yang baik dilihat dari kepemilikan harta. Sementara alasan ekonomi adalah alasan yang mengungkapkan bahwa zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi. Dengan adanya zakat ekonomi akan terus dijaga agar ada pada posisi aman untuk terus berlangsung, sekaligus menjaga stabilitas sosial pergaulan diantara manusia, antara para pelaku pasar atau antara si kaya dan si miskin (Hindarjo, 2018).

Instrumen fiskal berupa zakat dapat digunakan sebagai perisai bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar melalui baitul mal menggunakan akumulasi dana zakat. Bahkan Metwally mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi, karena

instrumen zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta). Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro (Hindarjo, 2018).

Perkembangan Zakat di Indonesia, dimulai secara konstisonal dengan memiliki Undang-Undang tentang zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999, karena beriringan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka diganti dengan UU No. 23 tahun 2011. Dalam UU No.38 tahun 1999 terlihat bahwa dalam undang-undang tersebut tidak wajib bagi para muzakki. Bahkan terkesan undang-undang tersebut adalah sekedar undang-undang pengaturan lembaga-lembaga amil zakat saja, bukan undang-undang zakat secara umum.

Dari perbandingan bahasan tentang Pengelolaan Zakat dalam UU No.38 tahun 1999, ada beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan, di antaranya:

a. Sistem zakat yang masih sukarela (*voluntary zakat system*), terlihat jelas pada pasal 12 ayat 1 UU No. 38 tahun 1999. Sehingga wajar ketika fokus sanksi dari UU ini ada pada badan amil zakat (bab VII Pasal 21). Sebaiknya sistem zakat diusahakan untuk berada pada posisi wajib (*obligatory zakat system*), sehingga zakat akan berfungsi dengan maksimal menjalankan perannya sebagai instrumen ekonomi.
b. Sistem zakat yang mekanismenya masih di bawah Departemen Agama. Seperti yang telah disebutkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi, maka efektivitasnya akan lebih terasa ketika ia benar-benar menjadi alat kebijakan ekonomi. Dengan demikian sebaiknya mekanisme zakat ini berada di bawah otoritas ekonomi. Tapi kondisi poin kedua ini menuntut terpenuhinya kondisi pada poin pertama terlebih dahulu.

3. Prinsip Dasar Zakat dalam Konteks Pembangunan

Zakat mempunyai prinsip-prinsip yang sangat jelas, bila prinsip-prinsip ini dijalankan oleh muzaki maupun mustahik, maka zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi sebuah instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Prinsip-prinsip ini harus dapat diaplikasikan dengan menyeluruh baik oleh muzaki maupun mustahik karena masing-masing prinsip mempunyai hubungan antara satu dan yang lain, artinya jika salah satu prinsip tidak dijalankan dengan baik maka zakat yang diharap- kan menjadi instrumen keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi sulit untuk dicapai sebagaimana yang diungkapkan Mannan (1995). Menurut Mannan (1997):

a. Prinsip keyakinan, zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan penuh keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah kepada hambanya dengan balasan kebaikan di sisinya, tanpa keyakinan dan keimanan yang kuat seseorang tidak akan bisa membayar ataupun mendistribusikannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
b. Prinsip keadilan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan di sini pemerataan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.
c. Prinsip produktivitas atau sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
d. Prinsip kemudahan, menurut Mannan (1997) kemudahan zakat baik dalam pembayaran maupun penyaluran harus mudah untuk diakses dan seterusnya.
e. Prinsip kebebasan, menurut Mannan (1997) seseorang harus menjadi orang yang bebas atau merdeka sebelum

ia dikategori- kan sebagai orang yang harus membayar zakat, karena itu seorang budak maupun tawanan tidak diwajibkan membayar zakat dan selainnya.

4. Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Penimbunan Harta

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang setiap waktu senantiasa dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, baik negara yang tergolong kaya ataupun sebaliknya termasuk Indonesia. Banyak konsep akademik, kebijakan, ataupun hasil analisis para pakar politik yang telah diutarakan maupun diterapkan demi mengentaskan kemiskinan, baik dalam cakupan suatu negara, regional, maupun dalam konteks global. Namun sampai saat ini hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya kemiskinan terus menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh bangsa di dunia ini termasuk Indonesia.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dimungkiri keberadaannya. Zakat menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat andal pada masa keberhasilan Islam. Sejarah mencatat bahwa ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada masa itu sangat sulit sekali mencari mustahik atau penerima zakat, pada masa tersebut masyarakat yang semula menjadi mustahik namun setelah adanya pemberdayaan zakat yang merata dan adil pada tahun berikutnya status mereka berubah menjadi muzaki atau pembayar zakat.

Zakat dalam padangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentas- kan kemiskinan, masih banyak cara lain yang bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan. menutupi kebutuhan

seorang fakir dan keluarganya hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain seperti infak, sedekah dan wakaf. Hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata.

Zakat bisa mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan lainnya seperti dapat membantu negara Muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Is- lam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, seperti masalah sosial, politik, dan hukum. Jadi, zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir miskin selama satu tahun, dan menurut Imam Syafi'i untuk seumur hidup. Di Indonesia salah satu gerakan sosial yang melakukan peranan penting dalam pengembangan potensi masyarakat baik dalam penerimaan, penyaluran, dan pemberdayaan zakat adalah Rumah Zakat, BAZNAS, BAZ, dan sebagainya.

5. Konsep Adil dalam Pendistribusian Zakat

a. Diungkapkan oleh Malik dan Ibnu Shihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding golongan yang lainnya, bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama Syafi'iyah.
b. Apabila zakat yang dihasilkan dalam jumlah banyak, maka setiap golongan dari delapan asnaf harus mendapatkan bagiannya masing-masing, tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya.
c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat

kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila ada satu golongan yang sangat memerlukan pananganan secara khusus.

d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain meru- pakan maksud dari tujuan diwajibkannya zakat.
e. Pendapat Imam Syafi'i menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.

C. Wakaf

1. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak ada ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk sedekah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini pada umumnya didasarkan pada ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tentang sedekah secara umum. Diantara ayat tersebut adalah ayat 267 surat al-Baqarah yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain.

Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara.

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya. Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi (Fuadi, 2018). Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2008):

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
b. Undang-Undang Pokok Agraria.
c. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 91 dan pasal 49.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

e. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Pola Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurusi dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang independen dan profesional guna menjalankan amanah sebagai regulator dan operator (nazir).

Dalam mengelola wakaf diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

a. Wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya.
b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Tantangan dalam pengelolaan wakaf yaitu, tanah wakaf tidak produktif, pola pikir masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas, program wakaf yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat masih menjadi prioritas. Selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas memerlukan dukungan sumber daya yang handal dan profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan baik.

4. Jenis-jenis Wakaf

a. **Wakaf Ahli**

Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa factor seperti tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum.

Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang

nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-Undang dituliskan bahwa Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

b. **Wakaf Khairi**

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima wakaf.

c. **Wakaf Musytarak**

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf musytarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura.

5. Keberhasilan Wakaf di negara lain

a. Di Malaysia wakaf berkembang sejak tahun 2008, yaitu sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 tingkat yang dibangun di atas tanah seluas 52.838 m2. Bangunan ini dikenal dengan Menara Imara Wakaf yang menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Peruntukan bangunan

tersebut untuk disewakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Keuntungan dari sewa diperuntukkan kepada mustahik wakaf. Dan juga hotel-hotel di beberapa lokasi yang merupakan aset wakaf (Aula 2012).

b. Keberhasilan wakaf juga telah dirasakan oleh Turki, yaitu wakaf uang di Bursa sebuah kota di daerah Orhan Gazi. Pengembangan wakaf uang pada saat itu dikelola dengan cara bunga; yaitu dengan dipinjamkan kepada yang membutuhkan dan ditetapkan bunga ketika pengembaliannya.
c. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizārah al-Awqāf (Kementerian Wakaf). Salah satu keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah kontribusi harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
d. Di Cairo juga memiliki aset wakaf produktif, diantaranya adalah beberapa rumah sakit, pengelolaan wakaf Salah Kamil, pengelolaan al-Azhar Conference Center (AAC), pengelolaan gedung al-Azhar, dan juga pengelolaan hadiqah al-Azhar (Taman al-Azhar). Hasil dari pengelolaan wakaf al-Azhar dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa berupa fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, juga diberikan dalam kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis.
e. Selain negara yang mayoritas Muslim, Singapura yang dikatakan negara sekuler pun menerapkan wakaf, bahkan dapat dikatakan sukses. The Strait Times dan The Business Time menyatakan bahwa praktik wakaf berasal dari Timur Tengah. Dan dibawa ke Singapura oleh pedagang Arab hampir 200 tahun yang lalu. Pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf yang telah dilakukan oleh

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) bersama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) dimana pengelolaan wakaf di Singapura cenderung dilakukan secara produktif. Total keseluruhan asset wakaf di Singapura berjumlah S$ 250 juta. Wakaf di singapura beragam, baik masjid maupun hotel berbintang. Keberhasilan manajemen wakaf di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan di Singapura sendiri, bahkan manfaatnya dapat dirasakan oleh negara lain seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia.

6. Wakaf dalam pengembangan ekonomi umat

Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, Islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggungjawab social untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah (masjid dan musola), lembaga pendidikan, pusat

kesehatan dan keperluan sosial lain. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya Islami dalam masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya Islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Lembaga wakaf dapat membantu Negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wakaf dan bantuannya pada Negara
   Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam Islam. Pembangunan dalam Islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai keridhaan Allah. Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.
b. Wakaf dan peningkatan permintaan
   Teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat.
c. Wakaf dan penyediaan peluang kerja
   Harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar.

D. Ghanimah

1. Hukum Ghanimah

Hukum harta ghanîmah adalah harta yang halal untuk dimakan dan halal juga untuk dikonsumsi. Harta tersebut selain halal juga baik. Artinya harta ghanîmah baik dalam bentuk fisiknya juga halal dalam pemakaiannya. Setelah menjelaskan kehalalan harta ghanîmah, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka yang mengkonsumsi harta tersebut agar bertaqwa kepada Allah. Sebab boleh jadi ketika seseorang memiliki harta yang banyak dan melimpah mereka enggan kembali berjihad dan merasa khawatir kalau harta tersebut habis digunakan untuk berjihad, yang biasa terjadi pada diri manusia adalah mereka takut hidupnya jatuh miskin atau takut mati ketika harta terus bertambah banyak. Allah mengatakan dalam al-Qur'an surat al-Anfâl ayat 69:

وَّاتَّقُوا اللّٰ

Artinya: *"Bertaqwalah kamu kepada Allah", karena taqwalah obatnya penyakit hati dan taqwa sebagai obat bagi mereka yang takut akan mati.*

2. Pengertian Ghanimah

Harta ghanîmah secara etimologi berari rampasan perang16 atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal). Ghanimah merupakan pendapatan Negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al Qur'an. Distribusi ghanimah empat perlimanya diberikan pada para prajurit yang bertempur, sementara seperlimanya adalah khums (lihat penjelasan tentang khums).

Hasanuzzaman mendefinisikan ghanimah sebagai segala barang bergerak yang direbut oleh tentara muslim dalam sebuah pertempuran. Dalam ghanimah ada beberapa jenis pembagian yang harus menjadi perhatian. Nafal, yaitu penghargaan yang diberikan pada seorang prajurit berupa pembagian harta ghanimah, yang jumlahnya lebih dari rata-rata, dari pemimpinnya, baik pemimpin negara maupun pemimpin lapangan. Pembagan nafal dapat dilakukan meskipun tidak ada janji oleh negara pada awalnya. Salab barang pribadi yang direbut oleh prajurit dari musuh yang dibunuhnya. Dan Safi' adalah barang pilihan pemimpin yang diambil dari ghanimah untuk dirinya sendiri.

Harta ghanîmah itu ada dalam Islam dan harta tersebut sah untuk dipakai setelah ada pembagian untuk Allah dan Rasul-Nya yaitu 1/5 bagian. Pembagian harta ghanîmah menurut Amirul Mukminin Umar Ibn al-Khaththab adalah hanya diperuntukan bagi mereka yang ikut berperang, maka untuk yang menggunakan kuda diberikan 3 bagian dan yang berjalan kaki hanya satu bagian.

E. Jizyah

Kata Jizyah berasal dari kata jazâ-yajzi yang berarti balasan. Kata jizyah juga diartikan dengan al-Dharibah bermakna upeti pajak. Menurut istilah syara' makna jizyah diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahli kitab. Jizyah dipungut dari setiap umat, baik mereka ahlul kitab (Yahudi atau Nasarani) atau Majusi dan lainnya, baik itu orang Arab atau Non Arab (menurut pendapat mazhab Imam Maliki, al-'Auza'i dari para ahli fikih dari Syam). as-Syafi'i berpendapat,"

Jizyah diterima dari ahlul kitab baik Arab maupun 'ajam (Non Arab) termasuk orang Majusi yang menyembah api (ketika itu). Jizyah tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak." Abu Hanifah berpendapat," tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau perang".

Sayyid Sabiq mengatakan: "Tujuan jizyah yang dibayarkan dari orang-orang non muslim yang tinggal di daerah Islam" adalah sebagai berikut:

a. Pembagian jizyah sebagai bukti ketundukannya dan bukti bahwa ia tidak menghalangi dan memerangi dakwah kepada agama Allah.
b. Turut andil memberikan belanja pertahanan dirinya, hartanya dan harga dirinya.
c. Turut andil di dalam Baitul mal kaum muslimin untuk menanggung kebutuhan hidup setiap orang yang tidak mampu bekerja.

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan adanya jizyah adalah sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian bagi mereka dari wajib militer. Selanjutnya, jizyah merupakan alternatif dari kewajiban yang dijalani muslimin, yaitu kewajiban jihad (wajib militer) dan zakat. Jizyah lebih dekat dengan perihal jihad, karena apabila mereka non muslim lebih mengikuti wajib militer untuk jihad, maka gugurlah kewajibannya untuk jizyah. Maka, hikmah jizyah ialah merupakan wujud partisipasi warga negara dalam pembiayaan kepentingan nasional, yang hasilnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukannya kepada pemerintah Islam yang wajib diambil setelah melewati satu tahun (Muharram-Dzulhijjah). Sehingga, jizyah hukumnya adalah wajib selama

seumur hidup, namun apabila mereka memeluk Islam, maka gugurlah jizyah atas mereka (Nugroho, 2019).

BAB V
SUMBER DAYA PEMBANGUNAN ISLAM

PENDAHULUAN

Pembangunan Islam adalah konsep yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam konteks agama Islam. Untuk mencapai pembangunan Islam yang berkelanjutan, sumber daya yang memadai sangat penting. Sumber daya pembangunan Islam merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempromosikan dan mewujudkan tujuan pembangunan Islam.

Sumber daya pembangunan Islam merujuk pada berbagai aspek yang dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Berikut ini beberapa contoh sumber daya pembangunan Islam yang penting:

Al-Qur'an dan Sunah: Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama Islam yang berisi petunjuk hidup dan pedoman bagi umat Muslim. Sumber daya ini menjadi landasan untuk mengembangkan pemahaman dan praktik Islam yang benar. Sunah (tradisi) Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum dan panduan dalam pembangunan Islam.

Ulama dan Cendekiawan Islam: Para ulama dan cendekiawan Islam memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Sumber daya ini sangat penting dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip agama Islam dan menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer. Kontribusi mereka dalam menyampaikan pemahaman agama yang benar serta memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat sangat berarti dalam pembangunan Islam.

Pendidikan Islam: Pendidikan Islam yang baik dan berkualitas merupakan sumber daya penting dalam pembangunan Islam. Sistem pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip Islam serta memadukan pengetahuan umum dan agama dapat membentuk generasi yang berkompeten dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam juga melibatkan madrasah, sekolah, institusi pengajaran agama, dan program pembelajaran Islam di tingkat universitas.

Infrastruktur dan Teknologi: Sumber daya fisik, seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, juga mendukung pembangunan Islam. Infrastruktur yang memadai membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan produktivitas dalam masyarakat, sedangkan teknologi dapat digunakan untuk peningkatan kualitas hidup dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan berkompeten merupakan aset berharga dalam pembangunan Islam. Pembangunan sumber daya manusia melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Pengelolaan sumber daya pembangunan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, dan keseimbangan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan para ulama, cendekiawan Islam, pemimpin masyarakat, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan Islam yang holistik dan berkelanjutan.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sebuah kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja disebutkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat hal ini sangat jelas ditegaskan oleh Al-Qu'ran dalam surah al-Jatsiyah ayat 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: *"dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari padanya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir"*

Sumber daya manusia yang ada dalam Islam adalah semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah bukanlah untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia Islami yang baik ialah Sidiq, Amanah, Fathonah dan tablig. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang real untuk mengukur keunggulan sumber daya manusia Islami. Pada intinya sumber daya manusia Islam tetap mengacu pada pencapaian kesejahteraan yang di Ridho-i oleh Allah Tuhan semesta alam bagaimanapun caranya.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, adapun dasar dari wujudnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya (*empirisme*), pembawaan (*nativisme*), serta lingkungan dan

pembawaannya (*konvergensi*). Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin di muka bumi yang terdiri dari akal, jasmani, dan rohani sebagai sumber potensi yang utama untuk manusia. (Munawwir et al., 2018)

Menurut Hadawi Nahwi dalam penelitian (Munawwir et al., 2018), memiliki 2 ciri Sumber Daya Manusia (SDM), yakni pertama ciri personal (pribadi) dan interpersonal. Ciri personal sendiri dapat ditunjukkan melalui pengetahuan, perasaan dan keterampilannya sedangkan ciri interpersonal sendiri yakni kemampuan dan juga lingkungan dalam melakukan sebuah komunikasi. Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan berasal dari seseorang yang berupa tenaga dan kekuatan dalam dirinya (Munawwir et al., 2018).

Menurut A.R Saleh mengutip dari penelitian (Munawwir et al., 2018), beliau menyatakan bahwa berikut ada beberapa ciri-ciri manusia yang berkualitas, adapun ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang baik, dan memilik akhlak yang mulia
b. Terampil, mandiri, dan cerdas
c. Bertanggung jawab, disiplin, tangguh, dan bekerja keras
d. Nasionalisme (cinta tanah air dan berjiwa berkebangsaan)
e. Sehat secara jasmani dan rohani

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, manusia yang berkualitas perlu didorong untuk mampu menumbuhkan kualitas diri dalam mengamalkan, menghayati, serta memahami segala keberagaman dengan berdasar pada ketetapan hati dan tauhid (iman dan akidah).

2. Tauhid Sebagai Fondasi Sumber Daya Manusia

Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Swt. Tauhid merupakan dasar Islam yang paling utama dan menjadi syarat diterimanya amal perbuatan, dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah (Candrakusuma, 2020). Menurut para ahli, Tauhid adalah:

علم يبحث فيه عن اثبات العقائد الدينية باالدلة اليقينية

Artinya: *"Ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan."*

Keyakinan tauhid menjadi pegangan wajib dalam kehidupan umat Islam dan menjadi pangkal atau sumber pikiran semua aktivitas kehidupan. Tauhid harus menjadi penerang dan ruh kehidupan yang membukakan alam pikiran umat Islam Sebelum kedatangan Islam, sumber daya manusia yang bergerak di berbagai sektor perekonomian di Arab kurang begitu dihargai. Kebanyakan dari mereka dijadikan budak dan sulit bahkan tidak bisa berkembang untuk menjadi tenaga sumber daya manusia yang berkualitas. Di antaranya adalah sektor industri yang merupakan profesi yang umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi.

Semua berubah setelah Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, mulai tersebar di jazirah Arab. Rasulullah ingin merubah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ke tauhid-an, yaitu zaman yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam implementasinya nabi Muhammad tidak hanya mefikirkan bagaimana cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia secara materi, akan tetapi juga secara rohani. Paradigma sumber daya manusia dengan model penyatuan antara material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi, dinamakan

dengan paradigma *unity of one* atau tauhid. Pada dasarnya, paradigma tauhid berusaha menjadikan tauhid sebagai asas dalam mengimplementasikan sumber daya manusia. Tauhid dijadikan landasan bagi penumbuh kembangan karakter insan muslim dalam segala sendi kehidupan tanpa terkecuali.

Dengan demikian untuk membangun generasi sumber daya insani, maka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam memperkenalkan Islam pada masa lalu, tauhid harus menjadi fondasi pertama dan utama dalam mengimplementasikannya.

3. Islam tentang Signifikansi Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi sebagaimana ayat Allah yang terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah {2}: 30 yang berbunyi (Agung, 2017):

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada Malaikat, "Aku hendak menjadikan Khalifah di Bumi".*

Ayat di atas dipertegas dengan ayat lainnya dalam (Q.S. al-An.am {6}:165).

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖوَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu".

Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Kesempurnaan yang dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berguna sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Berbeda dengan Islam, menurut orang-orang Barat, manusia adalah termasuk bangsa binatang menyusui (mamalia). Yusuf Qardhawi, ulama kontemporer karismatik asal Mesir mengutip pendapat Ernest Haeckel, pemuka aliran biologisme bangsa Jerman yang mengatakan: tidak ada sangsi lagi bahwa dalam segala hal manusia sungguh-sungguh adalah binatang beruas tulang belakang, yakni binatang yang menyusui.

Pendapat ini tentu saja memanggil kembali memori kita tentang apa yang pernah dilontarkan oleh ilmuan Barat lainnya, yaitu Charles Darwin dalam teori evolusinya bahwa asal-muasal bangsa manusia adalah kera. Tentu teori ini ditolak oleh Islam karena bukan hanya bertentangan dengan risalah Islam namun juga secara tak langsung merendahkan derajat manusia itu sendiri sebagai seorang khalifah di bumi. Lain halnya dengan Julian Offrey de Lammetrie, seorang materialis berkebangsaan Perancis yang mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara manusia dengan binatang dan karena itu manusia adalah suatu mesin.

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli filsafat mengenai manusia tidaklah berbeda dengan pendapat di atas. Mereka memberikan sebutan manusia sebagai binatang dengan beberapa sikap menurut kenyataan tindakan manusia dalam kehidupannya, antara lain yaitu(Agung, 2017):

a. Homo *Sapiens*, menurut Lonnaeus yaitu binatang yang

mempunyai budi (akal) dan ahli agama kristen menyebut manusia sebagai *animal rational*, yaitu binatang yang berfikir.

b. Homo *Laquen*, menurut Revesz dalam *Das Problem Des Ursprungs end Sprache*. manusia ialah binatang yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran serta perasaan dalam kata-kata tersusun.
c. Homo *Faber*, menurut Bergson dalam *L.Evolution Creatrice*. Yaitu binatang yang pandai membuat alat perkakas.
d. *Zoon Politicon*, menurut Aristoteles yaitu binatang yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
e. Homo *Religious*, yaitu binatang yang dasarnya beragama.
f. Homo *Economicus*, yaitu binatang yang takluk pada undang-undang ekonomi dan dia bersifat ekonomikus.

Akan Tetapi al-Qur.an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Definisi ini mengandung tiga unsur yaitu:

a. Manusia adalah ciptaan Allah swt. (Q.S. an-Nahl {16}: 4) "Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata".
b. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah swt. Menurut al-Qur'an, yang akan dipertanggungjawabkan itu ialah:
    1) Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana (Q.S. 2: 30) dan (Q.S. al-An.am {6}: 165)
    2) Semua nikmat Allah yang pernah diterima manusia (Q.S. atTakatsur {102}: 8) *"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu"*

3) Semua tingkah laku manusia selama hidup di dunia ini (Q.S. an-Nahl {16}: 93) *"Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan"*.
4) Semua ide, gagasan, ilmu dan teknologi yang diadakan manusia (Q.S.al-Israa {17}: 36*) "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya"*.
5) Semua ikrar dan janji yang diadakan manusia (Q.S. al-Israa {17}: 34 *"Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"*.

c. Manusia diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti sifat-sifat yang dipunyai oleh Tuhan. Seperti berkuasa, berkehendak, berilmu, penyayang, pengasih, melihat, mendengar, berkata-kata dan sebagainya. Tetapi sifat-sifat ini tidaklah sama. Tuhan adalah pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan-Nya. Pencipta dengan ciptaan-Nya tidak sama. Karena itu sifat-sifat Tuhan yang ada pada manusia tentulah sesuai dengan kemanusiaannya.

4. Potensi Dasar Manusia

Melalui pendekatan historis, Hasan Langgulung dalam menjelaskan bahwa di Yunani Kuno satu-satunya potensi manusia yang harus dikembangkan di kerajaan Sparta adalah potensi jasmaninya, tetapi sebaliknya dikerajaan Athena yang dipentingkan adalah kecerdasan otaknya. Beberapa ahli filsafat pendidikan Islam telah mencoba mengklasifikasikan potensi manusia, diantaranya yaitu menurut KH. A. Azhar Basyir, bila manusia ditinjau dari substansinya, maka manusia terdiri dari potensi materi yang berasal dari bumi dan potensi ruh yang berasal dari Tuhan (Agung, 2017).

5. Sumber Daya Manusia Berkualitas Menurut Islam

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada Pencipta (Agung, 2017).

Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah, mereka tidak akan mampu mengemban tanggung jawabnya jika mereka tidak dilengkapi dengan potensi-potensi dalam mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan serta nilai lebih dari manusia tersebut dibandingkan dengan makhluk lainnya. Artinya, jika sumber daya manusianya berkualitas maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas SDM tidak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani dan spiritual, yaitu berupa iman dan taqwa (imtaq).

Kualitas SDM tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental dan spiritual keagamaan. Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian akan lebih mempunyai tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan, hanya akan membawa manusia ke arah kenikmatan duniawinya saja atau hedonisme belaka. Ketika semangat hedonisme sudah

menguasai manusia, bisa diramalkan yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia lain.

6. Dimensi Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Islam

Konsep pengembangan manusia sebagaimana dipersepsikan oleh Islam tidak ada artinya tanpa pencapaian tazkiyah. Nilai-nilai seperti takwa (kesalehan), ihsan (kebajikan), adl (integritas), ikhlas (ketulusan), meningkatkan tidak hanya kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi juga menyediakan lingkungan yang cocok untuk materi pengembangan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan bagian integral perkembangan moral dan sosial-politik masyarakat (Mahri et al., 2021).

Dimensi yang diperlukan dalam pengembangan SDM adalah sebagai berikut.

a. Kesehatan dan Nutrisi dalam Pengembangan SDM

Muslim yang kuat dan sehat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Kebersihan merupakan setengah bagian dari iman. Al-Qur'an hanya mengizinkan makanan seperti itu yang baik. *"Katakan, halal kepada Anda adalah (semua) hal-hal yang baik dan murni".*

Islam melarang anggur dan alkoholisme. Itu Al-Qur'an surat al-Maidah [5] ayat 90 mengatakan,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (mabuk) dan berjudi, (pengabdian) batu, dan (ramalan) panah adalah kekejian dari hasil karya setan. Hindari itu (kekejian) agar kamu makmur" Q.S al-Maidah [5]:90

Allah juga melarang pengambilan daging babi, bangkai, darah dan hewan disembelih melalui cara yang tidak ditentukan. Al-Qur'an mengatakan, dilarang memakan daging bangkai, darah, daging babi. Islam sangat melarang homoseksualitas dan seks di luar ikatan perkawinan. Perintah Islam ini memiliki perlindungan bawaan untuk kesehatan dan kebersihan dan perlindungan berbagai penyakit -fisik, mental, dan spiritual. Kesehatan dan pendidikan sangat berhubungan dengan pembangunan ekonomi.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari peran pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan, keduanya adalah hal fundamental kemampuan individu sebagai inti dari pembangunan. Pendidikan mendorong kemampuan negara berkembang dalam pengembangan teknologi dan membangun kapasitas pertumbuhan yang mandiri. Sementara itu, kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan tercapainya pendidikan yang diharapkan. Peran yang sangat penting tersebut menjelaskan kesehatan dan pendidikan merupakan hal dasar dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan dan kualitas populasi selalu mempercepat kegiatan pembangunan.

Wahyu Al-Qur'an dimulai dengan kata 'iqra' yang berarti 'baca'. Dalam sejumlah ayat, Al-Qur'an mendesak para pengikutnya untuk menggunakan akal budi mereka, kekuatan, berpikir dan merenungkan tentang alam semesta dan pada struktur manusia sendiri. Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang tidak, tidak mungkin sama.

c. Tazkiyah / Penyucian Batin

Tazkiyah merupakan fitur yang paling membedakan pendekatan Islam terhadap sumber daya manusia dalam pembangunan dengan pendekatan lainnya. Tazkiyah atau penyucian batin dan pengembangan karakter serta kepribadian telah menjadi misi semua Nabi Allah. Islam menghendaki manusia berkembang menjadi mahluk yang memiliki kepribadian yang terintegrasi, dan senantiasa melakukan tazkiyah dalam setiap hubungannya dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam, dan dengan masyarakat serta negara. Untuk dapat melakukan pemurnian batin seseorang harus dapat membuang gagasan, perilaku, penyembahan terhadap berhala, cinta serta nafsu akan kemewahan dunia. Manusia telah dianugrahkan oleh Sang Pencipta yang Mahakuasa kekuatan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia tidak semata-mata mengisi alam pikiran dengan fakta-fakta tetapi juga mengisi dengan kemampuan-kemampuan memperoleh ilham dan inspirasi yang dapat dicapai melalui keimanan kepada Allah Swt. dengan cara tazkiyah al-nafs sehingga tugas yang besar dimana ilmu pengetahuan dan teknologi memegang supremasi kekuasaan di abad modern ini berdaya guna dan produktif bagi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan tafsir Jalalayn, Allah menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia yang selalu menyucikan dirinya dengan taat dan berbuat baik sungguh sangat beruntung. Sebaliknya, manusia yang mengotorinya sungguh sangat merugi. Apabila kesehatan dan pendidikan yang telah dibahas sebelumnya berjalan dengan

baik, maka hal tersebut dapat berperan penting sebagai modal manusia (*human capital*).

7. Urgensi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Gilley dan Eggland, pengembangan SDM mempunyai tiga misi yaitu, *pertama*, untuk memungkinkan terjadinya proses perkembangan individu, terutama terfokus pada peningkatan kinerja yang terkait dengan pekerjaan yang ditangani. *Kedua*, menyiapkan pengembangan karir yang terfokus pada peningkatan kinerja yang terkait dengan penugasan dalam jabatan di masa yang akan datang. *Ketiga*, menyediakan pengembangan organisasi yang menghasilkan penggunaan potensi manusia dan kinerjanya yang meningkat. Pada intinya pengembangan SDM terkait dengan pemanfaatannya dalam pembangunan sebagai suatu upaya melakukan perubahan ke arah perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas SDM. Makna dari konsep ini adalah, bahwa perubahan yang diupayakan melalui pembangunan bukan hanya menjangkau segi-segi material saja, tetapi juga menjangkau seluruh aspek kehidupan(B. Kurniawan, 2020). Diantara manfaat pengembangan SDM yaitu:

a. Dengan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi yang baik dapat memperoleh tenaga kerja vang produktif.
b. Fungsi pengembangan staf membantu individu, kelompok, dan organisasi rnenjadi lebih eiektif.
c. Program insentif yang besar terbukti dapat membawa dampak positif pada organisasi.
d. Lingkungan kerja yang aman dan sehat cenderung meningkatkan prduktivitas
e. Hubungan pekerja-manajemen yang efekif membawa

hasiI yang lebih baik bagi Organisasi.

Proses pembangunan memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, agar segala yang dilaksanakan dan dihasilkan bisa mereka rasakan manfaatnya. pengembangan SDM pembangunan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi oleh setiap orang yang menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pembangunan dan peningkatan taraf hidup dan peningkatan kualitas SDM.

8. Formulasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM yaitu(B. Kurniawan, 2020):

a. Sumber daya sejarah dan budaya

   Ketahanan suatu masyarakat ditentukan oleh tiga unsur yakni sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya kebudayaan dan kesejarahannya. Oleh karena itu suatu daerah perlu mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya yang luhur sebagai modal untuk membangun daerahnya. Hanya anggota masyarakat yang berbudaya yaitu yang mempunyai kebangaan terhadap masyarakat dan budayanya, akan menjadi unsur-unsur SDM yang produktif dan kompetitif dalam era globalisasi. Manusia yang tidak berbudaya akan tenggelam karena tidak mempunyai identitas. Manusia yan tidak mempunyai identitas tidak merasa bangga akan keterkaitanya dengan masyarakatnya sehingga tidak diharapkan lagi menjadi manusia yang produktif bagi masyarakatnya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

   SDM yang diharapkan adalah anggota masyarakat yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Manusia yang berwatak, yaitu manusia yang jujur, yang mempunyai sosial capital yaitu manusia yang dapat dipercaya, yang suka bekerja keras, jujur dan inovatif.
2) Seorang yang pintar atau intelegen. Seorang intelegen bukan hanya orang akademis tetapi kemampuan yang bermacam-macam yang harus dikembangkan oleh semua orang.
3) Enterpreneur (wiraswasta). Seseorang yang mempunyai kemampuan intrepreneur adalah sesorang yang inovatif yang tidak terkat oleh suatu yang telah tetap. Seseorang yang mempunyai tingkah laku intrepreneurship yang telah berkembang adalah seseorang yang dapat hidup di dalam berbagai situasi dan kondisi dan tidak mungkin menjadi seorang penganggur.
4) Watak yang kompetitif. Seorang yang mempunyai sifat kompetitif akan selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Sikap kompetitif seperti ini sudah harus ditumbuhkan di dalam keluarga juga di dalam semua tingkat pendidikan formal.

c. Pemberdayaan rakyat

Pemberdayaan SDM yang lemah pada hakikatnya adalah memberdayakan rakyat banyak agar mereka dapat berdiri sendiri dan mau mengubah nasibnya sendiri. Rakyat yang berdaya adalah rakyat yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai untuk mengolah SDA yang ada disekitarnya. Pusat-pusat pelatihan perlu didirikan dan dikordinasikan agar tidak mubazir. Suatu perumpamaan yang layak untuk menjadi teladan bagi SDM yang tidak berdaya adalah orang cerdik akan berusaha merubah

kerugian menjadi keuntungan. Sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda.

Ketika Rasulullah diusir dari Makkah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah dan kemudian berhasil membangunnya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah.

9. Ruang Lingkup Ekonomi Sumber Daya Manusia

a. **Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resources Planning)**

Perencanaan sumber daya manusia memfokuskan pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi serta penciptaan kesempatan kerja, kemudian membawa pada arah telah perencanaan sumber daya manusia yang meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja di lingkungan pasar (market) (Hidayati, 2022).

Pembangunan sumber daya manusia berarti peningkatan pengetahuan keterampilan dan kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat sehingga bisa bernilai jual tinggi tenaga siap pakai. Menurut Harbinson dan Myres masalah umum dalam pembangunan ekonomi sumber daya manusia adalah kurangnya pekerja tingkat tinggi dengan keahlian yang dibutuhkan dan tidak termanfaatkan tenaga kerja yang ada. Oleh sebab itu dalam perencanaan tenaga kerja dapat dibuat suatu kegiatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk menciptakan kesempatan kerja angkatan kerja yang ada dapat ter manfaatkan dengan baik.

b. **Ekonomi Ketenagakerjaan (Labor Economics)**
Ketenagakerjaan (labor ekonomis) memperhatikan masalah Serikat Pekerja atau organisasi hukum ketenagakerjaan (UU, Pepres, Permaturan metri dll), asuransi sosial ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), diskriminasi terhadap gender dalam perusahaan dan manajemen perusahaan. Analisis dalam ekonomi Ketenagakerjaan sangat sedikit menggunakan teori ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak terhadap pendekatan ini. Salah satu golongan yang merasa tidak puas dengan cara analisis seperti di atas adalah ekonomi ekonomi dari Universitas Chicago yang dipelopori oleh grade mereka menyebutkan bahwa ekonomi Ketenagakerjaan Seperti di atas adalah ekonomi Ketenagakerjaan kelembagaan (*institusional labor economics*).

Di dalam pasar tenaga kerja permintaan dan penawaran secara bersama-sama menentukan jumlah yang akan dipekerjakan serta upah yang akan mereka terima dalam hal semacam ini pasar tenaga kerja adalah sama dengan pasar barang karena terdapat beberapa penawaran baik itu mengenai keahlian profesi dari tenaga kerja.

c. **Ekonomi Kependudukan (Population Economics)**
Cakupan pembahasan ekonomi kependudukan adalah masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan seperti misalnya memanfaatkan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi penduduk pada pembangunan economics. Dalam ekonomi kependudukan juga sering ditetapkan new homes ekonomis yang membahas untung rugi memiliki anak untung rugi melakukan migrasi

interaksi antara jumlah dan mutu penduduk. Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk titik jumlah penduduk dapat diketahui dari publikasi Biro Pusat Statistik atau hasil sensus 10 tahunan.

B. SUMBER DAYA ALAM

1. Pengertian Sumber Daya Alam

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangakan untuk proses produksi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal (5) menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non hayati dan sumber daya buatan. Dengan kata lain, dalam ekonomi Islam, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah semua bentuk kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidupnya(iqbal, 2020)namely the Sustainer of Nature (Rabbul 'Alamin. Allah SWT menciptakan alam dan isinya untuk kebutuhan manusia, supaya manusia bisa mengambil manfaat dari semua sumber daya alam yang di halalkannya, karena tidak semua diciptakan di dunia dengan sia-a-sia, akan tetapi smua sumber daya alam yang ada memiliki manfaat bagi manusia itu sendiri.

Sumber daya alam ini merupakan modal yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutusekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui".

Negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, dari berbagai sektor, baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan pertambangan dan lain sebagainya. Sektor tersebut dapat menjadi sebuah modal yang sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteran dan kemaslahatan masyarakat.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam harus di manfaatkan dengan baik dan diperhatikan kelestariannya. Adapun berikut beberapa sumber daya alam adalah sebagai berikut (iqbal, 2020)namely the Sustainer of Nature (Rabbul 'Alamin:

a. Matahari

Allah berfirman Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 12:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَۗوَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَۙ

"Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)" (Q.S an Nahl ayat 12)

Sumber daya matahari juga digunakan sebagai energi dalam skala rumah tangga, yaitu melalui pembuatan panel

solar. Panel solar merupakan alat yang mengumpulkan tanaga surya kemudian difokuskan pada satu titik atau garis. Kumpulan tenaga surya ini menjadi panas yang dugunakan untuk menghasilkan uap panas yang kemudian berfungsi untuk menjalankan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Alat ini juga digunakan dalam skala besar, yaitu digunakan di dunia perindustrian.

b. Angin

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Saba ayat 12 yang berbunyi:

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ

"Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. "(Q.S Saba Ayat 12).

Energi angin adalah bentuk tidak langsung dari energi matahari yang diciptakan oleh kombinasi faktor-faktor, termasuk pemanasan atmosfer bumi yang tidak merata oleh radiasi matahari, variasi topografi, dan rotasi bumi. Orang-orang telah menggunakan energi angin sepanjang sejarah untuk menggerakkan perahu layar, menggiling tepung dari biji-bijian dan memompa air. Saat ini tenaga mekanis yang diinduksi angin dari rotor dan multi-blade besar-menyapu lingkaran di udara berdiameter 100 meter-dirutekan ke generator yang menghasilkan listrik.

c. Air

Allah berfirman dalam al-Qur'an an-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur".

Tiga jenis sumber daya laut yang berbeda biasanya disebutkan sebagai sumber energi yang mungkin, pasang surut, gelombang, dan perbedaan suhu laut (konversi energi panas laut atau OTEC). Misalnya skema energi pasang surut menangkap air saat air pasang dan melepaskannya saat air surut. Perangkat pembangkit energi gelombang terbagi dalam dua klasifikasi umum, tetap dan mengambang. Dalam kedua kasus, gerakan bersosialisasi dari gelombang masuk dan keluar digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Sistem energi pasang surut menjebak air pasang di reservoir. Ketika air pasang turun, air di belakang reservoir mengarlir melalui turbin listrik, menghasilkan listrik. Konversi energi panas laut menggunakan perbedaan suhu antara air permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin untuk menghasilkan listrik.

Angin juga bisa dimanfaatkan oleh para nelayan dalam hal menjalankan atau meningkatkan perekonomian mereka. Pada malam hari, nelayan menggunakan angin darat untuk pergi mencari ikan ke laut dan menggunakan angin laut untuk kembali ke daratan.

d. Tanah

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah yang berbunyi:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ١٩ ﴾

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ٢١ ﴾

"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,(19) dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.(20) Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,"(21)

Tanah dalam artian sumber daya alam yang mencakup seluruh daratan yang berada di Negara Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Baik itu dibidang pertanian, peternakan, kehutanan ataupun pertambangan. Tanah menghasilkan sumber daya alam hayati.

e. Masyarakat

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat di atas dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6605): *Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya,dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya".*

Manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas alam dan harus berusaha memperbaiki atau mengurangi kerusakan alam. Konservasi alam dan kampanye-kampanye pelestarian lingkungan perlu kembali di galakkan agar alam kita tidak rusak lebih parah dan bisa di nikmati oleh anak cucu kita dimasa depan

3. Macam-macam Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa penggolongan

sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi dan jenis(Qur'an, 2018).

a. Sifat

Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu:

1) sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara (*renewable resources*), karena sumber daya jenis ini dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali), misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air dan tanah.
2) sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources/irreplaceable atau stock natural resources*) dianggap memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya. Misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara dan bahan tambang.
3) sumber daya alam yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*), merupakan sumber daya alam berupa udara, matahari, energy pasang surut, energy laut dan air dalam siklus hidrologi.

b. Potensi

1) Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca dll.
2) Sumber daya alam energy, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energy. Misalnya, minyak bumi, gas bumi, batu bara, air terjun, dll.
3) Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya daratan, dan angkasa.

c. Jenis
   1) Non Hayati (abiotic) disebut juga sebagai sumber daya alam fisik. Misalnya bahan tambang, tanah, air dll.
   2) Hayati (biotik) disebut juga sebagai sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dll.

d. Wujud fisiknya dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu:
   1) Sumber Daya Lahan
   2) Sumber Daya Hutan
   3) Sumber Daya Air; Dan,
   4) Sumber Daya Mineral

   Dalam penggunaannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dapat saling melengkapi (*komplementer*) saling menggantikan atau dapat bersifat netral. Ruang lingkup sumber daya alam mencakup semua pemberian alam di bawah atau di atas bumi baik yang hidup maupun yang tidak hidup.

4. Pandangan Islam Terhadap Sumber Daya Alam dalam Bisnis

a. Fungsi Sumber Daya Alam dalam Pertumbuhan Bisnis
   Potensi sumber daya alam ditegaskan dalam beberapa firman Allah SWT, di antaranya adalah sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ ١٠ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ ١١
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۭ ٢١

   Artinya: *" Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" – " niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat" – " dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai " (Surat Nuh ayat 10-12).*

Charles W. Hiwe mengatakan, bahwa dalam usaha memajukan perekonomian kaitannya dengan sumber daya alam yang tetap jumlahnya dapat disajikan sebagai berikut:

1) Sumber daya dihabiskan secara cepat dalam suatu periode dengan pertumbuhan yang cepat dan standar hidup yang tinggi diikuti suatu kehancuran suatu sistem kehidupan secara cepat pula.
2) Sumber daya alam dimanfaatkan perlahan-lahan, sehingga tingkat pendapatan dan standar hidup rendah, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
3) Sumber daya dimanfaatkan secara cepat guna menciptakan suatu kemampuan untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbarui untuk mengganti sumber daya yang habis pakai, sehingga produksi perekonomian dapat terus berlangsung.
4) Sumber daya alam dihemat penggunaannya dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit, tetapi akan menjadi usang bila ada penemuan teknologi baru.
5) Perubahan teknologi serta substitusi sumber daya yang dapat diperbarui bagi yang tidak dapat diperbarui dapat dipelihara kelangsungan pertumbuhan Produk Nasional Bruto, tetapi memburuknya lingkungan akan mengurangi kesejahteraan manusia.

b. Faktor Sosial Budaya dan Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Berbisnis

Penentuan nilai penggunaan sumber daya alam dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang masih pra-industri (belum mengalami kegiatan industri), masyarakat itu dipandang oleh penduduknya sebagai sesuatu yang misterius dan

belum dimengerti. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi terbatas pada kebutuhan pokok.

5. Konservasi Sumber Daya Alam dalam Islam

Konservasi sumber daya alam merupakan suatu upaya dalam menjaga dan memelihara atas apa yang telah dititipkan Allah kepada manusia, yang mana pada dasarnya manusia turut mengambil manfaat dari sumber daya alam yang tersedia. Definisikan konservasi sebagai upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara alami, berkelanjutan dan teratur baik sumber daya biotik maupun non biotik dengan melindungi proses-proses interaksi antar makhluk hidup dalam upaya mempertahankan keanekaragaman hayati. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian dan aspek sosial.

Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga atas kelestarian dan tidak akan merusaknya. Tentunya pembangunan dan pemanfatannya dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥٦

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesung-guhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS Al-A'raf ayat 56).*

Dalam analisis ekonomi bisnis, para ekonomi masih banyak memusatkan perhatiannya hubungan antara pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Sebagian besar

teori pertumbuhan ekonomi bisnis memusatkan perhatiannya pada hubungannya antara produksi atau output dengan faktor produksi kapital dan tenaga kerja. Hanya saja saat ini merasa perlunya melihat peranan sumber daya alam dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi bisnis. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi bisnis semakin sedikitlah sumber daya alam yang tersedia di bumi ini.

Firman Allah dalam Surat Ali-Imran ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka'' (QS Ali-'Imran ayat 191).*

Charles W. Hiwe mengatakan, bahwa dalam usaha memajukan perekonomian kaitannya dengan sumber daya alam yang tetap jumlahnya dapat disajikan sebagai berikut:

1. Sumber daya dihabiskan secara cepat dalam suatu periode dengan pertumbuhan yang cepat dan standar hidup yang tinggi diikuti suatu kehancuran suatu sistem kehidupan secara cepat.
2. Sumber daya alam dimanfaatkan perlahan-lahan, sehingga tingkat pendapatan dan standar hidup rendah, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
3. Sumber daya dimanfaatkan secara cepat guna menciptakan suatu kemampuan untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbarui untuk mengganti sumber daya yang

habis pakai, sehingga produksi perekonomian dapat terus berlangsung.

4. Sumber daya alam dihemat penggunaannya dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit, tetapi akan menjadi usang bila ada penemuan teknologi baru.
5. Perubahan teknologi serta substitusi sumber daya yang dapat diperbarui bagi yang tidak dapat diperbarui dapat dipelihara kelangsungan pertumbuhan Produk Nasional Bruto, tetapi memburuknya lingkungan akan mengurangi kesejahteraan manusia

   Dalam menjaga alam dapat dilakukan dengan melakukan konservasi. Konservasi secara harfiah diartikan sebagai pelestarian pengelolaan, dan perawatan sumber daya alam dan kultural. Konsep dari konservasi ini tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu hal ini telah diatur dalam UU No. 4 tahun 1982 dan PP No. 51 tahun 1993 tentang AMDAL, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan.
6. Peran Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan
   Peran dan kontribusi sumber daya alam dalam perekonomian dan kehidupan manusia merupakan salah satu konsep dasar sumber daya alam sebagai "modal alam" atau "natural capital". Konsep modal alam ini dalam tatanan teori ekonomi telah pula menjadi tema sentral sejak era ekonomi klasik dan neo klasik di abad 18 dan 19. Pada era tersebut ekonomi mengidentifikasi faktor produksi, yakni sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan

barang dan jasa sebagai "kapital", tenaga kerja, dan lahan. Kapital diartikan sebagai input yang tidak dikonsumsi untuk menghasilkan suatu produk atau sesuatu yang dibuat manusia yang memberikan kontribusi pada produksi barang dan jasa. Konsep "kapital" ini ditemukan dalam konsep Adam dan juga mazhab ekonomi Austria yang dipelopori oleh BohmBawreck.

Selanjutnya peranan relatif sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan cenderung untuk turun bila perokonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan, maka keiginan berkonsumsi marjinal pada sumber sumber alam nampak berkurang. Selain itu input alat-alat produksi persatuan output untuk sumber-sumber alam akan menurun atau tetap. Turunya perananya penting dari sumber-sumber alam terutama berhubungan *dengan "income elasticity of demand"* yang relatif rendah terhadap hasil-hasil pertanian. Demikian juga perubahan dalam fungsi produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik, bibit yang baik, penggunaan pupuk dan juga adanya pengelolaan tanah yang lebih efisien.

Secara relatif peranan sumber daya alam memang semakin kecil. Tetapi kalau kita perhatian nampak bahwa semakin maju suatu perokonomian secara absolut, semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang pontensi menjadi sumber daya alam yang bersifat rill. Karena kenyataan memang demikian maka timbul banyak kekhawatiran berhubungan dengan semakin majunya pembangunan ekonomi suatu negara. Bersama-bersama dengan perkembangan ekonomi, banyak sumber daya alam yang harus diolah sehingga akan mengurangi sumber daya alam yang ada, khususnya sumber daya

alam yang bersifat sebagai persediaan (*stock resources*). Demikian pula sumber daya alam yang bersifat aliran bersifat aliran atau dapat diperbahruhi (*flow atau renewable resources*). Walaupun tidak segera habis kalau dipakai terus, tetapi kalau hati-hati, maka sumber daya alam akan menjadi langka pula.

7. Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia
   Berikut merupakan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai latar belakang pengetahuan dalam memahami konflik sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia (Qur'an, 2018).
   a. **Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*)**
      Kerakusan dan ketamakan adalah salah satu bentuk sifat buruk manusia yang secara sengaja atau tidak yang dapat muncul dalam perilaku hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam lebih diakibatkan oleh sifat tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marjinalisasi kepentingan masyarakat lain. Eksploitasi sumberdaya tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan daya hidup masyarakat yang lain.
   b. **NIMBY (*Not InMy Back Yard*) Syndrome**
      Berkaitan dengan pola ini muncul idiom NIMBY (*Not InMy Back Yard*) yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Fenomena ini terkait dengan kebangkitan kesadaran tentang lingkungan pada dasawarsa 1960-an

di negara-negara maju terutama Eropa dan Amerika. Fenomena NIMBY ini misalnya ditunjukkan dengan relokasi industri yang sudah tidak efisien dan kotor dari negara maju ke negara sedang berkembang. Bila dicermati secara kritis, kebijakan relokasi industri dan alih teknologi yang dikampanyekan negara maju ke negara sedang berkembang, tidak lepas dari sindrom NIMBY.

c. **Memancing di Air Keruh (*Profit Taking*)**

Berbagai konflik yang muncul dapat menjadi ajang memperoleh keuntungan bagi segelintir atau sekelompok orang di atas penderitaan orang lain. Para pengusaha baik penghasil maupun penjual dan broker senjata adalah para pengambil keuntungan baik di saat damai maupun perang. Para penghasil senjata canggih justru negara kaya dan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman; Demikian pula para pengusaha pemasok senjata baik yang legal maupun illegal adalah orang kaya dan kuat.

d. **Teori Kemerosotan dan Kelangkaan (Deprivation and Scarcity)**

Menurut para penganut teori Scarece Resource Warsbahwa seseorang, sekelompok orang atau bangsa akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mempertahankan dan mengamankan akses dan kontrol atas sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau survival; Semakin langka sumberdaya, semakin dasyat perebutannya (Billon, 2001; Jones, 1998; Porto, 2002).

Kelangkaan berarti kesenjangan yang tak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diingikan dan

apa yang dapat diraih. Kelangkaan ini dalam kurun waktu tertentu menyebabkan orang atau kelompok orang mengalami kesulitan dan frustrasi, sehingga dapat memicu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak orang. Ketika orang harus antri untuk mendapatkan sesuatu, maka berarti masih ada aturan yang dapat mengatur hak orang yang datang lebih dahulu untuk memperoleh kesempatan yang pertama, first come, first serve.

8. Urgensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Keseimbangan Sumber Daya Alam

   Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang(Qur'an, 2018). Sutamihardja dalam (Qur'an, 2018), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

   a. Pemerataan hasil-hasil pembangunan antara generasi yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan dapat menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
   b. Safe guarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam

rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik generasi yang akan datang.

c. Pemanfaat danpengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.
e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia agar generasi sesuai dengan habitatnya.

Aspek pembangunan berkelanjutan menurut Daly, adalah:

a. Untuk sumber daya alam yang terbarukan: laju pemanenan harus sama dengan laju generasi (produksi lestari).
b. Untuk masalah lingkungan: laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
c. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energy substitusi.

9. Pandangan Islam Terhadap Sumber Daya Alam dalam Bisnis
   a. Fungsi Sumber Daya Alam dalam Pertumbuhan Bisnis
      Potensi sumber daya alam ditegaskan dalam beberapa firman Allah SWT, di antaranya adalah sebagai berikut(Qur'an, 2018):

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ ١٠ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ ١١
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۗ ٢١

Artinya: *"Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun" – " niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat" – " dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai" (Surat Nuh ayat 10-12).*

Charles W. Hiwe dalam penelitian (Qur'an, 2018) mengatakan, bahwa dalam usaha memajukan perekonomian kaitannya dengan sumber daya alam yang tetap jumlahnya dapat disajikan sebagai berikut:

1) Sumber daya dihabiskan secara cepat dalam suatu periode dengan pertumbuhan yang cepat dan standar hidup yang tinggi diikuti suatu kehancuran suatu sistem kehidupan secara cepat pula.
2) Sumber daya alam dimanfaatkan perlahan-lahan, sehingga tingkat pendapatan dan standar hidup rendah, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
3) Sumber daya dimanfaatkan secara cepat guna menciptakan suatu kemampuan untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbarui untuk mengganti sumber daya yang habis pakai, sehingga produksi perekonomian dapat terus berlangsung.
4) Sumber daya alam dihemat penggunaannya dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit, tetapi akan menjadi usang bila ada penemuan teknologi baru.
5) Perubahan teknologi serta substitusi sumber daya yang dapat diperbarui bagi yang tidak dapat diperbarui dapat dipelihara kelangsungan pertumbuhan Produk

Nasional Bruto, tetapi memburuknya lingkungan akan mengurangi kesejahteraan manusia.

b. Faktor Sosial Budaya dan Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Berbisnis

Penentuan nilai penggunaan sumber daya alam dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang masih pra-industri (belum mengalami kegiatan industri), masyarakat itu dipandang oleh penduduknya sebagai sesuatu yang misterius dan belum dimengerti.

C. SUMBER DAYA TEKNOLOGI

1. Pengertian Sumber Daya Teknologi

UEUAG

dalam skala global.

2. Sejarah Perkembangan Sumber Daya Teknologi Pada Masa Rasulullah SAW

a. **Perkembangan Teknologi Pada Zaman Para Nabi**

Pada zaman para nabi, perkembangan teknologi sebetulnya sudah ada dan lumayan maju. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam al-qur'an tentang bagaimana kehidupan manusia zaman nabi. Hal dilakukan nabi Adam as ketika bertemu dengan Siti Hawa ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam Kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun, dia mendapat wahyu, ketika batu digesekkan dengan batu maka akan menghasilkan api. Ini merupakan sebuah teknologi. Kita ambil contoh lain, pada zaman nabi Nuh as, telah ada yang namanya

kapal bahkan kapal ini sangat besar. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa, semua makhluk hidup yang patuh kepada nabi Nuh as mampu ditampungnya seperti gajah, beruang dan hewan lainnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam sejak zaman dahulu kala.

b. Perkembangan Teknologi Pada Zaman Bani Umayyah

Sejarah Perkembangan Teknologi Dalam Dunia Islam pada tahun 700-an, Ahli ilmu geografi Islam dan navigator-navigatornya mempelajari jarum magnet mungkin dari orang Cina, namun para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet dan menerapkannya di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya di dalam pelayaran menuju ke Barat. Navigator-navigator Eropa bergantung pada juru-juru mudi Muslim dan peralatannya ketika menjelajahi wilayah-wilayah yang tak dikenal. **Gustav Le Bon** mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh **Muslim** dan orang Cina hanya berperan kecil**. Alexander Neckam**, seorang Inggris, seperti juga orang Cina, mungkin belajar tentang kompas dari pedagang-pedagang Muslim, namun dikatakan bahwa dialah orang pertama yang menggunakan kompas dalam pelayaran.

c. Perkembangan Teknologi Pada Zaman Daulah Abbasiah Baghdad (Irak)

Pada tahun sekitar 765, fakultas kedokteran pertama didirikan oleh **Jurjis Ibnu Naubakht**. Sekitar tahun 990 M, Ibnu Firnas seorang ilmuwan dari Andalusia (Spanyol) memimpikan bagaimana agar suatu saat

manusia bisa terbang bebas di angkasa seperti burung. Dia terinspirasi **kejadian Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw**, tetapi dia berpikir bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa naik Bouraq kendaraan Nabi Saw untuk Isra' Mi' raj, karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang yang mulia seperti nabi.

Ibnu Firnas (Armen Firman), mulai melakukan penelitian yaitu meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung dan kelelawar. Sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Kemudian dia menaiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya, lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 KM dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang ramai bertepuk tangan atas ciptaannya. Sebaliknya pada saat itu masyarakat Eropa masih dalam era kegelapan, Alat terbang Ibnu Firnas inilah yang menginspirasi **Wright Bersaudara** menciptakan pesawat terbang pada awal abad ke 19.

d. Perkembangan Teknologi Pada Zaman Khalifah Al-Maimun Ibnu Harun Al - Rasyid

Sejarah Perkembangan Teknologi Dalam Dunia Islam pada tahun 813, didirikanlah **Daru Al-Hikmah** atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama yang ada di dunia, yang mana terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, obsevatorium bintang dan Universitas. Pada tahun 850, Ahli kimia Islam menghasilkan kerosin (minyak tanah murni) melalui penyulingan produk minyak dan gas bumi (Encyclopaedia Britannica, Petroleum) lebih dari 1.000 tahun sebelum Abraham Gesner, orang Inggris, mengaku sebagai yang pertama

menghasilkan kerosin dari penyaringan aspal. Pada tahun 866, kertas tertua yang menjadi contoh untuk dicetak di dunia barat adalah sebuah naskah arab yang berjudul Gharib Al-Hadist oleh Abu 'Ubyad Al-Qasim ibnu Sallam bertanggal Dzulqaidah 252 atau 13 Nopember – 12 Desember 866, yang masih tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden.

e. Perkembangan Teknologi Pada Zaman Islam Modern

Pada saat zaman ini, dunia Islam sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga mampu menciptakan pesawat terbang yang canggih. Di lihat dari teknologi perang, dunia Islam juga sangat canggih. Ini merupakan penyempurnaan dari teknologi masa lampau. Teknologi dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan di dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau.

D. SUMBER DAYA MANAJEMEN

1. Pengertian Manajemen

Secara bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *Management*, yang secara derivatif berakar pada kata *manage* yang memiliki arti mengatur atau mengelola. Secara istilah, dapat kita jumpai dari beberapa definisi: Mary Parker Follet, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Wibisono, mengatakan bahwa "*the art of getting things done through people*" (suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan melalui orang

lain). Melalui definisi ini secara sederhana istilah manajemen dapat kita dipahami sebagai suatu seni memanfaatkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan (Musyaddad, 2017). Selain itu ada dua istilah yang diberikan para ahli mengenai istilah manajemen yaitu sebagai seni yang merupakan kreativitas pribadi yang disertai suatu keterampilan dan ada pula yang memberikan definisi manajemen sebagai suatu ilmu yang merupakan kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Maka suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tidak akan terlepas dari aktivitas manajemen. Manajemen menginginkan tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif.

Manajemen dikatakan sebagai seni karena pencapaian tujuan yang ditetapkan yaitu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen yaitu sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan berusaha secara sestematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mancapai tujuan, kemudian manajemen tersebut dapat menerangkan gejala-gejala, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan serta memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal tersebut (Musyaddad, 2017). Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dalam usaha mengatur dan mengelola pekerjaan atau organisasi melalui orang lain dengan menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai sebuah tujuan. Berikut ada beberapa point yang dapat disarikan dari berbagai defenisi manajemen di atas yakni:

a. Manajemen merupakan suatu kegiatan (seni mengelola)
b. Kegiatan manajemen memiliki tujuan
c. Manajemen merupakan seni menggunakan semua sumberdaya secara efektif dan efisien

d. Dalam manajemen, manusia adalah sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek
e. Dilihat dari perspektif proses, manajemen berfungsi sebagai kegiatan *Planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (menentukan orangorang yang akan melakukan pekerjaan), *leading* (memimpin), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (kontrol dan evaluasi).

Berdasaran beberapa defenisi manajemen seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tindakan manajerial adalah tindakan pengelolaan serta pengaturan sebuah pekerjaan atau organisasi melalui orang lain dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada demi mencapai tujuan, maka sumberdaya organisasi di sini memegang peran penting (Musyaddad, 2017).

2. Manajemen dalam Islam

Sebagai *way of life*, Islam berisikan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan dalam segala aspeknya keyakinan, hal ini sudah sepatutnya dapat mendorong kaum muslim untuk menggali segala informasi ilahiyah yang tercantum dalam Alquran dan hadis tersebut untuk disarikan dan dikembangkan dalam berbagai cabang keilmuan yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan manusia termasuk pengetahuan manajerial atau Ilmu manajemen. Manajemen yang bermakna pengelolaan atau pengurusan terhadap organisasi dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti berdakwah, berbisnis, berpolitik, militer, dan kehidupan sosial lainnya. Tanpa manajemen tidak mungkin Rasulullah mampu menyebarkan Islam dalam waktu singkat di jazirah arab (Musyaddad, 2017).

Pada era belakangan ini, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya telah muncul sebuah paradigma manajemen baru.

Paradigma manajemen ini memiliki dua makna yaitu:

a. Manajemen sebagai ilmu; sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yakni pengetahuan yang berisikan tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip serta tata cara pengaturan dan pengelolaan organisasi, hingga pengaturan dan pengelolaan kegiatan dalam organisasi.
b. Manajemen sebagai aktivitas. sebagai aktivitas, manajemen adalah tindakan pengelolaan yang secara populer berkaitan dengan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tindakan kontrol dan evaluasi.

Manajemen Islam saat ini menjadi bagian penting dalam kajian ilmu pengetahuan, seiring dengan munculnya trend "ekonomi Islam", sebagai salah satu alternatif baru dalam sistem perekonomian dunia. Sebagai kegagalan sistem ekonomi komunis dan ekonomi kapitalis dalam mewujudkan keadilan masyarakat, pada kehidupan perekonomian maka ekonomi Islam ini menjadi bagian paling penting serta banyak dikaji dalam lingkungan akademis baik di negara-negara Islam maupun negara non-Islam (Musyaddad, 2017).

3. Prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip manajemen Islam, khususnya dalam hal pemberdayaan Sumber Daya Manusia dapat dirumuskan dalam beberapa poin, sebagai berikut (Musyaddad, 2017):

a. **Prinsip kompetensi**

   Kompetensi sangat diperlukan bagi organisasi yang adaptif terhadap dinamika perubahan. Didalamnya menyangkut perubahan paradigma, orientasi, nilai, perilaku, struktur, tujuan yang berkinerja tinggi. Kompetensi bagi organisasi/ karyawan menjadi hal yang krusial tetapi sekaligus sebuah

keniscayaan dalam sistem manajemen, karena dengan kompetensi yang baik maka jaminan untuk pencapaian tujuan organisasi atau sebuah perkerjaan menjadi lebih besar. Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap level manajemen memiliki penekanan yang spesifik, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan organisasi.

Kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Ini adalah suatu pendekatan model input, yang fokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keterampilan-keterampilan ini adalah kompetensi dan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu.

Kompetensi dapat berupa penguasaan masalah, ketrampilan kognitif maupun ketrampilan perilaku, tujuan, perangai, konsep diri, sikap atau nilai. Setiap orang dapat diukur dengan jelas dan dapat ditunjukkan untuk membedakan perilaku unggul atau yang berprestasi rata-rata. Penguasaan masalah dan ketrampilan relatif mudah diajarkan, mengubah sikap dan perilaku relatif lebih sukar. Sedangkan mengubah tujuan dapat dilakukan tetapi prosesnya panjang, lama dan mahal. Prinsip kompetensi adalah prinsip utama dalam manajeman Islam. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh personal sebagai bagian dari organisasi atau bagian dari suatu proses kerja, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kompetensi yang dimaksud dapat berupa kompetensi kognitif, yakni kemampuan pengetahuan dan daya analisis, kompetensi sikap seperti

keberanian, kejujuran, dedikasi atau loyalitas, disiplin dan sebagainya, serta kompetensi keterampilan yang melingkupi kecakapan, ketepatan dan kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan.

b. **Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi.**
Prinsip kedua dari manajemen Islam adalah kompetensi yang dimiliki harus optimal dan melebihi kompetensi personal lain yang memiliki kompetensi yang sama. Langkah yang harus diambil oleh seorang manajer dalam menentukan sumber daya manusia yang akan diberdayakan dalam suatu mekanisme kerja adalah bahwa ketika seorang manajer dihadapkan pada adanya dua orang atau lebih dari anggota organisasi, maka seorang manajer harus mengutamakan seseorang yang memiliki kompetensi yang melebihi kompetensi yang dimiliki personal lain.

Manajemen yang baik adalah sistem manajemen yang memperhatikan efektifitas pekerjaan. Namun manajemen yang baik tidak hanya diukur dari seberapa efektifnya pekerjaan dilakukan, akan tetapi juga diukur dari seberapa efisien pekerjaan itu dapat dilakukan. Efisiensi dalam suatu mekanisme kerja tidak semata mata berpegang pada prinsip kompetensi. Suatu proses manajemen akan dikatakan berkinerja lebih baik apabila proses kerja dilakukan secara efisien. Efisiensi pekerjaan mensyaratkan kompetensi yang lebih baik.

c. **Prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan.**
Prinsip manajerial selanjutnya dalam Islam adalah prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja

dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekruitmen tenaga kerja. Kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan hanya akan menimbulkan kekacauan dan dapat mengancam kinerja organisasi dan dapat menimbulkan ancaman bagi pencapaian tujuan, bahkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) keberadaan organisasi. Oleh karena itu prinsip kesuaian kompetensi dengan kebutuhan menjadi sesuatu yang prinsip dalam sistem manajemen. Prinsip ini telah diajarkan nabi Muhammad kepada kita.

Melalui sejarah nabi kita dapat mengambil pelajaran tentang prinsip manajemen ini. Dalam upaya dakwah rasulullah, kita mengetahui bahwa ada empat orang sahabat utama yang menjadi pilar utama perjuangan dakwah nabi yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin abi Thalib. Keempat orang ini dikenal memiliki kompetensi yang berbeda, dan kesemuanya dibutuhkan dalam perjuangan dakwah Islam yang dilakukan nabi Muhammad. Abu Bakar dikenal dengan kompetensi sikapnya sebagai orang yang sabar dan bijaksana, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang memiliki kompetensi sikap yang tegas dan berani, Usman bin Affan dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan finansial dan memiliki kompetensi sikap yang dermawan. Ali bin abi Thalib dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas.

d. **Prinsip keterpercayaan**

Dalam surat al-Qashas 28:25 yang *artinya "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang*

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Bagi kebanyakan kaum muslim, ayat ini tidak bermakna apa apa kecuali sebatas kisah cerita. Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang agung, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menempuh kehidupan di dunia, tidak dipahami sebagaimana seharusnya sebagai petunjuk bagi manusia dalam menempuh kehidupannya di dunia, tidak dipahami sebagaimana seharusnya ia sebagai petunjuk, sehingga kaum muslim tidak dapat membangun peradabannya berdasarkan inspirasi petunjuk al-Qur'an.

e. **Prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan**

Dalam sebuah hadits yang sangat populer nabi bersabda: Artinya: *"Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/ pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalann/kehancuran) nya"*. Melalui hadits ini nabi Muhammad mengajarkan prinsip manajemen sumberdaya manusia kepada kita bahwa pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar *like and dislike*.

Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja. Penempatan orang sesuai dengan keahlian atau kompetensi kerja secara tepat merupakan kunci bagi penyelengaraan kerja. Kecerobohan dalam penempatan

seseorang dalam melaksanakan suatu kerja atau tugas akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang pimpinan atau manajer yang berpengalaman akan menempatkan seseorang sesuai kompetensinya sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

f. **Prinsip tidak melebihi batas kemampuan dalam pembebanan kerja**

Manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan, baik dari sisi fisik maupun psikisnya, dan juga dari sisi kompetensi dan daya tahannya, bahkan waktu yang dimilikinya. Sisi kemanusian ini harus mendapatkan perhatian oleh seorang pimpinan atau manajer dalam memberikan tugas kepada bawahannya. Kepercayaan manajer kepada kemampuan yang dimiliki seseorang harus diiringi dengan kesadaran bahwa seseorang itu tetap memiliki keterbatasan. Atas dasar kesadaran seperti ini maka seorang manajer harus membatasi diri untuk memberikan pekerjaan kepada orang yang dipercayanya memiliki kompetensi, agar tidak melebihi batas kemampuan orang itu.

g. **Prinsip kewenangan dan tanggung jawab**

Kewenangan dan tanggung-jawab adalah prinsip selanjutnya dalam manajemen Islam. Seseorang yang diberi tugas atau amanat untuk melakukan suatu tindakan atau kerja harus diberikan kewenangan dan tanggung-jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja

yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kewenangan dalam suatu sistem manajemen harus diberikan secara penuh dalam batasan wilayah kerjanya tanpa ada yang boleh melakukan intervensi, karena intervensi dari luar akan dapat menggangu mekanisme kerja dan bermuara pada tidak tercapainya hasil atau tujuan kerja yang diinginkan.

h. **Prinsip batasan kewenangan**

Rasulullah atau utusan Allah telah diingatkan oleh Allah akan adanya batasan kewenangan dalam tugas kerasulannya. Ayat di bawah ini menginformasikan kepada kita bahwa dalam tugas ilahiyah yang diemban nabi Muhammad memiliki batasan kewenangan. Nabi diingatkan bahwa kewenangann dirinya dalam dakwah hanyalah sebatas pemberi peringatan. Artinya: *"Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka (yang diberi peringatan* (al-Ghasiyah: 088, ayat 21)

Dalam ayat ini Allah jelas mengingat bahwa kewenangan Nabi Muhammad adalah hanya sebatas pemberi peringatan, beliau tidak diberi kekuasaan atas diri manusia. Maka dalam menjalankan tugasnya, nabi Muhammad tidak pernah melakukan pemaksaan kepada orang untuk beriman. Bahkan beliau tidak pernah merasa dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya dalam menjalankan dakwah. Setiap kewenangan dalam manajemen Islam memilki batas batasnya. Kesadaran akan batasan kewenangan ini harus dimiliki oleh setiap

individu dalam suatu sistem organisasi. Seorang pemimpin memiliki batas kewenangan atas orang yang dipimpinnya, karyawan memiliki batas kewenangan atas posisi dan tugasnya. Batasan kewenangan ini tidak boleh dilangkahi atau dilanggar. Pelanggaran atas batas kewenangan akan dapat merusak sistem organisasi, yang pada akhirnya membawa pada kegagalan dan bahkan kehancuran.

i. **Prinsip adanya penghargaan dan kompensasi**

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki dinamikanya sendiri. Keunikan manusia ini disebabkan karena manusia selain memiliki akal, ia juga memilki rasa dan keinginan. Secara naluriah manusia memilki keinginan untuk dapat merasakan kesenangan dan kenyamanan. Kesenangan dan kenyamanan ini dapat terpenuhi manakala manusia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Upah dan reward merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan ketidak sempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip penggajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja sehingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar.

Prinsip *more pay for more prestige* (upah lebih untuk prestasi lebih), dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan kelesuan dalam bekerja dan mungkin akan menimbulkan tindakan tidak disiplin.

BAB VI
INDIKATOR-INDIKATOR EKONOMI NEGARA ASEAN

PENDAHULUAN

Indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk (indikasi) atau perkiraan yang mewakili keadaan tersebut. Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. **ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)** adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Adapun tujuan ASEAN adalah sebagai berikut:

Tujuan dari ASEAN sendiri adalah:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN.
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara-negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB.
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
4. Membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset.
5. Berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi, dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya.
6. Meningkatkan studi terhadap Asia Tenggara.
7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang serupa, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat

   Asia Tenggara memiliki kultur yang beragam dan setiap negara menunjukkan identitasnya berdasarkan agama yang dianut.

Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dapat kita lihat profil perekonomian ASEAN sebagai berikut:

1. Luas wilayah 4.500.000 Km^2 (1.700.000 mil^2)

2. Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral dan tanaman pangan.
3. Jumlah penduduk di Asia Tenggara mencapai 668,61 juta jiwa hingga 31 Januari 2023. Angka tersebut setara 8,34% dari total penduduk dunia saat ini yang mencapai 8,01 juta jiwa.
4. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5% - 6% per tahun.

Masyarakat ASEAN adalah kesatuan bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup damai, stabil dan makmur, serta terikat bersama dalam kemitraaan pembangunan yang dinamis dan saling peduli. Pembentukan Masyarakat ASEAN dilatarbelakangi, antara lain, oleh adanya pengaruh negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1997. Hal itu mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Selain itu, pembentukan Masyarakat ASEAN didorong oleh timbulnya beberapa isu global yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN, seperti terorisme, perdagangan narkotika, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup. (*Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia*, n.d.)

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai tanggung jawab Negara dalam Ekonomi.

Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas kepemimpinannya." (HRMuslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan Iman yang Adil, No. Hadits:3408)

Aspek yang termuat dalam tulisan ini antara lain, Sistem Pemerintahan, Jumlah Penduduk, Mayoritas Agama, Mata Uang, Luas Wilayah, Hasil Utama, Laju Inflasi, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Penanaman Modal Asing Langsung, Indeks Modal Manusia, Indeks Harga Konsumen, Jumlah Pengangguran dan Jumlah Angkatan Kerja dari masing-masing negara di ASEAN.

A. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah hal yang mendasari negara. Dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Inilah yang membuat sistem pemerintahan sangat penting. Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Negara dengan pemerintahan republik artinya memiliki pemimpin yang berasal dari rakyat, seperti presiden dan perdana menteri.

Artinya, pimpinan tersebut bukan dari keturunan kerajaan atau bangsawan. Para negara ASEAN yang berbentuk republik ini memiliki perjalanan sejarah masing-masing. Ada yang mulanya berbentuk kerajaan sampai akhirnya berubah menjadi republik. Namun, ada juga yang begitu lepas dari penjajahan asing langsung membentuk republik. Kemerdekaan pun mereka dapat pada tahun yang berbeda-beda. Berikut negara ASEAN dengan bentuk sistem pemerintahannya.

No.	Negara	Bentuk Pemerintahan	Kepala Pemerintahan	Kepala Negara
1.	Indonesia	Republik	Presiden	Presiden
2.	Malaysia	Kerajaan	Perdana Menteri	Yang Dipertuan Agung
3.	Singapura	Republik	Perdana Menteri	Presiden
4.	Thailland	Kerajaan / Monarki	Perdana Menteri	Raja
5.	Filipina	Republik	Presiden	Presiden
6.	Brunei Darussalam	Kesultanan / Kerajaan Islam	Perdana Menteri	Sultan
7.	Vietnam	Republik	Perdana Menteri	Presiden
8.	Laos	Republik	Perdana Menteri	Presiden
9.	Myanmar	Republik	Perdana Menteri	Presiden
10.	Kamboja	Kerajaan	Perdana Menteri	Raja

(*Blog Archives - Laman 2 Dari 3 - Gramedia Literasi*, n.d.)

B. Jumlah Penduduk, Mayoritas Agama dan Mata Uang

Berikut negara ASEAN dengan jumlah penduduk, mayoritas agama dan mata uang.

No.	Negara	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Mayoritas Agama	Mata Uang
1.	Indonesia	273.523.615	Islam	Rupiah
2.	Malaysia	32.365.999	Islam	Ringgit
3.	Singapura	5.850.342	Budha	Dolar Singapura
4.	Thailland	69.799.978	Budha	Baht
5.	Filipina	109.581.078	Kristen	Peso
6.	Brunei Darussalam	437.479	Islam	Dolar Brunei
7.	Vietnam	97.338.579	Budha	Dong
8.	Laos	7.275.560	Budha	Kip
9.	Myanmar	54.409.800	Budha	Kyat
10.	Kamboja	16.718.965	Budha	Riel

(*Blog Archives - Laman 2 Dari 3 - Gramedia Literasi*, n.d.)

C. Luas Wilayah dan Hasil Utama

Luas daerah merupakan daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah negara baik itu wilayah daratan maupun lautan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi negara tersebut. Luas wilayah berakhir pada batas batas wilayah dengan kondisi fisik seperti sungai, gunung dan lain lain. Berikut negara ASEAN dengan luas wilayah dan hasil utamanya.

No.	Negara	Luas Wilayah (Km^2)	Hasil Utama
1.	Indonesia	1.905.000	Pertanian, Perkebunan, Minyak Bumi dan Gas Alam
2.	Malaysia	329.847	Timah, Karet dan Kelapa Sawit

No.	Negara	Luas Wilayah (Km^2)	Hasil Utama
3.	Singapura	728,6	Industri, Perdagangan,Pariwisata dan Jasa
4.	Thailland	513.120	Padi, Pariwisata dan Industri Pertambangan
5.	Filipina	300.000	Industri, Perdagangan dan Pertanian
6.	Brunei Darussalam	5.765	Industri, Perdagangan dan Pertanian
7.	Vietnam	331.210	Padi dan Batu bara
8.	Laos	236.800	Padi, Jagung, Kapas, Kopi dan Tembakau
9.	Myanmar	676.578	Padi, Kayu Jati, Jagung, Gandum dan Kapas
10.	Kamboja	181.035	Beras, Umbi-umbian, Jagung dan Tembakau

(*Blog Archives - Laman 2 Dari 3 - Gramedia Literasi*, n.d.)

D. Laju Inflasi (%)

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, hal tersebut menunjukan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Berikut negara ASEAN dengan laju inflasi pada tahun 2018 s.d. 2021.

No.	Negara	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1.	Indonesia	3.1	2.7	1.7	1.9	5.5	8,2
2.	Malaysia	0.3	1.0	-1.5	3.1	3.9	4,8
3.	Singapura	0.5	0.6	-0.1	3.7	6.6	6,8
4.	Thailland	0.8	0.4	-0.4	2.4	5.8	7
5.	Filipina	6.1	1.4	2.9	3.6	7.9	9,6

No.	Negara	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
6.	Brunei Darussalam	9.2	-3.3	-10.9	15.5	3,2	6,64
7.	Vietnam	3.5	2.8	3.2	1,8	3,4	5,64
8.	Laos	2.0	3.3	5.1	3.7	2,8	5,36
9.	Myanmar	6.9	8.8	3.8	4.8	11,4	13,08
10.	Kamboja	2.5	1.9	2.9	2.9	7,2	9,24

(*Bank Indonesia*, n.d.)

E. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) %

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari Produk Domestik Bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Berikut negara ASEAN dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1.	Indonesia	5.1	5.2	5	-2.1	3.7	5,4
2.	Malaysia	5.8	4.8	4.4	-5.5	3.1	7,4
3.	Singapura	4.7	3.7	1.1	-4.1	7.6	6,6
4.	Thailland	4.2	4.2	2.2	-6.2	1.5	3,6
5.	Filipina	6.9	6.3	6.1	-9.5	5.7	7,8
6.	Brunei Darussalam	1.3	0.1	3.9	1.1	-1.6	4,8
7.	Vietnam	6.9	7.5	7.4	2.9	2.6	11,4
8.	Laos	6.9	6.2	5.5	0.5	2.5	9
9.	Myanmar	5.8	6.4	6.8	3.2	-17.9	6,8
10.	Kamboja	7	7.5	7.1	-3.1	3	5,6

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

F. Penanaman Modal Asing Langsung (%) dari PDB

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berikut negara ASEAN dengan penanaman modal asing pada tahun 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1.	Indonesia	2	1.8	2.2	1.8	1.8	6,6
2.	Malaysia	2.9	2.3	2.5	1.2	5	6,2
3.	Singapura	28.9	21.5	29.7	21.6	26.6	31,6
4.	Thailland	1.8	2.7	1	-1	2.9	5,8
5.	Filipina	3.1	2.9	2.3	1.9	3.1	6,8
6.	Brunei Darussalam	3.9	3.8	2.8	4.7	1.5	10
7.	Vietnam	5	5	4.8	4.6	4.3	7,8
8.	Laos	9.9	7.5	4	5.1	5.7	10,4
9.	Myanmar	7.8	2.6	2.5	2.4	3.2	8,2
10.	Kamboja	12.6	13.1	13.5	14	12.9	17

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

G. Indeks Modal Manusia *(Human Capital Index – HCI)* Skala 0-1

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari Produk Domestik Bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Berikut negara ASEAN dengan indeks modal manusia pada tahun 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2020
1.	Indonesia	0.5	0.5	0.5
2.	Malaysia	0.6	0.6	0.6
3.	Singapura	0.9	0.9	0.9
4.	Thailland	0.6	0.6	0.6

No.	Negara	2017	2018	2020
5.	Filipina	0.5	0.5	0.5
6.	Brunei Darussalam	0.6	0.6	0.6
7.	Vietnam	0.7	0.7	0.7
8.	Laos	0.5	0.5	0.5
9.	Myanmar	0.5	0.5	0.5
10.	Kamboja	0.5	0.5	0.5

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

H. Indeks Harga Konsumen (IHK) % *(Consumer Price Index – CPI)*

Indeks harga konsumen (IHK) adalah Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut negara ASEAN dengan indeks harga konsumen (IHK) pada tahun 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1.	Indonesia	3.8	3.2	3	1.9	1.6	7,2
2.	Malaysia	3.9	0.9	0.7	-1.1	2.5	7
3.	Singapura	0.6	0.4	0.6	-0.2	2.3	4,6
4.	Thailland	0.7	1.1	0.7	-0.8	1.2	5,4
5.	Filipina	3.1	2.9	2.3	1.9	3.1	6,8
6.	Brunei Darussalam	-1.3	1	-0.4	1.9	1.7	5
7.	Vietnam	3.5	3.5	2.8	3.2	1.8	8

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
8.	Laos	0.8	2	3.3	5.1	3.8	6,6
9.	Myanmar	4.6	6.9	8.8	-	-	13,67
10.	Kamboja	2.9	2.5	1.9	2.9	2.9	10

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

I. Jumlah Pengangguran (% dari total angkatan kerja)

Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran merupakan sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut negara ASEAN dengan jumlah pengangguran pada tahun 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1.	Indonesia	3.8	4.4	3.6	4.3	3.8	9,2
2.	Malaysia	3.4	3.3	3.3	4.5	4	6,4
3.	Singapura	4.2	3.6	3.1	4.1	3.5	6,4
4.	Thailland	0.8	0.8	0.7	1.1	1	5,2
5.	Filipina	2.5	2.3	2.2	2.5	2.6	6,2
6.	Brunei Darussalam	9.3	8.7	6.9	7.4	7.4	12,8
7.	Vietnam	1.9	1.2	1.7	2.1	2.4	6
8.	Laos	3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	7,2
9.	Myanmar	1.4	0.8	0.4	1.5	-	5,75
10.	Kamboja	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	1,8

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

J. Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angkatan kerja merupakan penduduk yang usianya masuk ke dalam

kategori usia kerja, termasuk diantaranya yaitu penduduk yang sekarang ini sudah bekerja atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Secara umum, angkatan adalah sebutan untuk para penduduk yang sedang berada di usia produktif. Dalam hal tersebut, usia produktif kerja bisa diartikan sebagai semua orang yang sedang bekerja, masih mencari pekerjaan, atau belum memperoleh pekerjaan. Berikut adalah negara ASEAN dengan jumlah angkatan kerja 2017 s.d. 2021.

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1.	Indonesia	129.760	133.327	136.201	136.106	134.381	133.955
2.	Malaysia	31.975	32.399	32.804	33.199	33.573	32.790
3.	Singapura	3.474	3.471	3.527	3.511	3,418	2.797
4.	Thailland	39.798	40.229	39.952	40.206	40.332	40.103
5.	Filipina	42.974	43.800	45.091	42.419	44.857	43.828
6.	Brunei Darussalam	206.363	218.003	217.445	218.013	221.395	216.243
7.	Vietnam	54.999	55.246	55.877	54.751	55.034	55.181
8.	Laos	2.829	2.879	2.930	2.960	3.020	2.923
9.	Myanmar	24.004	24.412	23.943	24.060	-	24.104
10.	Kamboja	8.131	8.386	8.636	8.690	8.888	8.546

(*World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability*, n.d.)

BAB VII
MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan

negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam Islam Pemahaman pertumbuhan ekonomi dalam Islam dapat dieksplorasi dari beberapa ayat Al-Qur'an,

1. Q.S. Al Baqarah (2): 30, diantaranya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan [khalifah] di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

2. Q.S. Huud (11): 61

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya: *"Dan kepada Tsamud [Kami utus] saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi [tanah] dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat [rahmat-Nya] lagi memperkenankan [do'a hamba-Nya]."*

Setiap negara modern pada waktu tertentu, biasanya melakukan release target pertumbuhan ekonomi dan evaluasi atas pencapaian target perekonomian. Dalam evaluasi

diperlukan berbagai instrumen dan indikator agar dapat mengukur seberapa besar pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pemerintah dan masyarakat senantiasa berharap agar ekonomi negara dalam evaluasi tahunan selalu menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi suatu negara sedang dalam kondisi baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun.

A. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1996: 33) dikutip pada penelitian (Lincolin arsyad et al., 2017), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masayarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP)/ gross national product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. (Lincolin arsyad et al., 2017)

Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa; (1) Meningkatnya secara terusmenerus persediaan barang; (2) teknologi maju sebagai faktor utama

yang menentukan drajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga iovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. (Ibrahim, 2017)

Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Adisasmita, 2013)

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selajutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan kemerataan ekonomi (economic stability) melalui retribusi pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan teori ekonomi, perdagangan (ekspor dan impor) merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, disamping konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Secara historis, pertumbuhan ekonomi di 4 negara-negara maju sangat didukung oleh pertumbuhan ekspor sehingga negaranegara tersebut menguasai pangsa

ekspor dunia.

B. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut (Adisasmita, 2013):

1. Ketidakseimbangan Pendapatan
   Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratasi menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
2. Perubahan Struktur Perekonomian
   Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor petanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari exspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah

harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

3. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang stategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkambangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).
4. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
   Dalam hal ini "kemudahan" diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

5. Produk Domestik Regional Bruto

   Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan produksi

   PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

   - Pertanian
   - Pertambangan dan Penggalian
   - Industri Pengolahan
   - Listrik, gas, dan air bersih
   - Bangunan dan Konstruksi

- Perdagangan, hotel dan restoran
- Pengangkutan dan komunikasi
- Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- Jasa-jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari: (Ibid, hlm. 5)

- Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba).
- Konsumsi pemerintah.
- Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- Pembentukan stok 5) Ekspor netto (exspor dikurang impor).

c. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

C. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi modern adalah pertanda

penting di dalam kehidupan perekonomian. Prof. Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebangsanya. Dari keenam ciri itu, dua di antaranya yaitu kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional. Kita akan membahas satu persatu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. yaitu sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Per Kapita
   Pertumbuhan ekonomi modern, yang sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali untuk produksi.

   Professor Kuznets menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di tiga belas negara tidak termasuk Perancis, pada masa modern yaitu lebih tinggi daripada masa pra-modern. Kecuali Perancis yang pertumbuhan penduduknya sebesar 2,5 persen per dasawarsa, laju pertumbuhan penduduk bergerak di sekitar 6 sampai 7 persen untuk Inggris, Swedia, Jerman Barat, Jepang dan Belanda, serta 19-24 persen untuk Kanada, Amerika Serikat, dan Australia.
2. Peningkatan Produktivitas
   Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan

suatu efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini bisa dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata bisa menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Bahkan kendati dengan beberapa penyesuaian untuk menampung biaya dan input yang tersembunyi, pertumbuhan produktivita tetap bisa menjelaskan lebih dari separuh pertumbuhan dalam produk per kapita.

3. Laju Perubahan Struktural yang Tinggi
   Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum serta perubahan status kerja buruh.
4. Urbanisasi
   Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya adalah produk industrialisasi. Skala ekonomi yang muncul dalam usaha non agraris sebagai hasil perubahan teknologi mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan. Karena sarana teknis transportasi, komunikasi dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skala optimum. Semua proses ini memengaruhi

pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar peri kehidupan.

5. Ekspansi Negara Maju
   Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa yang lain. Hal ini sebagian besar diakibatkan perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu. Ketika ilmu dan pengetahuan modern mulai berkembang.
6. Arus Barang, Modal, dan Orang Antarbangsa
   Arus barang, modal, dan orang antarbangsa kian meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai Perang Dunia I tetapi mulai mundur pada perang dunia I dan berlanjut sampai akhir perang dunia II. Tapi demikian sejak awal tahun lima puluhan terjadilah peningkatan dalam arus barang, modal dan antarbangsa.

D. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber Investasi
   Pertumbuhan mensyaratkan adanya sumber-sumber investasi untuk meningkatkan produksi dari aset-aset fisik yang menghasilkan aliran pendapatan ke depan. Aset-aset fisik tersebut meliputi pabrik pabrik dan mesinmesin industri yang membantu terjadinya pertumbuhan produksi (Abidin, 2012). Proses pertumbuhan ekonomi meliputi mobilisasi sumber sumber yang memadai bagi investasi, konversinya ke dalam aset-aset fisik yang produktif, dan faktorfaktor lain. Ada dua sumber modal yaitu sumber domestik dan sumber dari luar. Berkaitan dengan sumber-sumber modal dari luar,

Islam melihat bahwa merupakan hal yang penting untuk mengadakan kerjasama dengan negaranegara Islam dari luar dan menghindarkan diri dari riba dalam pengelolaan keuangan dan membebaskan diri dari pengaruh perbudakan sosial budaya dan politik ekonomi Barat.

Beberapa potensi penting dari ekonomi Islam adalah bagaimana memobilisasikan sumber-sumber domestik untuk pertumbuhan ekonomi. Ada tiga aspek yang bisa dikemukakan di sini berkaitan dengan sumber-sumber domestik tersebut yaitu: potensi menabung; mobilisasi untuk menabung; alokasi dan pemanfaatan tabungan untuk pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)
   Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Manusia merupakan pelaku-pelaku yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pengumpulan modal, pembangunan sosial, ekonomi dan institusi-institusi politik yang menggiatkan proses pertumbuhan.
3. Jiwa Wiraswasta
   Jiwa wiraswasta merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh fungsi yang dinamis dari jiwa wiraswasta, dan fungsi dari jiwa wiraswasta ini adalah suatu inovasi. Walaupun menurut beberapa pendapat ekonomi yang lain - fungsi yang inovatif jiwa wiraswasta tersebut tidak begitu nampak dalam perusahaan-perusahaan negara dan dalam penafsiran yang lebih luas. Kontribusi mendasar dari jiwa wiraswasta dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi tidak bisa disanggah, karena perannya yang begitu vital.

Islam mendukung bertumbuh-kembangnya jiwa wiraswasta dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Islam memberikan motivasi positif kepada berbagai aktifitas kehidupan ekonomi dengan maksud untuk mendapatkan sumber penghidupan yang halal.

4. Kemajuan Teknologi
   Kemajuan teknologi memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan dalam teknologi menyebabkan bertambahnya produk yang dihasilkan oleh setiap satuan faktor satuan produksi atau input yang digunakan. Islam tidak menentang konsep kemajuan teknologi sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima dan dimanfaatkan, karena hal ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses teknologi. Ayat al-Qur'an membimbing manusia untuk menemukan dan mendapatkan hal-hal yang baru yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Penemuan-penemuan baru tersebut bisa digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang memang telah disediakan Allah bagi manusia untuk kesejahteraannya.

E. Faktor-faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

1. Korupsi. Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan tidakefisienan dalam pembelanjaan.
2. Laju inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap risiko kenaikan harga tinggi.
3. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi.

4. Kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan "multiplier effect" menyeluruh terhadap perekonomian.
5. Situasi keamanan yang tidak kondusif. Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya (investasi jangka pendek maupun jangka panjang) jika keamanan tidak stabil.

F. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Gross National Product (GNP). GNP didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP ini mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan ekonomi) selamak kurun waktu tertentu. (Siregar, 2018)

GNP = C + I + G (E – M) + Z11

Ket.:
C = Consumer Spending
I = Investement Spending
G = Output for Government
(E – M) = Net Export or Import
Z = Zakat

G. Produk Domestik Bruto

Masalah pertumbuhan ekonomi yakni masalah ekonomi

dalam jangka panjang. Hal tersebut seringkali dilihat dari kemampuan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pada dasarnya, mengukur pertumbuhan ekonomi bisa dengan produk domestik bruto sebagai tolak ukur.

Berikut ini alasan-alasan yang melatar belakangi produk domestik bruto dijadikan ukuran pertumbuhan ekonomi (Chang, 2021):

1. Produk domestik bruto adalah seluruh produksi dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan jumlah nilai tambah. Artinya, produk domestik bruto meningkat ditandai dengan kenaikan balas jasa terhadap faktor produksi.
2. Produk domestik bruto dihitung berdasarkan konsep aliran (flow concept). Menghitung produk domestik bruto dibatasi pada nilai produk pada kurun tertentu. Hitungan ini tidak berlaku pada nilai produk kurun 14 sebelumnya. Konsep aliran dimanfaatkan untuk membandingkan total output tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Perhitungan produk domestik bruto adalah sekedar negara saja.

Dengan seperti itu, kemungkinan kebijakan ekonomi oleh pemerintah yang membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bisa diperkirakan**.** Perekonomian dianggap tumbuh jika taraf kegiatan ekonomi kurun tertentu lebih tinggi dari kurun sebelumnya. Di samping itu, apabila total barang dan jasa secara fisik meningkat pada tahun-tahun selanjutnya hal ini mengakibatkan perkembangan baru dalam pertumbuhan ekonomi.

H. Teori Pertumbuhan Ekonomi oleh Harrord-Dommar

Teori ini dikemukakan oleh dua ahli ekonomi yakni Evesy Keynes dan R.F Dommar. Pertama kali teori ini

diutarakan Dommar pada tahun 1947 sebaliknya Harrord sudah mengutarakannya tahun 1939. Teori mereka mengenai pertumbuhan ekonomi punya esensi yang sama. Berdasarkan teori Harrord-Dommar bahwa demi mencapai pertumbuhan ekonomi dibutuhkan faktor utamanya adalah pembentukan modal.

Menurut analisinya terdapat syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian selalu steady growth dalam jangka panjang. Steady growth adalah pertumbuhan ekonomi yang mantap membutuhkan pembentukan modal sebagai syarat.

Menurut analisis Harrord-Dommar menerangkan jika barang modal sudah berkapasitas penuh, maka 15 pengeluaran agregat pada kurun tertentu dapat menyebabkan kapasitas barang modal menjadi naik pada tahun selanjutnya. Dengan maksut lain, modal yangdiberikan oleh investor dalam kurun tertentu bisa meningkatkan barang dan jasa yang dikeluarkan pada tahun selanjutnya yang akan membawa kapasitas barang modal akan bertambah.

Laju investasi mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kapasitas produksi meningkat jika laju investasi naik. Jadi, kenaikan laju investasi dapat menciptakan lowongan kerja dan pengangguran berkurang sehingga menambah pendapatan masyarakat.

I. Strategi Pertumbuhan Ekonomi

1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian
   Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian

memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sektor pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikkan pendapatan di sektor tersebut.

2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor
   Strategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.
3. Perlunya Disertifikasi
   Usaha mengadakan disertifikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya.

J. Aspek Hubungan Ekonomi Internasional dalam Pertumbuhan Ekonomi

1. Perluasan Perdagangan
   Negara-negara maju telah berkembang merupakan sumber atau penyuplai barang-barang kapital. Di samping itu

mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang. Penurunan harga di pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran internasional.

2. Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing
   Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sektor pemerintah maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufakturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan besar multinasional.
3. Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman
   Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.

K. Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia

tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen(Indonesia & Tumbuh, 2013). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Selama tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (c-to-c).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal

Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

L. Pendekatan Aksiologis Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi

Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah kue pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut. Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban.

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

M. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam

Islam memiliki beberapa karakteristik yang mencirikan

pertumbuhan ekonominya, antara lain:

1. Komprehensif
   Pertumbuhan ekonomi menuntut agar pertumbuhan ekonomi itu mengandung jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia secara sempurna, baik itu pangan, sandang, papan, buah-buahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hak atas pekerjaan, kebebasan beraktivitas, pengajaran agama, dan sebagainya, dimana Islam tidak dapat menerima pertumbuhan model kapasitas yang hanya mengutamakan kebebasan beraktivitas namun tidak menjamin adanya pemerataan.
2. Berimbang
   Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras, agama, karakternya untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. Posisi berimbang dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya keberimbangan usahausaha pertumbuhan.(Moch. Zainuddin, 2017)
3. Realistis
   Sifat realistis pada bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.
4. Keadilan
   Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia. Islam telah menjamin terwujudnya keadilan di antara manusia dalam usaha untuk memperbesar pemasukan dan distribusinya antara kaum muslim dengan golongan nonmuslim.
5. Bertanggung jawab
   Setiap individu memiliki tanggung jawab, masyarakat

memiliki tanggung jawab, dan negara juga memiliki tanggung jawab. Setiap manusia akan dimintai tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah.

6. Mencukupi
   Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia. Hal ini karena tujuan tanggung jawab itu bukan hanya kewajiban orang kaya terhadap golongan miskin, akan tetapi juga ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dalam masyarakat Islam.
7. Berfokus pada Manusia
   Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah manusia itu sendiri agar tidak diperbudak oleh materi sebagaimana dalam ekonomi kapitalis dan menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosialis, namun agar manusia memiliki kebebasan bertabur kemuliaan untuk memakmurkan dunia dan menghidupkannya dengan aktivitas penuh nilai guna. Islam hadir untuk menghilangkan karakter-karakter negatif dalam diri individu agar dapat menjadi manusia yang baik dan generasi saleh bagi masyarakat yang baik dan menjadi alat yang baik juga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

BAB VIII
HISTORITAS
EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Peraturan yang ada di Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam pengaplikasiannya, aturan-aturan ini dianggap sebagai petunjuk, pengarah, dan pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk aktivitas manusia dalam hal ekonomi. Seluruh aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar aktivitas perekonomian tidak luput pengaturannya dalam Al-Qur'an. Aktivitas ekonomi dalam agama Islam merupakan bagian dari muamalah. Jika diperhatikan lebih lanjut, muamalah termasuk ke dalam kategori ibadah 'ammah, yang memiliki pengertian tata aturan pelaksanaannya masih bersifat umum. Aturan-aturan yang masih bersifat umum tersebut oleh para ulama dirumuskan ke dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِى المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَ لِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Agama Islam tidak terlepas dari permasalahan ekonomi, sejak awal peradaban Islam ada, para khalifah atau pemimpin-pemimpin Islam merupakah seorang pedagang. Perdagangan

yang dilakukan oleh para pemimpin Islam dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 29:

لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Dalam ayat ini, Allah menambahkan, bahwa kegiatan ekonomi berupa perdagangan boleh dilakukan asalkan dengan keridhaan atau suka sama suka.

Ekonomi Islam merupakan pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan memiliki peran yang sangat vital, baik sebagai salah satu dari cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ekonomi pembangunan selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji sebagai sebuah ilmu maupun implementasi kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari peran ekonomi pembangunan sebagai indikator keberhasilan kegiatan ekonomi.

Dalam ekonomi pembangunan Islam tidak terlepas dari sejarah awal mula adanya kegiatan ekonomi yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Historitas ekonomi pembangunan Islam diawali pada masa Rasulullah, yang menjadi awal mula adanya ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu pada masa Khulafaurrasyidin (Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) dan dilanjutkan pada masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyah sampai pada masa sekarang atau masa ekonomi modern. Di dalam historitas ekonomi pembangunan Islam terdapat juga paradigma ekonomi di negara yang warga negaranya mayoritas muslim. Dalam buku ini akan membahas seperti apa dan bagaimana keadaan ekonomi pada masa

Rasulullah, Khulafaurrasyidin, masa dinasti hingga masa modern serta paradigma pembangunan ekonomi di negara mayoritas muslim.

A. Masa Rasulullah (571-632 M)

Pada masa sebelum kenabian, Mekkah merupakan sebuah titik pemberhentian perdagangan antara jalur utara (Syria) dan jalur selatan (Yaman). Selain membawa keuntungan ekonomi, Mekkah juga menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Hal ini memicu perkembangan ekonomi Mekkah yang selalu menjadi pusat persinggahan dan juga menjadi pusat ziarah. Sebagai pusat persinggahan, pada masa pra Islam, Mekkah menjadi pusat hiburan-hiburan terlarang seperti pelacuran, minuman keras dan perbudakan. Namun warga yang tidak tertarik dengan aktivitas perdagangan di dalam kota ini dapat melakukan perjalanan sendiri menuju pusat perdagangan di arah utara dan selatan.

Sebelum nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ia merupakan seorang pedagang dan ketika terpilihnya sebagai nabi menunjukkan pentingnya perdagangan bagi ajaran Islam. Kelahiran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad menghapus praktik-praktik hedonik yang berlangsung di Mekkah. Ka'bah yang semulanya berisi banyak berhala dibersihkan dari berhala-berhala tersebut dan umat Islam diseru untuk menyembah satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Hal ini membuat marah para pedagang konservatif yang kemudian mendorong umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini sebenarnya merupakan titik balik secara ekonomis, karena Madinah berada di jalur utara dan praktis memblokir jalur perdagangan dari Mekkah ke jalur tersebut. Mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah

berdagang, sebagian ada yang bertani, beternak, dan berkebun karena struktur tanah di Madinah sangat subur. Madinah yang awalnya terbelakang secara ekonomi kemudian menjadi kota yang makmur karena nabi Muhammad menyatukan para suku yang berkonflik di kota tersebut.

Rasulullah membangun masjid di kota Madinah untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Madinah (Ulum, 2008). Rasulullah menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Konstitusi ini disebut sebagai Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Dalam konstitusi ini, pemerintahan menegaskan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara baik muslim maupun non muslim, serta sistem pertanahan dan keamanan negara. Selain itu beliau juga membangun sejumlah peraturan terkait masalah perdagangan berdasarkan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan anti monopoli (Saifullah, 2016). Prinsip perdagangan bebas merupakan prinsip yang utama. Pemerintah dilarang turut campur dalam menentukan harga. Barang-barang yang diperdagangkan harus barang yang halal atau barang yang tidak diharamkan oleh Islam dan perolehan setiap orang harus didasarkan pada pekerjaannya sendiri.

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasan tertinggi hanyalah milik Allah. Dalam sebuah sistem ekonomi kaum-kaum muslimin sangat berkewajiban dalam mencari nafkah yang halal dengan cara Adil. Dan Rasulullah pun menganjurkan

dalam mencari nafkah yang baik yang mana melalui sebuah perniagaan jual beli. Proses perniagaan Rasulullah ialah dengan cara melarang kaumnya dalam mencari nafkah secara ilegal dan juga tidak bermoral. (Jayanti, 2021)

Lebih spesifik, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan al-Quran. Seluruh paradigma berpikir dibidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu segala jenis perekonomian dan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan al-Quran dihapuskan seperti praktek jual beli yang tidak jelas atau gharar, jual beli ribawi, hutang piutang ribawi, dan sebagainya. (Ulum, 2008)

1. Baitul Mal Pada Masa Rasulullah

Baitul Mal merupakan lembaga bisnis dan sosial pertama yang dibangun Rasulullah untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar, dimana dana umat baik yang bersumber dari sedekah, denda, zakat, jizyah, kharaj, fa'i, ghanimah dan lain sebagainya dikumpulkan melalui lembaga Baitul Mal. Zakat dan sedekah yang sudah diakui sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriyah hanya terdiri sebatas Zakat Fitrah. Sementara Zakat Maal masih bersifat sukarela dan baru efektif pada tahun kesembilan Hijriyah.

Sumber dana lain dari Baitul Mal terdiri dari harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris, harta benda alam yang memiliki manfaat seperti sumber mineral dan bahan tambang, harta wakaf, dan harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga.

Sumber pendapatan fa'i diperoleh dari harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Adapula sumber pendapatan negara yang berasal dari Wakaf berupa tanah pemberian seorang Rabbi dari suku bangsa Bani Nadhir yang telah masuk Islam. Rabbi tersebut memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah dan dijadikan tanah sedekah (Wakaf).

Sumber pendapatan Kharaj berupa pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan pada tahun ketujuh Hijriyah. Jumlah Kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Dikenal juga sumber pendapatan berupa 'Ushr yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang dinilainya lebih dari 200 dirham. Nilai besaran bea tarif yang dikenakan untuk kaum non-Muslim sebesar 5% dan Muslim sebesar 2,5%. Instrumen lainnya adalah Jizyah yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya Jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.

2. Wilayatul Hisbah Pada Masa Rasulullah

Wilayatul hisbah adalah lembaga pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah ekonomi lebih tepatnya dalam lapangan sosial secara umum guna mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Lestari et al., 2022). Secara umum wilayatul hisbah dikenal sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pasar. Seiring perkembangannya, wilayatul hisbah diberi wewenang utnuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya

tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-mawardi, kewenangan wilayatul hisbah ini tertuju kepada tiga hal: pertama, dakwaan terkait dengan kecurangan dan pengurangan timbangan atau takaran, kedua: dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran atau timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan terkait dengan penundaan pembayaran hutang, padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya hutangnya. (Amzah, 2012)

B. Masa Khulafaur Rasyidin

1. Abu Bakar As-Siddiq (632-634 M)

Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Beliau memerintah hingga akhir hayatnya selama kurang lebih 2 tahun. Pada hari pertama terpilih menjadi khalifah, ia langsung berencana melakukan tinjauan langsung ke pasar. Abu Bakar juga sangat dikenal dengan kehati-hatiannya, sehingga ia dikenal dengan khalifah yang Wara', bahkan pada hari kedua setelah dilantik menjadi khalifah beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan pribadinya. Pada awal kekhalifahannya, Abu Bakar dihadapkan pada situasi negara yang tidak kondusif. Salah satu kondisi yang harus dihadapi adalah terdapatnya kabilah-kabilah yang murtad dan adanya orang yang mengaku nabi (Musailamah al-Kadzab). Beliau mengambil tindakan yang tegas dengan mengirimkan pasukan ke beberapa daerah untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad tersebut.

Pencapaian Abu Bakar di bidang ekonomi mencakup pendirian Baitul Mal di kota Sanah yang terletak di pinggiran kota

Madinah. Namun pada masa kekuasaannya terjadi guncangan politik yang menyebabkan banyak suku yang awalnya setia dengan membayar zakat menolak untuk membayarnya. Abu Bakar menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Zakat digunakan untuk redistribusi pendapatan dalam rangka keadilan sosial dan ekonomi. Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu yang tidak lama. Bahkan, ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. (Ulum, 2008)

Menurut laporan dari Abu Yusuf, Khalifah Abu Bakar juga menerima sebagian pendapatan dari rampasan perang dan segera mendistribusikannya pada semua orang, anak kecil maupun dewasa, merdeka atau budak, laki-laki dan perempuan, dalam jumlah yang sama besar. Kebijakan Abu Bakar juga menunjukkan pentingnya pembangunan ekonomi. Dalam peperangan, abu bakar memerintahkan untuk tidak melakukan perusakan pada mata pencaharian penduduk lawan seperti lahan pertanian atau hak milik mereka. Kebijakan ini tampak memungkinkan harta rampasan perang yang besar sekaligus menjamin pembangunan ekonomi tidak banyak terganggu ketika terjadi pengalihan kekuasaan dari Islam sebagai penakluk terhadap kawasan yang dikuasai.

2. Umar Bin Khattab (634-644 M)

Umar bin Khatthab merupakan khalifah kedua bagi kaum muslimin dengan menggantikan Abu Bakar. Periode kekhalifahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah

Islam. Selama kurun waktu 10 tahun, Khalifah Umar bin Khattab berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga negara mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya.

Faktor yang mempengaruhi kesuksesan ekonomi masa Umar Bin Khattab adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka membayar.
b. Menghentikan pendistribusian zakat untuk salah satu asnaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena negara Islam telah kuat.
c. Melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya.
d. Memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah dibebaskan dari zakat.
e. Membentuk dewan-dewan, Baitul Mal, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem yang mampu menggerakan ekonomi, baik produksi maupun distribusi.
f. Umar tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada prajurit dan membiarkannya sebagai amanah.
g. Banyak kemenangan yang dicapai tentara muslim dan telah menghasilkan banyak harta rampasan yang secara signifikan menambah kekayaan negara.

Dalam pencapaiannya dibidang ekonomi, Khalifah Umar bin Khatthab membentuk Dewan Ekonomi dengan tugas sebagai berikut:

a. Mendirikan Baitul Maal, menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas,

mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan mengatur perjalanan pos.

b. Mengadakan dan menjalankan pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila serta pengawasan terhadap kebersihan jalan.
c. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum Muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (kharaj).
d. Melakukan reformasi hak penguasaan tanah dengar mencontoh Rasulullah pada waktu membagikan tanah di Khaibar.

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu:

a. Pendapatan zakat dan jizyah.
b. Pendapatan khums dan sedekah.
c. Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, ushr, dan sewa tanah.
d. Pendapatan lain-lain.

3. Usman Bin Affan (644-656 M)

Usman Bin Affan adalah khalifah ke tiga yang menggantikan Abu Bakar. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa selama enam tahun pertama pemerintahannya dilewati dengan baik, sementara enam tahun kedua terjadi banyak keguncangan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Pada masa ini, uang tembaga diperkenalkan sebagai pecahan dari uang dirham. Tidak ada perkembangan radikal dalam pembangunan ekonomi di masa ini. Pada masa enam tahun kedua pemerintahannya, terdapat beberapa kebijakan dari Utsman yang pada akhirnya

bermuara pada gejolak politik dan terbunuhnya sang Khalifah. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pemberian harta dari Baitul Mal kepada kerabatnya.
b. Pandangan bahwa sedekah adalah bukan merupakan sumber devisa dan pendapatan negara, sehingga beliau menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan lainnya.
c. Kebijakan memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara.
d. Kebijakan mengenai kepemilikan tanah, dimana Beliau menginginkan penduduk Arab untuk menjual harta fai dan menggantinya dengan kavling tanah yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tuan tanah yang memiliki tanah luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah. (Ulum, 2008)

Khalifah Utsman bin Affan menjalankan kebijakan ekonominya dengan melakukan beberapa penataan baru sebagai berikut:

a. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, dilakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan.
b. Membentuk armada laut kaum muslimin hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania dan berhasil membangun pelabuhan pertama negara Islam di semenanjung Syria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara.
c. Tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini bermuara pada terjadinya kesalahpahaman dengan Abdullah bin Irqam, bendahara Baitul Maal saat itu.

d. Mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarkat yang berbeda-beda.
e. Dalam hal pengelolalan zakat, pemilik harta diberikan keleluasaan untuk menaksir hartanya sendiri. Dibebaskan zakat atas harta terpendam.
f. Menaikkan dana pensiun sebesar 100-dirham dan memberikan ransum tambahan berupa pakaian. Memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk fakir miskin dan musafir.

4. Ali Bin Abi Thalib (656-661 M)

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir sebagai pengganti Usman bin Affan. Ia merupakan khalifah yang sangat berhati-hati. Khalifah Ali semasa melaksanakan amanah sebagai amirul mukminin sangat keras mengupayakan tegaknya *good governance*, salah satu tindakan yang segera diambil adalah memberhentikan pejabat korup, diantaranya dengan memenjarakan Gubernur Ray yang dianggapnya melakukan korupsi.

Pada masa ini adalah masa yang begitu sulit yang harus di jalani, dimana pada masa Ali ialah masa yang paling kritis berupa sebuah pertentangan antar sebuah kelompok. Diketahui pada masa Ali terdapat usaha untuk memberikan jaminan bagi individu pekerja negara mengenai kondisi ekonomi di masa krisis. Jaminan untuk tetap mendapatkan gaji ini tidak berlaku bagi pegawai swasta. Selain itu, ia juga menempatkan Baitul Mal pada fingsi yang sebelumnya yaitu sebagai tempat penyimpanan harta bagi kaum muslimin dan pengalokasian dana serta dibelanjakan secara keseluruhan untuk kemaslahatan umat. Terjadi banyak upaya pembangunan

ekonomi oleh khalifah Ali. Kebijakan perekonomian masa pemerintahan Ali adalah sebagai berikut:

a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat.
b. Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.
c. Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan.
d. Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.
e. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika merusak barang-barang pekerjaannya. (Ulum, 2008)

Diantara kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan sebuah pajak pada para pemilik hutan dengan jumlah 4000 dirham. Dan dalam hal ini ia juga mengizinkan kepada gubernur Kufah yaitu Ibnu Abbas untuk memungut zakat pada sayuran-sayuran yang dapat di gunakan sebagai bumbu masakan (Mudhiiah, 2015). Pada masa pemerintahan, ia juga memiliki sebuah prinsip bahwa pemerataan distribusi uang-uang rakyat harus sesuai juga dengan kapasitanya. Dalam hal ini sebuah sistem distribusi di lakukan sepekan sekali yaitu hanya di laksanakan di hari kamis. Pada hari tersebut harus terselesaikan semua urusan dalam perhitungannya karena pada hari sabtu sudah mulai dalam perhitungan baru.

C. Masa Dinasti

1. Dinasti Umayyah (661-750 M)

a. Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah

Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama pada masa dinasti Umayyah. Ketika dinasti terbentuk

dan diakui secara resmi, Muawiyah mengemban jabatan khalifah pada tahun 661 M. Masa ini terjadi setelah Hasan bin Ali (khalifah pengganti Ali) mengundurkan diri dari politik karena ia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Muawiyah dikenal sebagai politikus dan administrator yang pandai. Ia memiliki pemikiran yang perspektif dan inovatif, ia membuat beberapa kebijaksanaan dan perubahan dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam bidang ekonomi dan administrasi. (Farah, 2014)

Kekuasaan Dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun, dengan dipimpin oleh 14 khalifah. Khalifah-khalifah dari Dinasti Umayyah adalah sebagai berikut:

1. Muawiyah bin Abi Sufyan (661 M-679 M)
2. Yazid bin Muawiyah (679 M-683 M)
3. Muawiyah II bin Yazid (683 M)
4. Marwan, I bin Hakam (683 M-684 M)
5. Abdul Malik bin Marwan (684 M-705 M)
6. Al-Walid, I bin Abdul Malik (705 M-714 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (714 M-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (717 M-719 M)
9. Yazid II bin Abdul Malik (719 M-723 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik (723 M-742 M)
11. Al-Walid II bin Yazid II (742 M-743 M)
12. Yazid bin Walid bin Malik (743 M)
13. Ibrahim bin al-Walid II (743 M-744 M)
14. Marwan II bin Muhammad (744 M-750 M). (Saprida et al., 2021)

b. Keadaan Ekonomi Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa Walid bin Abdul Malik, rumah ibadah, pusat pendidikan, infrastruktur, dan pertanian dibangun serta

diperbaiki, kemudian program jaminan sosial dibuat untuk melindungi orang miskin dari meminta-minta. Selain itu, pada masa ini banyak dibangun monumen-monumen besar. Dalam pembangunan besar-besaran ini, walaupun negara mendapatkan banyak uang dari penaklukan hingga ke Afrika Utara dan Semenanjung Iberia, pemerintah masih harus menerapkan banyak jenis pajak. Pajak perdagangan diberlakukan di Madinah. Pada akhir pemerintahan Umayyah, jumlah pajak yang harus ditanggung warga negara dirasa sudah terlalu besar.

Selanjutmya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau termasuk khalifah besar yang berusaha agar lebih spiritualis dibanding khalifah Umayyah sebelumnya. Ia berusaha memberlakukan kembali perdagangan bebas dengan argument jika lautan dan daratan adalah milik Allah dan negara tidak boleh menghalangi umat dalam berdagang. Hal ini ditandai dengan dihapusnya bea cukai. Walau begitu, beberapa negara lain memberlakukan pajak bagi ekspor dari negara Islam sehingga Umar menarik kembali kebijakan tersebut dengan memberlakukan pajak. Pajak ini dinamakan ushr dan besarnya 10% dari barang impor. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz juga melakukan pembedaan antara jizyah dan kharaj (pajak tanah). (Nurul Huda, 2015)

c. Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Dinasti Umayyah

Pada masa Dinasti Umayyah, sumber pendapatan negara berasal dari zakat dan shadaqah. Zakat dan shadaqah dibagi berdasarkan delapan ashnaf (golongan), kemudian ditetapkan oleh hakim atau qadhi dari Bani Umayyah siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan masa khulaurrasyidin. Kecuali pada masa khalifah Umar bin

Abdul Aziz dimana seseorang tidak akan dihukum ketika tidak membayar zakat mal. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi sultan dan keluarganya. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemui berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Mal tersebut.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijakannya, lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Beliau mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi bea cukai (usr'), kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan musafir, dan menyantuni fakir miskin. (Ruslan & Marasabessy, 2017)

2. Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)

a. Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyyah, umat Islam berada di puncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia pada saat itu. Pada masa ini, lahir berbagai ilmu pengetahuan Islam, antara lain filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, matematika, dan sebagainya, dan juga telah diterjemahkan ilmu-ilmu penting ke dalam Bahasa Arab (Farah, 2014). Pada masa ini, sistem pemerintahan yang diterapkan setiap periode selalu berbeda sesuai dengan keadaan politik, sosial, dan budaya. Dari

perubahan tersebut, maka para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi lima periode, yaitu:

1. Periode pertama (750 M-847 M) disebut periode pengaruh Persia Pertama.
2. Periode kedua (847 M-945 M) disebut periode pengaruh Turki Pertama.
3. Periode ketiga (945 M-1105 M) disebut periode pengaruh Persia Kedua.
4. Periode keempat (1105 M-1195 M) masa kekuasaan Dinasti Saljuk yang biasa disebut dengan masa pengaruh Turki Kedua.
5. Periode kelima 1194 M-1258 M) masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain tetapi kekuasaan hanya efektif di Baghdad. (Saprida et al., 2021)

Pada masa Dinasti Abasiyah terjadi beberapa kali pergantian khalifah. Pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah terjadi pada 10 khalifah. Kesepuluh khalifah tersebut adalah:

1. As-Saffah (750 M)
2. Al-Manshur (754 M)
3. Al-Mahdi (775)
4. Al-Hadi (785 M)
5. Ar-Rasyid (786 M)
6. Al-Amin (809 M)
7. Al-Ma'mun (813 M)
8. Al-Mu'tashim (833 M)
9. Al-Watsiq (842 M)
10. Al-Mutawakkil (847 M) (Saprida et al., 2021)

b. Keadaan Ekonomi Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada masa awal pemerintahan Bani Abbasiyyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil yang

ditandai dengan devisa negara berlimpah serta pendapatan lebih banyak dari pengeluaran. Keuangan nasional membengkak melebihi dari anggaran belanja negara. Khalifah al-Mansur merupakan tokoh ekonom masa Abbasiyyah yang mampu meletakkan dasar-dasar kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan al-Mansur dalam menguatkan dasar Bani Abbasiyyah dengan kemampuannya dalam berpikir, disiplin, dan adil sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam pada saat itu.

Pada saat khalifah al-Mansur meninggal dunia setelah memerintah selama 22 tahun, kas negara pada saat itu sebanyak 810.000.000 dirham. Sedangkan pada Khalifah Harun al-Rasyid meninggalkan kas negara sebanyak 900.000.000 dirham. Kemampuan Harun dalam menggunakan anggaran belanja negara sama dengan yang dilakukan oleh al-Mansur, hanya saja Harun lebih banyak mengeluarkan dibanding dengan al-Mansur, mungkin dikarenakan tuntutan zaman yang berbeda.

Pada masa awal Abbasiyyah, semua khalifah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan meliputi:

1. Sektor Pertanian

   Pada sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukan adalah memperlakukan ahl zimmah dan mawali dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berperilaku kejam pada para petani, memperluas daerah-daerah di beberapa wilayah

negara, membangun sarana yang menghubungkan ke daerah-daerah pertanian baik darat maupun air, membangun beberapa bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak mendapat irigasi.

2. Sektor Perindustrian

   Pada masa Abbasiyyah, tempat perindustrian dibangun hampir di seluruh wilayah. Perindustrian terbesar yaitu pada sektor pertambangan yang meliputi tambang perak, tembaga, seng, dan besi yang dihasilkan dari tambang-tambang di Persia dan Khurasan. Dekat Beirut terdapat beberapa tambang besi, seperti halnya marmer di Tibris. Di Asia barat terdapat pabrik-pabrik seperti pabrik permadani, sutera, katun, wol, brokat (baju perempuan), sofa, dan lain-lain. Dengan dibangun banyaknya tempat industri, maka perekonomian maju dan tiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Bashrah terkenal dengan industri sabun dan gelas, Kufah dengan industri sutera, Khuzastan dengan tekstil sutera bersulam, Damaskus dengan kemeja sutera, Khurasan dengan selendang, wol, emas, dan peraknya, Syam dengan keramik dan gelas berwarna, Andalusia dengan kapal, kulit, dan senjata, Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai macam tempat industri.

3. Sektor Perdagangan

   Kota Baghdad selain menjadi kota politik, kota agama, dan kota kebudayaan, juga merupakan kota perdagangan terbesar di dunia pada saat itu. Sedangkan kota Damaskus merupakan kota perdagangan nomor dua. Sebagai pusat kota perdagangan transit bagi

kafilah-kafilah dagang dari Asia Kecil, dan daerah-daerah Furat yang menuju ke negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya.

Sungai Tigris dan Furat menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Terjadinya kontak perdagangan tingkat internasional ini semenjak masa Khalifah al-Mansur. Selain Baghdad dan Damaskus, juga terkenal sebagai kota dagang adalah Bashrah, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia. Pada saat itu terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk badan khusus yang bertugas mengawasi perdagangan, mengatur ukuran timbangan dan menentukan harga pasaran atau dengan kata lain mengatur politik harga. (Farah, 2014)

c. Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Dalam struktur dinasti Abbasiyah, zakat memiliki departemen sendiri yaitu departemen shadaqah. Sumber dana untuk pembangunan madrasah saat itu adalah lembaga wakaf. Wazir Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudarris, imam dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa serta fasilitas asrama. Pemasukan yang diperoleh pemerintah pada saat itu yang digunakan untuk membiayai program-program dan pembangunan diperoleh dari zakat, kharaj, dan jizyah.

Pada masa Al-Makmur terdapat berbagai jenis pajak. Dikarenakan semakin luas wilayah kekuasaan Al-Makmur dan muncul berbagai jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai objek pajak bagi pemasukan atau pendapatan

pemerintah. Pajak-pajak resmi yang terdapat pada masa Al-Makmun antara lain sedekah (termasuk zakat), Jizyah, Kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk. Pendapatan terbesar dari semua jenis pajak tersebut adalah Kharaj.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai solusi pengentasan kemiskinan di negaranya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negaranya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negaranya. (Ruslan & Marasabessy, 2017)

3. Dinasti Utsmaniyah (1281-1924 M)

a. **Sejarah Berdirinya Dinasti Utsmaniyah**

Pendiri Kerajaan Usmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz dari daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kurang lebih tiga abad, mereka pindah ke Turkistan kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan dan serangan Mongol pada abad ke-13 M, mereka melarikan diri ke daerah barat untuk mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertoghrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II atau Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan

mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan dan kemudian memberikan hadiah sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus mengembangkan wilayah barunya dan memilih Kota Syuhud sebagai ibukota. (Saprida et al., 2021)

b. **Keadaan Ekonomi Pada Masa Dinasti Utsmaniyah**

Ahli sejarah menyatakan bahwa pada masa Khalifah Sulaiman al-Qanuni merupakan kejayaan dan kebesaran Kerajaan Turki Utsmani, hal ini dibuktikan bahwa pada masa Kesultanan Sulaiman Al Qanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh negara-negara eropa khususnya bidang militer, politik, dan keilmuan. Kerajaan Turki Utsmani pada saat itu memiliki beberapa kemajuan yang telah berhasil diraih, diantaranya:

1. Pemerintahan, Militer, dan Maritim

   Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat serta kekuatan militer lebih diperhatikan ketika terjadi kontak senjata dengan negara Eropa. Kerajaan Turki Utsmani selain mementingkan militer dan kekuatan yang terbukti mampu menguasai wilayah yang sangat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Peradaban pada masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan, terbukti dari pesatnya kemajuan peraban saat itu. Pada masa itu pula terlahir banyak ilmuan-ilmuan ternama.
2. Bidang Pendidikan serta Ilmu Pengetahuan Teknologi

   Pada masa kerajaan Turki utsmani terjadi transformasi pendidikan, pada saat itu didirikan sekolah, perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Selain itu juga muncul sastrawan yang menyelesaikan studi di luar negeri. Sepanjang masa kesultanan Utsamani masyarakat berusaha

membangun perpustakaan.

3. Bidang Seni dan Kebudayaan
   Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang maju dengan pesat pada masa itu. Banyak tokoh penting yang muncul pada bidang kebudayaan. Selain itu banyak juga yang berfokus pada pengembangan seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, seni musik dan pertunjukan.
4. Bidang Keagamaan
   Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang kedudukan tinggi dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada masa kerajaan Turki Utsmani warga non muslim wajib mematuhi hukum kesultanan yang telah ditetapkan, namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. (Uliyah, 2021)

c. **Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Dinasti Utsmaniyah**

Kesultanan Turki Utsmaniyah mengalami kemajuan ekonomi melalui perdagangan. Pada masa Dinasti Utsmani, pengurangan bahkan pembebasan jizyah diperluas menurut kepentingan dan pertimbangan pemerintah Islam. Pembebasan tersebut diperluas kepada:

a. Ahl zhimmi yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah benteng pertahanan.
b. Mereka yang bertugas sebagai penunjuk jalan bagi ekspedisi pasukan Turki di gunung-gunung.
c. Mereka yang menjadi pemasok sulfur (belerang) untuk pabrik mesiu yang terdapat di Salonika (pabrik ini memasok persenjataan untuk kerajaan).
d. Keluarga dari anak-anak kaum ahl zhimmi yang

direkrut sebagai anggota pasukan elit Turki yang dikenal sebagai Jenissery.

Selain kelompok yang dibebaskan dari jizyah diatas, pada masa ini juga diberikan dispensasi atau pengurangan jizyah kepada orang-orang tertentu, antara lain:

a. Mereka yang tinggal di provinsi perbatasan. Misalnya Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro hanya membayar jizyah dalam jumlah terendah (adna al-jizyah)
b. Pada masa perang, ahl zhimmi yang tinggal di sekitar wilayah operasi atau wilayahnya dilintasi tantara, hanya membayar jizyah seperduanya.
c. Ahl zhimmi yang terpaksa meninggalkan rumahnya akibat invasi musuh, dibebaskan dari jizyah untuk waktu tertentu. Ahl zhimmi yang berprofesi sebagai pekerja tambang pada daerah tertentu hanya membayar jizyah dalam jumlah terendah. (HT & Nur, 2022)

E. Masa Ekonomi Modern

Dalam konteks pemikiran Islam modern, pembaharuan merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Sumber-sumber pokok ajaran Islam sudah cukup mendorong dan memberi semangat kepada kaum muslimin, khususnya para pemikir untuk senantiasa melakukan upaya-upaya pembaharuan atau modernisasi. Al-Qur'an memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi umatnya untuk mengembangkan berbagai konsep baru melalui reinterprestasi dan rekontekstualisasi secara terus menerus sesuai dengan tuntutan zaman, perubahan sosial dan teknologi. (M. Amin, 2017)

Tokoh Pemikir Ekonomi Modern

1. Umer Chapra

M. Umer Chapra merupakan seorang ekonom yang lahir di Pakistan, pada 1 Februari 1933 Pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi yaitu suatu perpaduan ilmu yang unik dari pengetahuan Timur dan Barat. Chapra menawarkan konsep-konsep baru bagi negara-negara muslim untuk berkembang agar lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Karena moral yang baik dari para pelaku ekonomi akan mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi. Chapra mengusulkan pentingnya penjagaan perbankan syariah terhadap kepentingan *stakeholder* dan keuntungannya, guna menunjukkan kredibilitas dan etos kerja yang baik. Apabila lembaga keuangan Islam mampu memberikan pelayanan dan menunjukkan kinerja yang baik dan dapat diandalkan, maka akan berkembang semakin pesat di seluruh penjuru dunia.

Keunggulan dari pemikiran Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi barat dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kekuranganannya terletak pada sikap toleran terhadap instrumen-instrumen keuangan barat. Sikap tersebut merupakan dampak dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. (Inayati, 2013)

2. Monzer Kahf

Monzer Kahf adalah pakar ekonomi Islam modern yang pemikirannya banyak digunakan saat ini. Beliau memperkenalkan konsep konsumsi dalam Islam seharusnya

sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri. Dengan begitu maka akan tercipta kemaslahatan yang merata. Dasar pemikiran Monzer Kahf adalah al-Qur'an dan Hadits, dasar inilah yang menjadikan beliau menawarkan kepada masyarakat muslim agar dalam kegiatan ekonomi negara sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan Hadits.

Monzer Kahf memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Beliau menjelaskan teori ekonomi Islam dengan terperinci. Dalam hal ini beliau mengemukakan bahwa pemerintah wajib menjaga kenyamanan dan kemashlahatan masyarakatnya. Kemudian pemikiran beliau banyak menjelaskan pentingnya zakat dari beberapa aspek ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Pemikiran beliau menitik beratkan kepada zakat dalam berbagai bentuk supaya suatu negara memiliki kesejahteraan dengan terpenuhnya kebutuhan kehidupannya. (Anwar et al., 2022).

3. Adiwarman Karim

Adiwarman Karim lahir di Jakarta pada 29 Juni 1963. Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Kontribusi Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuk sebagai anggota Dewan Syariah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Menurut Adiwarman Karim, ekonomi Islam diibaratkan satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Adiwarman memiliki pendapat yaitu pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah tauhid

(keesaan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian) dan ma'ad (return).

Adiwarman Karim dalam bukunya "Ekonomi Mikro Islam" mengembangkan pemikiran Monzer Kahf tentang konsumsi sehingga terbentuklah beberapa instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi meliputi zakat, infak, shadakah, dan pendapatan bagi hasil. Tanpa adanya instrumen dalam ekonomi Islam maka akan memperngaruhi perilaku konsumsi, yang dirumuskan dengan **Y=(C+Infak) + Saving**. (Firda Zulfa, 2015)

F. Paradigma Ekonomi di Negara Mayoritas Muslim

Mayoritas negara muslim adalah negara yang sedang berkembang dan masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi. Problematika yang terjadi di negara tersebut antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, utang luar negeri, inflasi, defisit neraca perdagangan dan pembayaran, serta depresiasi mata uang domestik. Permasalahan pembangunan ekonomi terutama terkait kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia, baik di negara dengan penduduknya mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal tersebut menjadi fakta yang menunjukkan bahwa agama Islam identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai permasalahan besar ekonomi tersebut, bukan hanya terjadi di negara terbelakang dan sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara yang dianggap maju secara material. Permasalahan tersebut sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi pembangunan konvensional sehingga penting mencari solusi alternatif dalam

pembangunan ekonomi. Syariat Islam menawarkan solusi mengatasi permasalahan ekonomi secara berkeadilan. (Mahri et al., 2021)

BAB IX
EKONOMI POLITIK ISLAM

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam sedang dalam posisi berkembang maju, hal ini dimulai dengan muncul beberapa lembaga keuangan syariah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Diantara karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu munculnya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis yang Islami. Sehingga sistem yang ada pada ekonomi Islam terdapat kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami pula.

Agama Islam sebagai agama universal dan komprehensif serta berlaku sepanjang zaman. Universal dalam artian berlaku untuk kehidupan manusia, komprehensif artinya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta semata, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia beserta mahkluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu Islam sangat lekat dengan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan sosialnya masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh syariat Islam, termasuk sistem ekonomi dan politik di Indonesia.

Sistem ekonomi politik Islam memberikan kesempatan seluas-luasya kepada pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi. Salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia adalah lembaga ekonomi masyarakat yang dikembangkan

dan berkembang adalah koperasi sebagai badan usaha rakyat, dan seiring berjalannya waktu praktik-praktik ekonomi Islam semakin nampak secara nyata, berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi salah satu bukti empiris akan praktik ekonomi Islam di bumi Indonesia.

Landasan ekonomi politik Islam tertulis dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Agama, n.d.).*

Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari ayat ini, di antaranya adalah:

1. Jika ekonomi negara terus tumbuh dan berkembang, itu telah berhasil.
2. Pemerintah harus bekerja untuk mendefinisikan kembali kerangka ekonomi input-output negara sehingga yang pertama lebih besar dari yang terakhir.

Dua hal ini disimpulkan dari ayat di atas, yang menggambarkan orang-orang yang menolak satu hal (pengeluaran), yang berarti bahwa jumlah penolakan akan meningkat menjadi 700 kali jumlah pengeluaran asli. Akibatnya, jika ekonomi suatu negara tumbuh lebih atau kurang dari sebelumnya, perekonomianya kemungkinan akan mengalami penurunan karena ekonomi selalu dalam keadaan aliran.

Selain itu, terdapat pula pada Q.S. Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

> Artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Agama, n.d.)*

Kemudian, dalam hubungannya dengan dua prinsip yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat saat ini memberikan bukti bahwa suatu negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu mencapai prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas. Ayat ini secara tidak lasung menjelaskan tentang betapa pentingnya peran dan partisipasi warga negara untuk mewujudkan perekonomian negara yang maju. Karena jika kebijakan yang dilakukan pemerintah menimbulkan dampak negatif terhadap warganya, maka hal itu akan menyebabkan rasa kecewa sehingga warga tidak mau berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

A. Definisi Ekonomi Politik Islam

Martin Staniland mendefiniskan ekonomi politik sebagai *A study of Social Theory and Underdevelopment* (sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan). Lebih lanjut Staniland mendefiniskan ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Menurut Rachbini, ekonomi dan politik adalah dua bidang studi yang saling terkait yang dapat digunakan untuk menganalisis bidang ilmu sosial lainnya yang relevan dengan

isu-isu dalam ekonomi dan ilmu politik. Politik dan ekonomi telah berevolusi dari berbagai perspektif untuk memahami sinergi dan mendorong pollinasi lintas yang tidak selalu mungkin dalam satu bidang tertentu ekonomi atau politik saja (Farina, 2022). Hubungan yang melibatkan masalah ekonomi dan politik dapat disebut sebagai hubungan yang melibatkan kekayaan dan kekuasaan dalam studi politik sebagai orang luar. Selain memiliki hubungan yang jelas dengan isu-isu ekonomi, hubungan politik juga ada antara prediksi dan distribusi kekayaan. (richard oliver (dalam Zeithml., 2021).

Dalam kinerja ekonomi kapitalisme dan Islam, terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan ini berasal dari sudut pandang yang memiliki tujuan yang berbeda untuk hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya pemenuhan kebutuhan material tanpa batas, maka munculah sikap pemenuh terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Hal lain tentang Islam adalah meskipun hal-hal material diperlukan, itu tidak mempromosikan ketidakadilan atau memperlakukan hal material sebagai tujuan akhir. Ini karena menurut ajaran Islam, orang tidak hanya akan melakukan kehidupan sehari-hari mereka di dunia tetapi juga di akhirat. Sejak awal, pernyataan di atas telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apakah itu sosial, politik, atau ekonomi.

Dalam Islam, satu-satunya karakteristik yang paling membedakan dari sistem ekonomi adalah keberadaan insentif untuk memperkuat etika bisnis Islam dan standar moral. Ada beberapa kebutuhan untuk mempromosikan etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Menurut filsafat Islam, lima pilar ekonomi Islam adalah tolong-menolong (al-ta'awun), toleransi, al-hurriyat, el-musawat, dan prinsip ibadah. (Farina, 2022).

B. Konsep Dasar Ekonomi Politik Islam

Sistem politik tidak hanya membentuk power relationship dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai yang mendasari apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat. Ilmu ekonomi politik merupakan sinergi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Dengan sudut pandang yang lebih positif diharapkan bahwa kajian tentang ekonomi politik akan membawa kita pada pemahaman bahwa bekerjanya suatu sistem ekonomi dan proses politik merupakan dua sisi dari satu sisi mata uang yang sama. Sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosogan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan sosial yang dalam penyelesainnya tidak dapat dilakukan hanya dengan ilmu ekonomi atau sistem ekonomi semata, namun diperlukan sinergi dari rumpun ilmu yang lain, contoh sederhana adalah dalam melihat tingkat kemiskinan, maka disana diperlukan juga ilmu matematika, apalagi ketika berbicara ekonomi Islam yang syarat dengan nilai-nilai serta norma-norma, maka sudah barang tentu memerlukan bidang ilmu lain selain ilmu ekonomi. Sehingga dalam melakukan kajian dan penyelesaian suatu masalah ekonomi dapat dilakukan sampai pada akarnya, ibarat mengobati penyakit, tidak hanya mengobati rasa sakitnya namun juga sumber dari penyakit tersebut. Secara tegas, maka diperlukan sinergi antara ekonomi Islam dan Politik Prespektif Islam.

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis Islami. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat

suatu keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang Islami. Prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar dalam penyelengaraan lembaga ekonomi Islam termasuk didalamnya lembaga keuangan ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis Islam terkait dengan proses dan mekanisme politik ekonomi Islam yang mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. (Aan Nasrullah, 2018)

C. Peran Ekonomi Politik Islam

Sistem ekonomi politik Islam merupakan seperangkat instrumen yang mengarahkan agar masyarakat berada dalam kehidupan falah (kemuliaan di dunia dan di akhirat). Hal ini sebagaimana maqashid syariah, namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi, seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dan sebagainya. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengarah pada penegakan ekonomi Islam, serta respon positif dari masyarakat, karena tanpa adanya respon yang positif dari masyarakat, maka kebijkan-kebijakan dari pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Dan dari beberapa literatur didapatkan bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar "sistem ekonomi tanpa bunga". Sistem ekonomi Islam jauh lebih luas dari itu, berlandaskan pada keadilan Islam yang universal, sistem ini mencakup dan menaungi aspek ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan runtuhnya komunisme dan kegagalan kronis kapitalisme dalam menyejahterakan sebagian besar umat manusia, sistem

ekonomi Islam bisa menjadi alternatif solusi guna mengatasi berbagai permasalahan serta kebuntuan ekonomi yang ada dewasa ini, sehingga penegakan ekonomi Islam secara kaffah di bumi Indonesia akan mampu menyelesaikan problematika ekonomi di Negeri ini, seperti ketimpangan, kemiskinan, lemahnya daya saing dan lain sebagainya.

D. Pergerakan dan Perkembangan Ekonomi Politik Islam di Indonesia

Dalam konteks ekonomi-politik, Indonesia lebih cenderung mengunakan pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur tangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk menunjang perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa produk hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma Islam. Berikut penjelasan kaitan ekonomi politik Islam di Indonesia secara periodik.

1. Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)
   Pada masa awal kemerdekaan, adanya ekonomi politik Islam sebenarnya sudah bisa kita telusuri dari pemikiran-pemikiran sang founding father bangsa ini, yakni M. Hatta. Dalam konsep sosialisme Indonesia atau sosialisme seligius, M. Hatta setidaknya meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yaitu:
   a. Pertama, Nilai Dasar Kepemilikian. Menurut Hatta: "Setiap orang boleh mempuyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Miliknya itu terjamin,

tidak boleh dirampas dengan semena-mena. Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan masyarkat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu".

b. Kedua, Nilai Dasar Keadilan. Konsep keadilan Hatta menuntut kesamaan di depan hukum, negara tidak boleh membedabedakan antara orang seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

c. Ketiga, Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan. Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial, yang artinya kehadiran seseorang dalam kehidupannya terkait dengan keberadaan dan kepentingan orang lain. Sehingga bagi Hatta masalah kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan salah satu prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Masa Orde Baru (1966-1998)

Sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekonomi kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Dalam pembangunan yang bercorak kapitalis inilah terselip westernisasi. Unsur westernisasi adalah suatu resiko yang sulit dihindari oleh Orde Baru dalam rangka modernisasi, sebagai langkah untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme.

Kebijakan dan keadaan politik ini dapat mempersempit atau bahkan tidak memberikan ruang gerak bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi. Umat Islam juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses dan berhubungan

lebih intensif dengan negara-negara muslim. Hal ini lebih disebabkan pada peta politik pemerintahan Orde Baru yang memandang Islam beserta ajaran-ajarannya sebagai ancaman.

Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia baru terlihat ketika berdiri bank yang dalam operasionalnya berlandaskan prinsip ekonomi Islam (sistem bagi hasil), pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan baru beroperasi pada 1 Mei 1992.21 BMI meskipun bank Islam pertama belum memakai nama bank syariah, karena sistem politik saat itu masih memandang Islam sebagai ancaraman. Dan jelas saja kelahiran BMI tersebut tidak didukung oleh peratutan perundangan yang memadai. Kemungkinan besar selain faktor politik, faktor tidak adanya payung hukum yang memadai BMI tidak mengunakan istilah bank Islam atau bank syariah.

3. Masa Reformasi (1998-2017)

Gelombang perubahan politik nasional yang terjadi pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru) mempunyai implikasi yang luas, salah satu diantaranya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Masa reformasi format politik yang digunakan yang tidak lagi *executive heavy* (atau bahkan dominan) seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu legislative heavy seperti pada masa orde lama atau masa Demokrasi Parlementer yang sudah menjadi stigma negatif.

Format politik pada masa reformasi tersebut

memberikan efek positif terhadap perkembangan politik ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya mendapat perhatian dalam bentuk kajian-kajian atau penelitian-penelitian semata, namun juga mendapat perhatian khusus dari pemerintahan dalam bentuk pengeluaran payung hukum, seperti UU, PP maupun pembentukan devisi dalam badan pemerintahan tertentu, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki Departemen Perbankan Syariah.

Perkembangan dari praktik ekonomi politik Islam di Indonesia, dapat dikatakan berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi Islam atau sering disebut ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya institusi maupun produk keuangan syariah. Ekonomi politik Islam dalam perkembangannya di Indonesia pada masa reformasi dapat kita lihat dari berbagai aspek.

a. Pertama, ekonomi Islam mendapat perhatian dari para akademisi dalam bentuk kajian. Meskipun kajian ekonomi Islam sudah dimulai sejak 1923, Haji Oemar Said Tjokroaminoto misalnya telah menulis buku Sosialisme Islam, dan beberapa akademisi lain. Namun kajian-kajian tentang ekonomi Islam tidak terpublikasikan dengan baik, dan tidak ditulis dalam artikel-artikel pendek sehingga terkesan diskursus ekonomi Islam terputus-putus.
b. Kedua, campur tangan pemerintah dalam bentuk penerbitan Payung Hukum dan pembentukan institusi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Campur tangan pemerintah secara aktif juga mendorong perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi syariah dan industri keuangan syariah. Pemerintah

secara aktif menerbitkan payung hukum terkait dengan pengembangan ekonomi Islam, khususnya keuangan syariah.

c. Ketiga, respon Positif dari Praktisi dan masyarakat. Sampai dengan November 2016, perkembangan industri dan keuangan syariah nasional di Indonesia mengalami pertumbuhan.

E. Ekonomi Politik dalam Lintasan Sejarah

1. Ekonomi Politik Pra Klasik

Politik dan ekonomi sudah menjadi topik kunci di era Yunani Kuno pada abad ke-14. Karena kemungkinan kekuasaan dari raja dan gereja ditransfer selama Revolusi Prancis, pedagang dan kaum saudagar periode lainnya waspada. Prinsip ekonomi pertama yang ada di suatu bangsa adalah merkantilis. Ada banyak cara untuk merusak ekonomi suatu negara, seperti menyediakan fasilitas industri baru, monopoli, dan praktik impor pajak. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengurangi kelebihan sehingga bangsa menjadi lebih maju. Dalam situasi sebaliknya, hanya sekelompok individu yang terlibat dalam kerja kolaboratif penguasa dapat mengakses campur tangan bangsa.

Undang-undang Fisiokrat menyatakan bahwa produk yang terbuat dari petani, peladang, dan hewan yang lemah dalam usaha tambang mereka adalah pahlawan kemakmuran. Petani harus membayar untuk barang-barang mahal dan pembohong dalam periode merchanttilistic. Kelompok Saudagar akan dirugikan oleh petani yang tidak dapat diandalkan, atau kaum. Ini adalah kasus Francois Quesnay, seorang pengasuh yang tiba terlambat yang akhirnya dipukuli di wajah pada 18

Juni. Menurut fisiokrat, kegiatan ekonomi tidak memerlukan regulasi pemerintah, dan tidak seharusnya ada monopoli atau pembatasan tentang bagaimana individu dapat melakukan bisnis. Pernyataan ini didasarkan pada analisis Adam Smith tentang prinsip laissez-faire/laissez-passer dalam analisis perdagangan bebas (richard oliver (dalam Zeithml., 2021).

2. Ekonomi Politik Klasik

Ekonomi politik klasik adalah pendekatan alatif yang tidak dapat dihindari memiliki bias turun yang lebih jelas. Pendekatan ekonomi politik klasik memiliki fokus perhatian bulkn hanya untuk meningkatkan kemakmuran, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan "siapa mendapat apa, kapan, bagaimana dan berapa banyak." Satu-satunya cara untuk memahami proposisi adalah melalui hubungan antara ekonomi dan dimensi sosial yang terkait. Ekonomi politik klasik adalah pendekatan dengan menggabungkan beberapa aspek lainnya.

Bertentangan dengan pemikiran neoklasik, teori ekonomi dan politik mempromosikan metodologi yang meningkatkan standar etika dan moral. Melalui penggunaan metode yang tidak praktis dan tidak rasional, kebijakan ekonomi diajarkan tidak hanya bagaimana membuat orang menjadi makmur, tetapi juga bagaimana meningkatkan kondisi hidup manusia. Ini lebih penting dalam hak asasi manusia, ekonom-politik klasik percaya bahwa hak-hak manusia tidak hanya dilanggar oleh prasangka rasial tetapi juga oleh filantrofi, moral, dan kelemahan etika. Namun, kebutuhan umat manusia melampaui kebutuhan mereka sendiri, dan juga termasuk rasa cemas sosial. Menurut kebijakan ekonomi, pasar bukanlah organisasi sosial yang paling penting. Banyak proses produksi

yang didukung oleh organisasi sosial lainnya, seperti keluarga dan birokasi. (Haryadi, 2010)

3. Ekonomi Politik Sosialis

Deliarnov menyatakan bahwa aspek yang paling ekstrovert dari masyarakat, seperti yang didefinisikan oleh konsep masyarakat sosialis, adalah kebersamaan. Semua masalah ekonomi diabaikan, ditangani, dan dikendalikan oleh negara. Menurut ekonomi politik, sosialisme adalah sistem yang bergantung pada kerjasama dan penggunaan metode produksi dan distribusi kooperatif. (richard oliver (dalam Zeithml., 2021)

4. Ekonomi Politik Neo-Klasik

Perkembangan ekonomi neo klasik dilatarbelakangi kesadaran akan peran gereja yang terlalu intervensi dan bahkan berlebihan terhadap kegiatan individu, sehingga dirasakan hilangnya kebebasan setiap individu pada masyarakat Eropa. Karena jika kondisi ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi individu, khususnya dalam konteks aktivitas individu, kemungkinan akan mengalami penyusutan dan, mungkin, pembunuhan kegiatan. Kebebasan menjadi ancaman dan sumber ketakutan bagi orang-orang Eropa saat ini. Setiap individu akan dapat memenuhi tujuan dan tujuan mereka, termasuk yang terkait dengan menyesuaikan tingkat kesejahteraan, jika ada resistensi terhadap intervensi yang diusulkan. Faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi neo-klasik adalah tekanan pada negara-negara untuk mengatasi masalah utang mereka. (Haryadi, 2010)

Teori ekonomi dan politik neoklasik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Pendekatan terpusat ke masyarakat atau strategi

berpusat masyarakat, yang lebih sering dikaitkan dengan penggunaan pasar politik oleh agen ekonomi.

2) Pendekatan terpusat ke negara atau strategi berpusat negara yang menempatkan lebih banyak penekanan pada penggunaan data ekonomi oleh aktor politik untuk tujuan politik.

F. Ekonomi Politik Islam Zaman Rasulullah

1. Peristiwa Fathu Makkah

Peristiwa Fathu Makkah, bermula saat adanya Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriyah. Inti dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan bahwa siapa saja boleh memilih untuk bergabung di kubu mana pun, baik kubu Nabi Muhammad maupun kubu kaum Quraisy Makkah. Suku Khuza'ah memutuskan untuk bergabung dengan kubu Nabi Muhammad dan suku Bakr memilih untuk bergabung dengan kubu kaum kafir Quraisy Makkah. Pada zaman jahiliyah, kedua suku tersebut punya riwayat terjadinya pertumpahan darah dan permusuhan. Namun, dengan adanya Perjanjian Hudaibiyah, kedua suku tersebut melakukan gencatan senjata.

2. Makna "Al-Fath" Sebagai Keterbukaan dan Kemenangan

Dalam konteks Fathu Makkah, Menurut Ibnu Âshûr, al-fath adalah pertolongan Allah yang dibarengi dengan memasuki kota atau negara yang telah terkalahkan dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam karena telah terbukanya pikiran dan hati kaum Quraisy dalam melihat kebenaran. Selain itu, bisa kita maknai bahwa sejatinya di manapun Islam masuk kota tertentu pasti membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan untuk menjajah akan

tetapi berusaha membangun peradaban yang Islami. Dan itu semua tidak lepas dari Anugerah dan pertolongan dari Allah. Inilah yang membedakan antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir ketika masuk dalam sebuah Negeri.

3. Makna Perdamaian Menuju Kemenangan

Tak disangka jika perjanjian damai itu memberikan keuntungan yang luar biasa bagi umat Islam yakni pengakuan kaum Quraisy terhadap keberadaan dan kesamaan kaum Muslimin dengan mereka, sehingga mereka harus berunding dan mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslimin yang dahulu selalu dimusuhi. Selain itu perjanjian damai itu memberikan peluang besar kaum Muslimin selain untuk beristirahat juga digunakan untuk mengerahkan pikiran dan segala potensinya hanya untuk membenahi diri dan menggiatkan Dakwah Islamiyah dengan cara yang aman dan damai.

Perjanjian damai tersebut juga memberikan kesempatan bagi kaum Muslimin dan Musyrikin untuk saling berhubungan dengan baik sehingga kaum Musyrikin yang terbuka hatinya dapat mempelajari ketinggian Islam, kehebatan sistem dan metode Islam dalam membina akhlak sekaligus juga menghilangkan segala permusuhan sesama bangsanya yang mempunyai kesamaan nasab, lingkungan dan bahasa. Kebijaksanaan untuk mengalah dan keinginan untuk berdamai yang ditunjukkan oleh Rosulullah dalam perjanjian damai tersebut mampu mengubah pandangan kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam. Mereka semakin segan dan hormat kepada Islam. Penghargaan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kelancaran penyiaran Islam itu sendiri yang mana Rasulullah Saw dan Kaum Muslimin belum pernah

mengira sedikitpun tentang besarnya faedah yang ditimbulkan dari adanya perjanjian damai tersebut.

Makna yang bisa kita ambil bagi kita sebagai warga Negara Indonesia yakni bagaimana kita sebagai umat Islam seharusnya mampu menunjukkan prilaku yang baik kepada semua orang, hal ini dalam rangka untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah Dan Ukhuwah Insaniyah, sehingga terwujudlah Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Konsep ukhuwah ini sejalan dengan surah al Hujurat ayat 10. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita dalam hidup bermasyarakat perlu untuk melakukan ishlah jika ada pertikaian dan permusuhan diantara kita. Akan tetapi, kata ishlah hendaknya tidak hanya dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang atau lebih yang berselisih, melainkan juga harus dipahami sesuai makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-Qur'an terhadapnya. (Hasbullah, 2022)

G. Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

1. Masa Abu Bakar As-Siddiq

Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas dalam mengumpulkan zakat dari semua umat Islam. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat

Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan.

2. Masa Umar bin Khattab

Awal mula pemerintahannya Umar mengikuti sistem Abu Bakar namun setelah kejadian beberapa aparatur negara yang bertindak sewenang-wenang, sehingga Umar mengubah tatanan sistem pemerintahannya. Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara dan Umar selaku khalifah merupakan orang yang berkuasa penuh atas Baitul Mal. Tetapi Umar tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin sedangkan khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan makanan untuk para janda, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, memberikan pembiayaan pemakaman orang-orang miskin, membayarkan hutang orang yang bangkrut.

Dalam pemenuhan distribusi harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen diantaranya:

1) Departemen Pelayanan Militer, yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang.

2) Depantemen Kehakiman dan Eksekutif, yaitu berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap pembayaran gaji yang ditentukan dari dua hal yakni jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama tetapi jika terdapat perbedaan hal tersebut tetap dalam batas-batas kewajaran.
3) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yaitu untuk mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
4) Departemen Jaminan Sosial yaitu berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.
5) Khalifah Umar membuat membentuk sistem diwan untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongan yang mana daftar itu disusun mulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, para sahabat yang ikut berperang dalam perang Ubud, para pejuang perang Gadisiyyah atau orang-orang yang mneghadiri perjanjian Hudaibiyah selanjutnya kaum wanita, anak-anak dan para budak.

Kebijakan Umar yang paling fenomenal tentang kebijakan ekonomi di Sawad (daerah subur) dimana Umar menyatakan jika orang Arab termasuk tentara dilarang melakukan transaksi jual beli tanah di luar Arab. Hal ini berlandaskan alasan bahwa mutu dari tentara Arab menurun, produksi menurun, negara mendapatkan kerugian 80% dari pendapatan, dan rakyat akan kehilangan mata pencaharian (sawah) yang menyebabkan mereka akan berontak terhadap Negara. Sehingga Umar

memberikan solusi untuk hal ini berupa gaji tetap kepada tentara dan pensiun semua sahabat Nabi. Lebih lanjut Umar juga menerapkan pajak perdagangan yang bernama ushr, kebijakan ini didasari setalah Umar mendapatkan laporan bahwa pedagang Arab yang datang ke Bizantium ditarik pajak 10% dari barang yang dijual maka melihat dampak positifnya khalifah Umar menerapkan sistem tersebut terhadap pedagang non-Muslim yang memasuki wilayah kekuasaan Islam.

3. Masa Usman bin Affan

Masa pemeritahan Usman bin Affan terbagi menjadi dua periode yakni:

1) Periode I pemerintahan Usman membawa kemajuan yang sangat luar biasa dimana peta Islam dan bendera Islam berkibar dari perbatasan Aljazair (Barqah Tripoli, Syprus di Front al-Maghrib). Usman juga berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di laut tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali dilaut dalam sejarah Islam.
2) Periode ke II kekuasaan Usman mulai mengalami kemunduran dengan segala persoalan sehingga menimbulkan kekacauan yang luar biasa sampai ia wafat. Usman dikatakan telah melakukan nepotisme dengan mengangkat sanak-saudaranya dalam jabatan-jabatan strategis yang mana banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah merasakan pahitnya kepemimpinan Usman. Para pejabat dan panglima banyak yang dipecat oleh Usman dan menggantikannya dari kalangan keluarganya sendiri yang tidak mampu dan tidak cakap sebagai pemimpin.
   Pengelolaan Baitul Mal, sumber pendapatannya berasal

dari Zakat, Ghanimah, Jizyah, Kharaj, dan Ushr. Adapun pengeluarannya dialokasikan pada gaji para Gubernur, gaji para tentara, kas umum untuk haji, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kemudian diperuntukkan dana pembuatan armada laut, dana pengalihan pantai dari Syuaibah ke Jeddah, dana pengeboran sumur, dana untuk para Muadzin, dan dana untuk tujuan-tujuan mulia Islam.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal Usman menerapkan prinsip keutamaan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Khalifah Usman mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian terkait dengan tanah negara yang pada masa Khalifah Umar sebagian lahan negara tersebut tidak dibagi-bagikan tetapi pada masa Usman beliau membuat kebijakan swastanisasi dengan membagi-bagikan tanah negara kepada individu dengan tujuan reklamasi dan sebagai tambahan pemasukan bagi Baitul Mal (Apriliya, 2021).

4. Masa Ali bin Abi Talib

Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali diantaranya:

1) Menetapkan pajak terhadap pada para pemilik hutan sebesar 4000 dirham.
2) Mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah untuk memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.
3) Mendistribusikan harta Baitul Mal dengan menggunakan prinsip pemerataan uang rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi ini diadakan setiap pekan sekali yang dilaksanakan di hari Kamis sebagai hari

pendistribusian atau hari pembayaran dan pada hari Sabtu dimulailah perhitungan baru.

4) Membentuk keamanan negara yakni Kepolisian yang terorganisasi secara resmi yang disebut Syurthah dan pemimpinnya disebut Shahibu al-Syuthah.
5) Mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang berbeda dengan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia dimana digunakan sebagai mata uang pada Khalifah Usman.

Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan terkait masalah administrasi umum dan masalah lain yang berhubungan dengannya disusun dengan rapi yang ia jelaskan dalam suatu surat yang ditujukan kepada Malik Ashter bin harits. Surat tersebut berisikan deskripsi tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi beserta staf-stafnya. Pada surat tersebut juga dikatakan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum, pendapatan pegawai administrasi dna pengadaan perbendaharaan. Lebih lanjut disebutkan tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang dan terakhir khalifah Ali menekankan kepada Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarganya dnegan mengadakan pertemuan secara langsung. (Farina, 2022b)

H. Peranan Partai Politik Islam di Indonesia

Ada beberapa partai politik di Indonesia yang berperan dalam politik Islam, salah satunya adalah PKS. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragamakan Islam melihat PKS

sebagai partai Islam terkuat saat itu di Indonesia. PKS sebagai sesebuah partai Islam yang besar memiliki peranan yang sangat dominan juga dalam pemerintahan. Hal ini dikeranakan sebagai salah satu partai Islam yang memilik banyak anggota memiliki sistem kaderisasi serta hubungan yang kuat di antara kader-kader partai untuk terus mengamati setiap isu yang ada di Indonesia serta berupaya turut serta dalam menyelesaikan isu yang ada tersebut.

Dalam konstitusi Indonesia partai politik memiliki peranan dalam pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Republik Indonesia. PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia juga harus menjalankan peranannya sebagai partai politik sesuai dengan aturan yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia.

Partai politik memiliki peranan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Upaya PKS dalam menjalankan peranannya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan ialah melalui Fraksi partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengarahkan Rancangan Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) haruslah dapat digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan hasil daripada kerja reses, yaitu dimana setiap anggota wakil rakyat turun ke daerah pemilihannya masing-masing untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat yang akan dipertimbangkan dalam prioritas penyusunan APBN setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah hasil penyaluran kewangan pemerintahan yang tepat

sasaran bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, PKS lebih menitikberatkan kepada anggaran pendidikan serta pembangunan sarana transportasi massal yang terintegrasi baik seperti kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. (Al & Tanjung, 2019)

BAB X
KEMISKINAN

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dan sulit dihindari oleh negara di seluruh dunia. Kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang tidak ada ujungnya bagi setiap negara yang ada di dunia. Kemiskinan pada sebuah negara sering terjadi karena terdapat kesenjangan ekonomi antar penduduk dan dapat meningkat jika jumlah penduduk tersebut padat atau naik. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.

Di Indonesia, kemiskinan juga menjadi sebuah persoalan yang belum terpecahkan. Sampai saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta jiwa, meningkat 0,20 juta jiwa dibandingkan dengan Maret 2022 dan menurun 0,14 juta jiwa dibandingkan September 2021. Persentase penduduk miskin perkotan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi7,53 persen. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk pemerintah agar melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan mengetaskan kemiskinan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Selain itu, masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Terlebih setelah adanya pandemi

yang menyebabkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sedikit melemah karena terbatas saat melakukan kegiatan, maka tidak dapat dipungkiri jika kemiskinan akan meningkat.

Di dalam Islam, ada dalil yang terkait dengan kemiskinan, diantaranya adalah:

1. Q.S. Al-Mudatsir ayat 44

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝

Artinya: "dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." (Q.S. Al-Mudatsir 74:44). Ayat ini menjelaskan bahwa mereka (orang yang terkena azab neraka) tidak termasuk golongan yang senantiasa berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan duafa. Padahal mereka dapat berbuat demikian karena berlebihnya nikmat dan rezeki Allah yang mereka peroleh. Mereka tidak mau meringankan kesulitan fakir-miskin dengan sedekah yang seharusnya mereka keluarkan. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menyantuni dna merawat kaum dhuafa dan perintah merawat orang miskin.

2. Q.S. Az-Zariyat Ayat 19

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: *"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (Q.S. Az-Zariyat: 19)***.** *Ayat ini menganjurkan agar kita Menginfakkan harta untuk kaum dhuafa dan itu bukan pemberian, melainkan kewajiban hartawan dan hak dhuafa.*

3. Q.S. Ar-Rum Ayat 38

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.*

Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS Ar-Rum 30: 38).

(Maka berikanlah kepada kerabat) kepada famili yang terdekat (akan haknya) yaitu dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu sabil) orang yang sedang musafir, yaitu dengan memberikan sedekah kepada mereka, perintah ini ditujukan kepada Nabi saw. dan sebagai umatnya diharuskan mengikuti jejaknya. (Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah) yakni pahala-Nya sebagai imbalan dari apa yang telah mereka kerjakan (dan mereka itulah orang-orang yang beruntung) yaitu orang-orang yang memperoleh keberuntungan.

4. Q.S. Al-An'am Ayat 141

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

Artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. Al-An'am 6: 141)*

A. Pengertian Kemiskinan

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah

situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

B. Kemiskinan dalam Prespektif Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah menggunakan istilah itu dalam firman-Nya *"atau orang miskin yang sangat fakir"* (Q.S. al-Balad [90]: 16). Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqru, berarti membutuhkan (al-ihtiyaaj). Allah berfirman: "*...lalu dia berdoa, "Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku"* (Q.S. al-Qashash [28]:24).

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Jika tolak ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolok ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolok ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolok ukur lain. Sebab, tolok ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. Adapun tolok ukur lain umumnya hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena

berbagai sebab struktural.

a. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam terdapat dalam surah Ar Ruum ayat 41.
b. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (Q.S. Ali Imran [3]: 180)
c. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagianmanusia yang lain, seperti memakan hartaorang lain dengan jalan yang batil (Q.S. AtTaubah [9]:34)
d. Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, danekonomi di satu tangan. Hal ini tergambardalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (Q.S. Al-Qashash [28]:1-88).
e. Kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam ataupeperangan sehingga negeri yang semulakaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (Q.S. Saba' [34]: 14-15) (Cantika, 2014)namely environmental damage due to human activity (Surah Ar Rum: 41

C. Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statisik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan adalah konsep Basic needs apporach atau disebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, berpedoman pada The World Bank yang disusun dalam Handbook on Poverty and Inequality. Metode ini digunakan oleh BPS sejak tahun 1998 dengan tujuan agar hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (*apple to apple*).

Dengan konsep ini, BPS berpendapat bahwa kemiskinan

sebagai ketidakmampuan yang diukur dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Sehingga disebutkan bahwa penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin menurut BPS terbagi menjadi dua bagian yaitu miskin dan tidak miskin. Jika dilihat rata-rata kemiskinan semakin mendekati angka pada garis kemiskinan, dapat diartikan bahwa program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak untuk masyarakat dan ada kemungkinan masyarakat miskin ini dapat keluar dari kemiskinan. Rumah tangga yang terdapat di BPS dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

Adapun yang menjadi konsep kemiskinan ada tiga yaitu:

1. Kemiskinan Absolut
   Kemiskinan ini diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang digunakan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
2. Kemiskinan Relatif
   Dirumuskan dengan demensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, konsep kemiskinan ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat tertentu, dengan berorentasi pada derajat kekayaan hidup.
3. Kemiskinan Subyektif
   Dirumuskan berdasarkan kelompok kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Individu dengan ersepsi ini sebenarnya berkecukupan, namun dia

merasa tidak puas dengan pendapatannya.

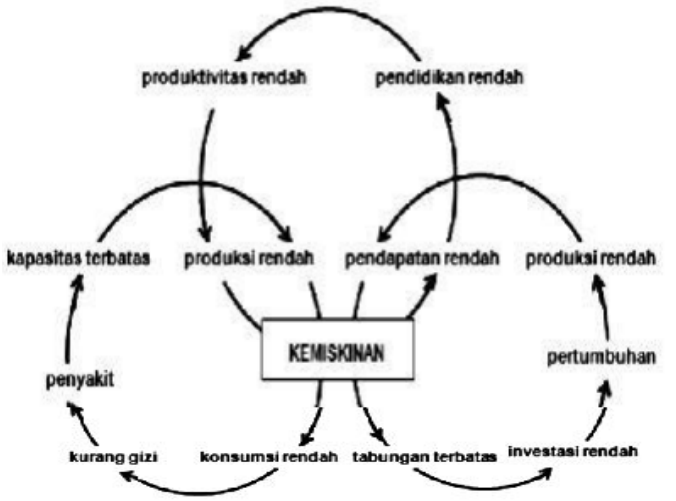
D. Sebab – Sebab Kemiskinan

Menurut Chamsyah (2008) penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut sistem modern dalam cara produksinya. Individu sebagai penyebab kemiskinan menempati posisi pertama dalam kondisi kurang kesejahteraan ini. Keluarga sebagai penyebab lain hanya institusi sosial terkecil yang terlemahkan oleh struktur sosial yang merupakan penyebab struktural kemiskinan. (Adawiyah, 2020)

Suatu studi yang bersifat khusus tentang kemiskinan mengemukakan bahwa karakteristik utama penyebab kemiskinan pada wilayah miskin mencakup:

a. sumber daya alam
b. teknologi dan unsur pendukungnya
c. sumber daya manusia; serta
d. sarana dan prasarana termasuk kelembagaan.

Menurut Nuscheler dalam Munkner (2001), penyebab utama kemiskinan dalam bentuk lingkaran-lingkaran kemiskinan yang terdiri dari tiga pola yang tidak ada ujungnya sebagai berikut:



Sumber : (Adawiyah, 2020)

Kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung apakah kelompok yang miskin tinggal di perdesaan atau di perkotaan, dan apakah mereka hidup dalam struktur keluarga kecil, keluarga inti atau seorang diri. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu:

a. Apabila rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan;
b. Apabila buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana

dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya;

c. Apabila rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) yaitu:

a) Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan;
b) Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskiriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
c) Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap "negatif" seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin;

d) Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neolibiralisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

E. Jenis dan Bentuk Kemiskinan

1. Jenis Kemiskinan

   Terdapat beberapa bentuk kemiskinan yang dikelompokkan dari penyebab kemiskinan atau sesuatu yang membuat orang itu mengalami kemiskinan. Menurut (Ali, 2015) dalam bukunya yang berjudul *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin* bahwa kemiskinan dibagi menjaadi 4 jenis yaitu :

   a. Kemiskinan Absolut

      Kemiskinan absolut merupakan masyarakat yang mempunyai pendapatan atau penghasilan berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupn dasarnya secara minimum atau kebutuhan daasarnya seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan hal lain untuk bisa menjalankan hidupnya dan bekerja.

   b. Kemiskinan Relatif

      Kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata dan belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga terjadi adanya ketimpangan atau kesenjangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural
   Kemiskinan kutural merupakan kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang ddisebabkan oleh faktor budaya. Kemiskinan kultural terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya dalam hal pemikiran dan cara kerja.
d. Kemiskinan Struktural
   Kemiskinan struktural merupakan situasi kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistemm sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, namun sering menyebabkan tingginya kemiskinan.

2. Jenis Kemiskinan Berdasarkan Sifat
   Setelah dikenal bentuk kemiskinan di atas, dikenal juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Berikut merupakan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya(Jacobus et al., 2019):
   a. Kemiskinan Alamiah
      Kemiskinan alamiah dalam Kementerian PPN/ Bappenas (2018: 9) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam dan geografis yang tidak mendukung, misalnya karena kondisi alam yang gersang (kering dan tidak teratur), sumber daya alam yang terbatas, dan wilayah yang terisolasi.
   b. Kemiskinan Buatan
      Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

F. Indikator Kemiskinan

1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Y Per Kapita} = \frac{Yt}{POPt}$$

YPer Kapita = Pendapatan per kapita
Yt = Pendapatan pada tahun t
Popt = Jumlah penduduk pada tahun t.

Variabel pendapatan per kapita dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya.

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan,

perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator yang mempunyai peran penting dalam perekonomian menjadi salah satu pihak yang mempunyai peran sentral dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Program penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi atau memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal dan layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular.

F. Kriteria Kemiskinan

Menurut BKKBN terdapat 5 kriteria seseorang/rumah tangga dikatakan miskin, yaitu:

1. Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya
2. Seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari
3. Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian
4. Bagian terluas rumahnya terdiri atas tanah
5. Tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) suatu rumah tangga dikatakan miskin apabila memenuhi 9 dari 14 variabel kriteria kemiskinan sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari $8m^2$ per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam

sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Emil Salim dalam Supriatna, 1997: 82 mengemukakan ada 5 karakteristik penduduk miskin. Kelima karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah:
1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah
4. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas
5. Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

G. Cara Menghitung Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan Garis Kemiskinan:

GK = GKM + GKNM

GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Rumus dalam menghitung garis kemiskinan makanan (GKM) yaitu:

$$GKM^{*}_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^{*}_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah *j* (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi *p*.
P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi *k* di daerah *j* dan provinsi *p*.
Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi *k* yang dikonsumsi di daerah *j* di provinsi *p*.
V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi *k* di daerah *j* provinsi *p*.
j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).
p : Provinsi ke-*p*.

Selanjutnya hasil dari GKMj tersebut disetrakan dengan 2100 kilokalori dengan mengkalikan 2100 dengan harga impisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga didpatkan rumus:

$$\overline{HK_{jp}} = \frac{\sum_{k=1}^{52} Y_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}},$$

Dimana :

K_{jkp} : Kalori dari komoditi *k* di daerah *j* di provinsi *p*

$\overline{HK_{jp}}$: Harga rata-rata kalori di daerah *j* di provinsi *p*

2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKMN)

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Rumus menghitung garis kemiskinan non makanan:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^{n} r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah *j* dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah *j*

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke-p

3. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Rumus Penghitungan:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$

α = 0
z = garis kemiskinan.
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = jumlah penduduk.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Rumus Penghitungan:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$

α = 1
z = garis kemiskinan.
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = jumlah penduduk.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Rumus Penghitungan:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$

α = 2
z = garis kemiskinan.
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n = jumlah penduduk.

6. Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

7. Bank Dunia (World Bank)

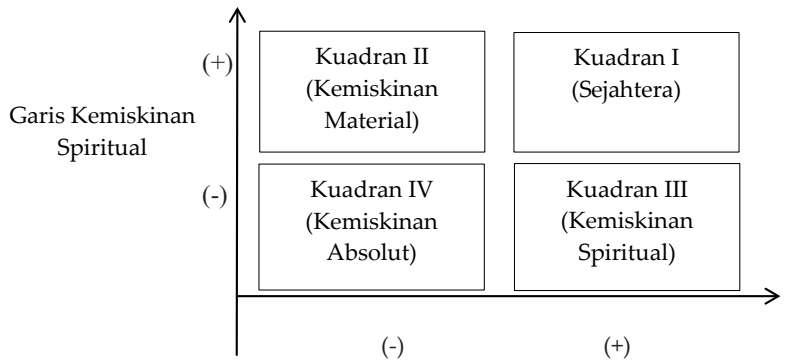
Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat

ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/ menengah.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

H. Model CIBEST) Dalam Mengukur Kemiskinan

Model CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies) atau indeks CIBEST adalah salah satu alat ukur yang dikembangkan pertama kali oleh Beik dan Arsyanti (2016). model CIBEST digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan dari persepektif syariah. Indeks ini berupaya untuk mengukur indeks kemiskinan secara Islami. Pengembangan indeks ini didasarkan pada kuadran CIBEST. Terdapat empat kuadran dalam model CIBEST ini, sebagaimana dalam gambar berikut:



Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiel dan spiritual ke dalam dua tanda, yaitu tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda positif artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sedangkan tanda negatif berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. (Mahri et al., 2021)

Dalam model CIBEST ini menggambarkan empat kuadran, yang dimana sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual dan garis horizontal menggambarkan garis kemiskinan material.

Kuadran I : Rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+). Kuadran ini menunukkan kesejahteraan dimana rumah tangga atau keluarga mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material.

Kuadran II : Rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual (+) namun tidak mampu memenuhi kebutuhan material (-). Kondisi ini mencerminkan kondisi rumah tangga pada kategori kemiskinan material.

Kuadran III : Rumah tangga mampu secara material (+) namun tergolong tidak mampu secara spiritual (-) sehingga berada dalam kategori kemiskinan spiritual.

Kuadran IV : Rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Rumah tangga ini masuk ke dalam kategori kemiskinan absolut dimana miskin secara materi dan miskin secara rohani.

I. Studi Kasus Kemiskinan di Negara Muslim

1. Maroko

Maroko merupakan negara berpendapatan rendah dengan populasi mencapai 30 juta jiwa. Pendapatan per kapita Maroko hanya sebesar US$1.667. Sebesar 16% pendapatan Maroko berasal dari sektor pertanian. Walaupun mempunyai pendapatan yang rendah, Maroko merupakan negara pertama di kawasan Timur Tengah yang memunyai kerjasama dengan Uni Eropa. Kerjasama Maroko dengan Uni Eropa tertuang dalam perjanjian Euro-Mediterranean Partnership (EMP) yang ditandatangani pada tahun 1996. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah untuk mengurangi aktivitas industri Maroko mulai tahun 2000 sampai tahun 2012. Selain itu, Maroko juga mengadakan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.

Dalam laporan Bank Dunia pada tahun 2001, satu dari empat orang penduduk di pedesaan Maroko mengalami kemiskinan. Di daerah perkotaan Maroko, satu dari sepuluh orang penduduk dinyatakan mengalami kemiskinan. Kemiskinan ini terpusat pada wilayah bagian tengah dan barat laut Maroko.

Kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan melanda kalangan yang berbeda. Di wilayah pedesaan, kemiskinan melanda 57% keluarga yang bertumpu pada sektor pertanian, 26% sektor jasa dan 13% sektor konstruksi. Sedangkan di wilayah perkotaan, kemiskinan melanda 58% keluarga yang bertumpu kepada kepala keluarga yang bekerja di bidang jasa.

Kemiskinan tersebut terus mengalami peningkatan pasca implementasi perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Liberalisasi perdagangan ini meningkatkan kemiskinan di tingkat pedesaan dari 28,3% menjadi

34,2%. Sementara itu, jika ditinjau secara keseluruhan, maka peningkatan kemiskinan di Maroko mencapai 2,5%. (Matondang, 2014)

2. Bangladesh

Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah timur laut, Myanmar di tenggara dan Teluk Benggala di selatan. Bangladesh merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan luas wilayah sebesar 144.000-kilometer persegi. Kondisi tanah di Bangladesh merupakan tanah subur sehingga 80% dari penduduk Bangladesh secara langsung atau tidak langsung menjadikan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski hanya mampu menyumbangkan 20% dari devisa negara, namun sebanyak 44% penduduk masih bekerja pada sektor pertanian.

Ada banyak faktor yang membuat Bangladesh berada dalam kemiskinan. Di antaranya adalah kondisi geografis dan cuaca yang tidak menguntungkan, situasi politik yang tidak kondsif serta minimnya fasilitas umum. Selain faktor geografis, permasalahan kepadatan penduduk serta kualitas sumber daya manusia (SDM) Bangladesh yang rendah membuat pertumbuhan perekonomian Bangladesh tidak maksimal. Jumlah penduduk Bangladesh telah mencapai angka hingga lebih dari 150 juta jiwa dan sekitar 50 juta jiwa penduduknya berada pada kategori miskin dan tidak ditunjang dengan fasilitas umum maupun fasilitas kesehatan yang memadai.

Tingginya angka kemiskinan di Bangladesh berdampak kepada rendahnya tingkat kesejahteraan Bangladesh. Sebanyak 43% dari penduduk Bangladesh hanya memiliki

tingkat pendapatan rumah tangga per hari sebesar $1,25-$2. Pendapatan rumah tangga yang berada di bawah standar UNDP ini memaksa anak-anak yang seharusnya bersekolah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sekitar 4,7 juta anak-anak di Bangladesh yang berusia di bawah 14 tahun harus meninggalkan sekolahnya dan menjadi pekerja/buruh. Kemiskinan di Bangladesh juga menyebabkan maraknya praktik Perdagangan Manusia atau Human Trafficking. (Sitanggang, 2017)

J. Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.(Perpres, 2010)

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pemerintah membentuk suatu badan atau tim nasional yang bertugas menabggulangi masalah kemiskinan. Tim tersebut bernama TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasiskan Produktivitas

a. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai

program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja.(F. D. Kurniawan & Fauziah, 2014)

Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Penerima KUR ditujukan bagi individu/perseorangan baik sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang produktif.

b. Penciptaan Serapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang dimana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan (Kadafi, 2013). Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Strategi Pengentasan Kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan

panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja (Wibisono dalam (Cantika, 2014) namely environmental damage due to human activity (Surah Ar Rum: 41), yaitu:

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth)
   Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat.
2. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (pro-poor budgeting).
   Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.
3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure).
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services)
   Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan

kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.

5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor income distribution)

Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. (Cantika, 2014) namely environmental damage due to human activity (Surah Ar Rum: [41]

BAB XI
KESENJANGAN DAN DISTRIBUSI EKONOMI

PENDAHULUAN

Kesenjangan dan distribusi ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kesenjangan ekonomi mencerminkan bagaimana pembagian sumber daya ekonomi atau kekayaan diantara kelompok masyarakat. Kesenjangan ekonomi terjadi ketika ada perbedaan pendapatan, kekayaan, akses terhadap sumber daya, peluang, dan kesejahateraan antara kelompok dalam masyarakat atau negara. Sedangkan distribusi ekonomi adalah cara pembagian dan penyebaran sumber daya ekonomi atau kekayaan dalam negara. Distribusi yang merata dan adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan pemerintah seperti redistribusi pendapatan, regulasi, dan program-program sosial untuk masyarakat kurang mampu menyeimbangkan distribusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

Kesenjangan ekonomi juga terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Kesenjangan distribusi pendapatan terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya ekonomi dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi

berbeda.

Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari dan membahas mengenai penyebab kesenjangan dan distribusi ekonomi, dampak yang ditimbulkan, dan juga penanggulangan agar kesenjangan dan distribusi ekonomi ini dapat segera teratasi.

A. Tujuan Distribusi dalam Islam

Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi mempunyai andil bersama sistem dan politik syari'ah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syari'at. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Dakwah

Diantarnya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, pemberian zakat kepada muallaf memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri (Sugianto, 2020). Sebab Allah SWT berfirman:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Q.S. Ali Imran: 140)*

2. Tujuan Pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 103)*

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan dimana yang terpenting adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain dan mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, dan mementingkan diri sendiri (egois). (Sugianto, 2020)

3. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

Artinya: *"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya*

Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat- sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui." (Q.S. Al Baqarah: 273)

Dan (Q.S. Az-Zariyat :19)

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*

b. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.
d. Keadilan dalam distribusi mencakup antara lain:
   - Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
   - Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi
   - Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

4. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya

dapat kami sebutkan seperti berikut ini:

a. Pengembangan harta dan pembersihannya
   Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur
   Sistem distribusi dalam ekonomi dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti hutang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka.
c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi
   Dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan. Dapat kita lihat pada Q.S. Al- Baqarah: 265.

   وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

   Artinya: *"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya,*

Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat."

Dapat dimaknakan bahwasanya orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepada-Nya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

B. Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi

Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pedapatan pada suatu wilayah geografis. Pengertian distribusi pendapatan tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi redistribusi kekayaan, setelahnya baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Sedangkan standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah maqasid syariah. Sistematika hirarki yang dikembangkan fuqaha dalam memenuhi aspek-aspek tersebut mengacu pada skala prioritas dengan urutan berikut:

1) Ad-daruriyyah: suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat
2) Al-hajjiyyah: suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat

dengan kemudahan dan penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat

3) At-tahsiniyyah: suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan akhirat.

C. Faktor Penyebab Distribusi Pendapatan Tak Merata

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan tidak terdistribusi secara merata, diantaranya sebagai berikut:

a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan pendapatan per kapita menurun.
b. Terjadi inflasi saat pendapatan bertambah tetapi tidak diimbangi dengan jumlah barang-barang yang diminta oleh masyarakat.
c. Pembangunan antar daerah yang tidak merata.
d. Pengangguran bertambah karena diakibatkan oleh investasi yang banyak menggunakan padat modal, sehingga pendapatan modal kerja menjadi lebih tinggi dibandingkan pendapatan hasil kerja.
e. Mobilitas sosial yang rendah.
f. Menurunnya nilai tukar antar negara berkembang dengan negara maju, sebagai akibat dari tidak elastisnya permintaan barang-barang ekspor ke negara maju.
g. Hancurnya industri mikro masyarakat.

D. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi shadaqah. Dalam konteks terminologi Al-Quran shadaqah dapat dipahami dalam dua aspek yaitu:

1. Shadaqah wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim)

Yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Berikut aspek shadaqah wajib:

a. Zakat. Instrumen zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf). Konsep Islam mempunyai kejelasan mekanisme untuk penerapan ini. Ada dua macam instrumen dalam bentuk zakat yaitu zakat maal dan zakat fitrah.
b. Udhiyah. Kurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan hari raya idul adha. Tarifnya satu ekor kambing perindividu atau sapi dan kerbau untuk tujuh individu. Dilaksanakan setiap tahun sekali.
c. Warisan. Pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Islam sangat menganjurkan kepada setiap rumah tangga muslim mencapai suatu tingkat kesejahteraan tertentu, agar kehidupan rumah tangga tersebut dan orang-orang yang ditinggalkannya dalam keadaan sejahtera secara ekonomi.
d. Musaadah. Memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Dalam hal tersebut, Islam menekankan bahwa materi yang dijadikan objek bantuan (didistribusikan) harus dalam keadaan yang layak, baik dan bagus (*proper goods*). Dalam pemberiannya, ajaran Islam juga tidak menentukan suatu keadaan ekonomi tertentu, yang ada hanya aturan definitif mengenai semampu dan seikhlasnya

bantuan tersebut.

e. Jiwar. Yakni antuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga. Perhatian Islam untuk instrumen ini cukup detail, Nabi sendiri menganjurkan untuk selalu memperbanyak kuah dalam memasak sayur, agar dapat berbagi dengan terdekat.
f. Diyafah. Kegiatan memberikan jamuan terhadap tamu, hal ini juga tidak menentukan kondisi perekonomian tertentu dari rumah tangga muslim Dalam memberikan jamuan, rumah tangga muslim tidak dibenarkan untuk membedakan kualitas jamuan yang diberikan, baik kaya atau miskin.

2. Shadaqah Nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagi muslim)

Yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal kreatif (Menurut et al., 2020). Instrumen shadaqah nafilah adalah:

a. Infak. Sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di atas nisab.
b. Akikah. Memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru dilahirkan.
c. Wakaf. Memberikan bantuan kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan boleh dalam bentuk, tanah, rumah, barang ataupun aset keuangan lainnya.
d. Wasiat. Hak pemberian harta kepada orang lain (1/3 harta) yang didistribusikan setelah si pemberi wasiat

meninggal dunia.

Penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah dan Rasul-Nya serta orang/ muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari *takaful ijtimai* (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan (*uniequality income*) dan keadilan sosial (*sosial justice*). Selain itu, distribusi pendapatan dapat pula dilakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang, sewa-menyewa ataupun upah, jual beli, joint venture dan profit /loss sharing. Dalam transaksi tersebut, ada yang berbasis amal karitatif, yaitu pinjam-meminjam, dan utang piutang. Ada pula yang berbasis bisnis (tijarah), yaitu sewa menyewa, upah, jual beli, joint venture dan profit/loss sharing. Dengan demikian, transaksi berbasis amal karitatif tidak dibenarkan menuntut adanya tingkat pengembalian, sedangkan transaksi lainnya dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu (margin dan bagi hasil).

E. Distribusi Pendapatan dalam Konteks Negara

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun atas nilai moral Islam menjelaskan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para ekonom muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan diantaranya, penjaminan di level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan

sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia serta mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenegakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalangan ekonom barat sendiri sudah banyak melancarkan kritikan pedas terhadap pola yang ada saat ini, misalnya Dudley Seers yang percaya bahwa kriteria pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran, dan meratanya distribusi pendapatan. Jika salah satu dari persoalan tersebut, terutama jika ketiganya memburuk maka tidak dapat dikatakan bahwa negara yang bersangkutan telah mengalami pembangunan sekalipun pendapatan per kapitanya berlipat dua kali. Strategi pembangunan berbasis dari ajaran Islam mengubah paradigma dengan menyajikan beberapa elemen penting yaitu:

1. Seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali telah melewatkan saringan filter, yang terdiri dua lapis saringan yaitu maslahah syariyyah dan mekanisme harga di pasar.
2. Agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan tidak membahayakan lingkungan.
3. Perlu ada restrukturisasi dalam bidang sosioekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu, menghapuskan pola konsumtif, dan mereformasi sistem keuangan.

F. Kebijakan-kebijakan Islam dalam Mendukung Pemerataan Distribusi Kekayaan

Kebijakan-kebijakan Islam dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sebagai

berikut (Kalsum, 2018):

1. Penghapusan Riba

Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadits akan memperkuat lebih lanjut dampak reformasi moral.

a. Faktor pengharaman riba dalam ekonomi
   Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu:
   1) Sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.
   2) Sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.

      Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang

relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

3) Sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi
Hal ini karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

4) Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi.
Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

b. Dampak yang ditimbulkan riba

1) Menyebabkan krisis keuangan karena penerapan bunga sebagai indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya

2) Terjadinya decoupling antara sektor riil dengan sektor moneter. Ini akan menyebabkan pasar barang akan lesu karena kurangnya suntikan dana dari pemilik modal sementara sektor moneter kebanjiran modal.

3) Terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Jadi riba dapat mempengaruhi meningkatnya masalah dalam distribusi, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank.

2. Pelarangan Gharar

Gharar dari segi bahasa dapat diartikan risiko atau ketidakpastian (uncertainty). Implikasi pelarangan gharar adalah dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

3. Pelarangan yang Haram

Prinsip dasar dalam Islam bahwa yang dilakukan harus halalan thayyiban yakni benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam, kebalikannya adalah haram. Haram dalam hal ini terkait dengan zat prosesnya. Dalam Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendisttribusikan dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas yang dilarang (diharamkan) (Q.S. Al-Maidah: 3). Dalam hal proses Islam melarang (mengharamkan) setiap bentuk transaksi karena tiga hal yaitu:

a. Perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (Q.S. An-Nisa : 29), seperti pencurian, riba, perjudian dan lain-lain.
b. Transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis.
c. Perbuatan yang merusak harkat martabat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum khamar dan lain-lain.

G. Menuju Kondisi Distribusi yang Adil

Distribusi memainkan peran yang vital karena ketidakseimbangan pada proses distribusi merupakan salah satu akar dari permasalahan ekonomi. Misalnya, Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah hasil dari sirkulasi

kekayaan yang tidak merata diantara orang kaya dan orang miskin. Allah menciptakan manusia dengan sumber daya yang berbeda-beda sehingga tercipta interaksi ekonomi yang alami dalam kehidupannya di dunia. Hal ini termasuk dalam surat Az-Zuhkruf: 32 yang berbunyi:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*

Tujuan dari distribusi yang utama adalah mengurangi kemiskinan dan menjembatani kesenjangan antara si kaya dan miskin. Tujuan lainnya adalah meningkatkan distribusi, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, menciptakan suasana yang tentram antar sesama manusia, menghasilkan efek positif di dalam diri pihak pendonor, mencapai efisiensi dengan mentransfer sumber daya surplus kepada mereka yang kurang modal dan membentuk masyarakat yang selalu memiliki rasa syukur atas karunia Allah SWT.

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kesetaraan pendapatan pada individu dan mengeliminasi kesenjangan dalam mencapai kesetaraan kesempatan berekonomi. Apabila prinsip-prinsip keadilan (adl), kewajaran (insaf) dan kebaikan (ihsan) ini diterapkan maka mekanisme pendistribusian adalah hal yang dapat dikompromikan tanpa mengabaikan hukum. (Kalsum, 2018)

H. Kesenjangan Ekonomi

Upaya memperbaiki Kesenjangan ekonomi memang tidak bisa dikesampingkan bersamaan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi diharapakan dapat menekan kesenjangan yang semakin melebar. Survei persepsi masyarakat pada 2014 yang dilakukan Bank Dunia menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan di Indonesia "sangat tidak setara" atau "tidak setara sama sekali". Selain itu, isu kesenjangan kesejahteraan ini sangat penting untuk ditangani pemerintahan ketimbang mendorong pertumbuhan ekonomi. (Ibrahim, 2017)

Kesenjangan ekonomi harus menjadi agenda serius pemerintahan seiring upaya pemerintah memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan yang tinggi tanpa dibarengi kualitas distribusi pedapatan justru dapat menimbulkan perlambatan pertumbuhan dan peningkatan risiko konflik sosial. Meski kesenjangan ekonomi juga dialami banyak negara termasuk negara maju, kesenjangan ekonomi di Indonesia cenderung melaju lebih cepat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki distribusi pendapatan antar penduduk. Kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural ekonomi yang masih timpang saat ini.

I. Distribusi dalam Islam Sebagai Solusi Menanggulagi Kesenjangan Ekonomi

Kebijakan distribusi sistem ekonomi Islam mendukung nilai keadilan berdasarkan konsep distribusi Al-Qur'an Surah al-Hashul, *"agar kekayaan tidak menumpuk hanya dalam satu kelompok"*. Menurut Sihab, bagian ini dimaksudkan untuk

menegaskan bahwa harta tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang saja tetapi harta harus diedarkan dalam masyarakat agar dapat digunakan oleh seluruh anggota masyarakat. Sistem ekonomi Islam memberikan sistem distribusi ekonomi yang menekankan nilai bertindak dan kebebasan bertindak berdasarkan ajaran agama dan nilai keadilan yang dimiliki berdasarkan kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menyediakan mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan non-ekonomi, dengan memasukkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi produktif dan tidak produktif untuk mencapai keadilan distributif.

Dalam Islam, distribusi tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat mendesak dalam mencapai pemerataan ekonomi di masyarakat. Agar proses distribusi memiliki kepentingan yang cukup maka beberapa prinsip harus diperhatikan, antara lain:

1. Prinsip Keadilan
   Prinsip ini merupakan nilai Islam yang paling fundamental, termasuk aspek ekonomi. Strategi untuk mencapai pemerataan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Keadilan distributif adalah komitmen untuk mencapai batas minimum pendapatan riil untuk semua.
2. Prinsip Persaudaraan
   Di dalam Islam prinsip persaudaraan yang tidak diskriminatif dan eksklusif, tetapi inklusif dan universal. Distribusi kekayaan dalam Islam mempromosikan persaudaraan dan cinta, hal ini dibuktikan dengan konsep zakat, sedekah, subsidi, dan lain-lain, sehingga perekonomian masyarakat meningkat.
3. Prinsip solidaritas sosial, terdiri dari beberapa elemen

dasar, antara lain;

a) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk hidup
b) Perlu bersimpati dan bersimpati dengan orang miskin
c) Kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara sekelompok orang
d) Ada keharusan untuk berbuat baik kepada orang lain
e) Seseorang tanpa kekayaan abadi harus menyumbangkan energinya untuk tujuan sosial
f) Dilarang berbuat baik demi citra (riya).

J. Kesenjangan Bidang Pembangunan Nasional

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal oleh konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 yang secara eksplisit mengamanatkan tugas pokok negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti, pemerintah harus menjamin hak asasi setiap warganya untuk memiliki kehidupan yang layak. Pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat.

Didalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan pendapatan antar

wilayah. Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti pemerintah lebih aktif didalam membangun wilayah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh di dalam pembangunan. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah. Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang penduduknya relatif miskin. Akibatnya ketimpangan pendapatan antara wilayah yang relatif kaya dengan yang relatif lebih miskin menjadi semakin besar. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi terjadi pada sektor pertanian, karena pada sektor manufaktur dan jasa jauh lebih tinggi tumbuh melampaui sektor pertanian di sejumlah kota besar di Indonesia.

Untuk menyikapi hal tersebut, Indonesia melakukan perubahan di bidang pemerintahan dengan memberlakukan sistem desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi ini berarti terdapat pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, dimana pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan publik yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki masing-masing. Melalui desentralisasi atau biasa disebut dengan istilah otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu mengembangkan daerahnya suapaya lebih maju dan yang juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya di daerah tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk membangun daerahnya agar jauh lebih baik lagi dengan harapan seluruh masyarakat di masing-masing daerah tersebut dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar

daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan antara satu daerah yang maju dengan daerah lainnya yang tertinggal dalam segala bidang.

K. Penyebab Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Dilihat dari segi sebabnya, kesenjangan dapat digolongkan atas kesenjangan natural, kesenjangan kultural, dan kesenjangan struktural.

1. Kesenjangan natural adalah kesenjangan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik pada segi sumberdaya manusianya maupun pada segi sumberdaya alamnya.
2. Kesenjangan kultural adalah kesenjangan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya, yaitu yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di satu pihak dan percepatan kemakmuran di pihak yang lain.
3. Kesenjangan struktural adalah kesenjangan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian dunia yang bias bagi keuntungan kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks Indonesia, di satu pihak harus diakui bahwa faktor-faktor natural dan kultural memang turut berperan mendorong terjadinya kesenjangan. Sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya, kesenjangan natural merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sedangkan adanya tradisi hidup boros, tidak disiplin, dan malas, memang masih cukup melekat dalam budaya kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia.

L. Penanggulangan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Karena kesenjangan perekonomian Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor struktural, maka tindakan yang harus dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut haruslah berupa tindakan yang berdimensi struktural pula. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi misainya, harus diganti dengan yang berorientasi pertumbuhan sosial. Sedangkan korupsi dan kolusi harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Adapun faktor struktural yang erat kaitannya dengan korupsi dan kolusi adalah faktor pengawasan. Untuk mencegah dilakukannya korupsi dan kolusi sebuah organisasi disyaratkan untuk membangun struktur pengawasan. Biasanya, makin efektif struktur pengawasan sebuah organisasi, makin kecil peluang terjadinya korupsi dan kolusi di dalam organisasi itu.

Sebagaimana terjadi dalam lingkungan birokrasi, lembaga pengawasan fungsional telah dibangun secara berlapis-lapis namun lembaga-lembaga itu pada umumnya tidak mampu mengemban fungsinya dengan baik. Padahal, di luar lembaga-lembaga pengawasan fungsional-internal itu juga terdapat lembaga-lembaga pengawasan fungsional-eksternal seperti BPK, DPR, dan Mahkamah Agung. Tapi lembaga-lembaga pengawasan eksternal inipun ternyata tidak mampu mengemban fungsi nya sebagai diharapkan. Dengan demikian, inefektifitas struktur pengawasan tidak hanya terjadi dalam institusi pemerintahan, tapi telah menjadi ciri institusi kenegaraan secara keseluruhan.

Dengan latar belakang seperti itu, maka efektifitas struktur pengawasan dalam sistem sosial dan politik kenegaraan kita memang patut dipertanyakan. Bila lembaga-lembaga tinggi negara yang haknya dilindungi oleh konstitusi pun tidak

mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka kendala pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi mudah dipahami. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh terianjur berkembangnya birokrasi patrimonial dalam institusi pemerintahan, tapi juga karena sangat kuatnya hegemoni pemerintah terhadap lembagalembaga tinggi negara yang ada.

M. Contoh Kesenjangan di Indonesia

1. Kesenjangan Gender

Gender dan jenis kelamin seringkali dipandang sama, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan sebutan yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan bentuk dan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender merupakan sebutan yang digunakan untuk menginformasikan perbedaan tanggung jawab, status, dan peran di dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsi biologisnya.

Kesenjangan gender dalam bidang pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan yang masih rendah. Selain itu adanya sudut pandang bahwa perempuan itu identik dengan identitas feminim juga berpengaruh terhadap diskriminasi perempuan dalam bidang pekerjaan, khusunya terkait dengan upah. Pola pikir yang telah menancap ke dalam kondisi sosial budaya masyarakat agak sulit untuk dihilangkan, walaupun bisa diubah dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup tetapi tetap saja perempuan yang bekerja itu secara tidak langsung akan mendapat perlakuan yang berbeda dari pekerja laki-laki.

a. Gender dalam Islam

Perempuan dalam pandangan Islam itu sangat dimuliakan,

bahkan secara ideal-normatif tidak mendiskriminasi perempuan, termasuk dalam bidang pekerjaan Beberapa penafsiran al-Qur'an dan hadis dari para ahli tafsir, membuat isu tentang gender menjadi tidak selaras dengan konteks kesamaan kedudukan yang ada dalam Islam. Dalam sistem kepemimpinan, Q.S. An-Nisa : 34 menyebutkan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Kemudian, karena Allah Swt. telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki, dan karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk kaum perempuan. Maka, perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah Swt. dan suaminya.

Melalui kandungan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata terdapat informasi dalam al-Qur'an yang mengakui perbedaan gender, yaitu dengan disebutkan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan seorang pemberi nafkah sedangkan perempuan hendaknya memelihara diri (berada di dalam rumah) ketika suaminya tidak ada di rumah (sedang bekerja mencari nafkah). Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, dominasi laki-laki dalam bidang pekerjaan mulai berkurang karena perempuan dapat menunjukkan kualitasnya dalam bidang pekerjaan dan mampu beridengan laki-laki.(Hakim, 2020)

b. Prinsip dasar Islam dalam menyikapi paham Kesetaraan Gender (Hakim, 2020) Islam menyikapi paham kesetaraan gender dalam beberapa prinsip:
   1) Keyakinan mutlak bahwa Islam adalah agama wahyu yang final dan otentik berasal dari Allah swt. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Maidah: 3 dan Q.S.An-Nisa: 65. konsep Islam adalah hukum yang diwahyukan (*revealed law*) dalam pengertian bahwa hukum Islam

tidak dikarang oleh manusia, hasil daripada produk budaya tertentu atau pemikiran manusia yang berkembang dalam fase sejarah tertentu yang bersifat relatif dan temporer atau tentative.

2) Meyakini syariat Islam itu universal dalam pengertian bahwa ia cocok dan bisa diterapkan di segala tempat dan waktu, sehingga lintas zaman, lintas budaya, dan lintas sejarah manusia. Islam itu semuanya baik (al-Khair), adil dan rahmat maslahat bagi manusia disebabkan ia bersumber dari Allah swt yang maha mengetahui, sesuai firman Allah swt dalam Q.S Al-Isra: 9 dan Al-Maidah: 50.
3) Menyadari bahwa metode-metode buatan manusia yang bertentangan dengan wahyu ilahi itu pasti lemah dan tidak sempurna dalam tataran konsepsi, tata nilai, timbangan dan hukum-hukumnya, meski nampak indah dan memikat, sebagaiman dalam firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa: 82 yang artinya:

   "Dan seandainya Qur'an itu berasal dari selain allah maka mereka akan dapati di dalamnya banyak pertentangan".

4) Meyakini bahwa Islam adalah agama keadilan.
   Konsekuensi adil adalah mempersamakan dua hal yang memang sama dan sekaligus membedakan dua hal yang memang berbeda. Al-Qur'an tidak merekomendasikan persamaan mutlak dalam satu ayatpun melainkan memerintahkan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat berdiri diatas prinsip keadilan memberikan porsi yang sama ketika persamaan itu dipandang adil dan juga membedakan peran dan tanggung jawab yang berbeda ketika pembedaan itu dipandang adil. Inilah

isyarat dari firman allah swt dalam Q.S. Al-An'am: 115 yang artinya:

"Dan telah sempurna kalimat tuhanmu yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-nya, dan dia (Allah) maha mendengar lagi maha mengetahui".

c. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pekerjaan
Kesetaraan gender akan terwujud apabila tidak ada diskriminasi gender. Penanaman sikap pekerja keras harus ditanamkan kepada laki-laki maupun perempuan. Sebab, perempuan tidak dapat bergantung selamanya kepada laki-laki. Perempuan juga harus belajar untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perempuan harus mempunyai keahlian. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk membentuk keahlian, tetapi juga sebagai kunci untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat, terutama dalam bidang pekerjaan. Melalui pendidikan yang optimal, perempuan akan memperoleh keahlian yang membuatnya dapat bersaing dengan laki-laki dalam bidang pekerjaan. Terjunnya perempuan ke dalam bidang pekerjaan, menjadi seuatu bukti bahwa perempuan juga dapat menunjukkan eksistensinya dalam ranah pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Apabila profesionalitas perempuan dalam bidang pekerjaan telah diakui maka perusahaan pun akan mempertimbangkan penghasilan yang sesuai dengan kinerjanya. (Hakim, 2020)

2. Kesenjangan Digital

(N. Fadilla et al., 2020) Kesenjangan digital atau sering disebut *digital divide* mendeskripsikan beragam bentuk kesenjangan dalam pemanfaatannya baik dalam suatu negara

atau antar negara. Kesenjangan digital dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan adanya gap atau ketimpangan dan perbedaan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Kesenjangan digital seolah-olah melahirkan dan memperburuk permasalahan kesenjangan yang telah ada sebelumnya, terutama di negara berkembang dan daerah-daerah yang relatif tertinggal. Jika dapat menganalisis dan membagikan arahan kesenjangan misalnya kepada sebuah kelompok, kesenjangan digital dapat dihubungkan dengan salah satunya perbedaan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin, jika kepada suatu generasi yaitu usia misalnya si tua dan si muda, jika kepada gender misalnya perempuan dan laki-laki, dan jika kepada suatu letak berupa tata letak geografisnya misalnya pada perkotaan dan pedesaan.

Pada dasarnya kesenjangan digital berupa suatu gap antar kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati teknologi digital yaitu mengakses internet sebagai alat untuk beraktivitas, bekerja, berkreasi serta menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat dari teknologi digital, yang mana terdapat kelompok masyarakat yang sama sekali tidak dapat merasakan itu karena infrastruktur yang sama sekali tdak terjangkau oleh teknologi tersebut. Menurut ILO, kesenjangan digital adalah *the latest world employment report finds that, given its different speed odiffusion in wealthy and poorcountries, the information and communications technology (ICT) revolution is resulting in a widening global digital divide*. Definisi ini menyatakan bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi di tingkat bisnis dan geografis saja, tetapi juga mencakup kesenjangan di tingkat sosial ekonomi.

a. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Digital
   Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan digital yaitu:

1) Infrastruktur
   Infrastruktur merupakan fasilitas pendukung kelancaran dalam mengakses suatu teknologi, dikatakan infrastruktur adalah faktor paling mutlak karena orang yang mempunyai infrastruktur yang memadai akan mendapatkan kemudahan seperti halnya orang yang mempunyai akses komputer ke internet, otomatis akan mempunyai wawasan yang lebih luas dari pada mereka yang sama sekali tidak memiliki akses.
2) Kekurangan skill (SDM)
   Sumber daya manusia adalah hal yang paling berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sejatinya SDM yang dapat membagikan keilmuannya untuk masyarakat.
3) Kekurangan isi (konten) materi bahasa Indonesia
   Konten berbahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya seorang dalam pemahaman akses internet, yang mana konten dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing, misalnya di daerah pedesaan yang rentan berbahasa indonesia bahkan berbahasa kesehariaan mereka sesuai suku dan adat istiadat mereka.
4) Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri
   Tidak memanfaatkan internet secara baik sehingga tidak menghasilkan apapun dari internet, dan tidak mendapatkan keuntungan apapun.

b. Dampak Positif dan Negatif Kesenjangan Digital
   Jika ditelaah dengan baik maka kesenjangan digital memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya serta memperoleh informasi dengan cepat

tentunya dengan adanya teknologi berupa komputer dan lainnya. Menurut Retno Setyowati, dampak positif dari kesenjangan digital adalah TIK memberikan kesempatan berwiraswasta, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan biaya yang termasuk murah. Internet juga dianggap memberdayakan perempuan, yang merupakan setengah penduduk suatu negara bahkan memberikan kemudahan untuk bekerja di tempat sendiri misalnya dirumah.

Selain dampak positif tentunya yang paling terasa adalah dampak negatifnya yang begitu signifikan, menurut Budi Santoso dampak negatif dari kesenjangan digital adalah mereka yang kaya dan mampu mengikuti perkembangan teknologi akan memiliki sumber daya baru yaitu penguasaan informasi digital. Sedangkan mereka yang karena kondisi ekonominya tetap atau semakin tertinggal dan semakin jauh dari kemampuan untuk menguasai informasi. Bagi mereka yang mampu menghasilkan dan memanfaatkan teknologi memiliki peluang lebih besar dalam hal pengembangan dan pengelolaan sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi tersebut harus menerima keterbatasannya saja. Akibatnya dapat disimpulkan yang kaya akan semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Yang pintar akan semakin pintar dan yang tidak mampu memanfaatkan akan tetap seperti itu.

c. Solusi dari Pemerintah dalam Menangani Kesenjangan Digital di Indonesia

(Jayanthi & Dinaseviani, 2022) Kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap status ekonomi dan sosial masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan kesenjangan digital. Berdasarkan laporan tahunan

Kementerian Kominfo RI tahun 2020, berikut program-program yang telah dilaksanakan guna mengantisipasi ketimpangan digital:

1) Membangun Base Transceiver Station di wilayah 3T.
2) Mempercepat kerja sama dalam investasi infrastruktur TIK, transformasi digital, talenta digital, dan data privacy dengan Qatar, Perancis, dan AS.
3) Melakukan percepatan pembangunan dan perluasan akses internet pada 2.192 fanyakes. Hal tersebut masih dalam program kerja untuk pemulihan ekonomi secara nasional.
4) Transformasi televisi analog menjadi televisi digital.
5) Rencana Pusat Data Nasional di Greenland International Industrial Center, serta Deltamas di Cikarang dan Batam, yang diharapkan memberikan efisiensi yang berkaitan dengan teknologi informasi untuk kementerian dan lembaga lainnya.
6) Proyek KPBU (kerjasama pemerintah dan Badan Usaha/PPP) yakni membangun Satelit Multifungsi Indonesia Raya (SATRIA). Proyek SATRIA I adalah kerjasama antara BUP dan Pabrik Satelit dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang direncanakan memiliki 11 stasiun bumi/ gateway dan 150.000 titik fasilitas publik.
7) Membentuk Gugus Tugas (Task Force) 5G.
8) Seribu mesin pintar yang berbasi IOT disebar melalui sejumlah kota.
9) Platform digital terkait penanganan Covid-19 juga menghadirkan aplikasi Pedulilindungi disertai layanan telemedis (kerjasama Kemenkominfo, dan Kementerian BUMN dengan Good Doctor Technology

Indonesia dan GrabHealth), Chatbot Covid19.go.id. Selain itu, juga ada aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik dari Kemenkes dan aplikasi Primarycare dari BPJS Kesehatan untuk pelayanan vaksinasi.

BAB XII
PARADOK EKONOMI DI NEGARA–NEGARA MUSLIM
(Indonesia, Malaysia, dan Kuwait)

PENDAHULUAN

Banyak negara yang sebagian besar pendudukannya muslim dihadapkan pada paradoks ekonomi, hampir semua negara muslim termasuk negara sedang berkembang, dan semua negara sedang berkembang dihadapkan pada banyak masalah dan hambatan dalam pembangunannya. Paradoks merupakan sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum. Namun kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Dalam ilmu ekonomi, paradoks dapat diartikan sebagai permasalahan atau yang terjadi dalam sebuah negara diantaranya negara-negara muslim. Problematika tersebut antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, utang luar negeri, inflasi, defisit neraca perdagangan dan pembayaran, serta depresiasi mata uang domestik.

Paradoks perekonomian memiliki beberapa bahasan salah satunya yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan meupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Dalam Islam kemiskinan sangat dibenci, karena akan berdampak pada hal-hal negatif seperti kerusakan. Allah berfirman dalam QS. As-syuramayat 27:

وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ

Artinya: "dan sekiranya Allah melapangkan rezki kepada hamba-hambanya niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat". Dari ayat ini disebutkan Allah menerangkan bahwa dia tidak akan memberi hamba-hambanya rezeki yang berlimpah jika pemberian itu bisa membawa mereka pada keangkuhan dan ketakaburan. Sebagaimana firman allah dalam surat al-alaq ayat 6-7:

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓىۙ (٦) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰىۗ (٧)

Artinya: *"sekali-kali tidak sungguh manusia benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup". Allah memberika rezeki kepada hambanya dengan kadar tertentu, sesuai dengan kehendak dn selaras dengan kebijaksanaannya. Dia tetap memberikan rezeki meskipunhambanya lupa terhadap tuhannya.*

Permasalahan pembangunan ekonomi terutama terkait kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia, baik di negara dengan penduduknya mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal tersebut menjadi fakta yang menunjukkan bahwa agama Islam identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal kemiskinan dan keterbelakangan juga terjadi di berbagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama non-Islam (Mahri et al., 2021)

Berbagai permasalahan besar ekonomi tersebut, bukan hanya terjadi di negara terbelakang dan sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara yang dianggap maju secara material. Masalah tersebut sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi pembangunan konvensional. Berdasarkan hal tersebut penting mencari

solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi. Syariat Islam menawarkan solusi mengatasi permasalahan ekonomi secara berkeadilan. Keunggulan ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional adalah kandungan makna transendental, yaitu adanya keyakinan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, baik untuk umat muslim maupun non-Muslim**.** Maka dari itu kami kali ini akan membahas paradok di negara muslim yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait.

A. Definisi dari Paradok

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran umum, akan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Dalam makalah ini, saya lebih cenderung untuk menggunakan pengertian paradoks seperti yang didefinisikan dalam KBBI. Paradoks adalah kata yang mudah diucapkan namun sulit dijelaskan. Para ahli berbeda pendapat tentang ini. Kata paradox adalah kata serapan dari bahasa Inggris "paradox" yang juga berasal dari bahasa Yunani: para artinya bertentangan dengan, dan dox artinya opini. Jadi secara harfiah paradox artinya bertentangan dengan opini. Paradox juga sering diartikan dengan penyampaian pendapat yang bersifat kontradiktoris. Secara terminology para ahlipun mengartikannya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kajian yang diminatinya (*Semnas UTM Madura 2016.Pdf*, n.d.)

B. Permasalahan Perekonomian di Negara – Negara Dunia

Permasalahan perekonomian masih banyak terjadi di tiap negara. Ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin melebar. Kesenjangan bukan hanya antar individu, tapi juga

antar golongan, antar desa dengan kota, antar wilayah, antar kawasan, antar negara dan antar belahan dunia. Ada faktor pembangunan berlandasan teori, pemikiran dan kebijakan yang tidak adil dan cenderung serakah. Sumber daya yang melimpah, tetapi hanya dikuasi oleh sebagian kecil manusia. Kekayaan yang melimpah sebagai anugerah dari Allah Swt., tidak menjadi berkah. Bukti ketimpangan dunia, dimana pada tahun 2010 ada 388 orang memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan setengah penduduk dunia, dan pada tahun 2015 jumlah orang kaya semakin bertambah, dimana 62 orang di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan setengah dari penduduk dunia yang berjumlah 3,6 miliar orang. Diprediksi kekayaan satu persen orang-orang kaya di seluruh dunia akan melampaui seluruh kekayaan penduduk di muka bumi pada tahun 2016

Riset yang dilakukan Oxfam International mempublikasikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.153 milyuner dunia, namun kekayaannya melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Populasi dunia sekitar 7,8 miliar pada tahun 2020, berarti hanya 0,00003% orang super kaya di dunia, yang kekayaannya setara dengan hampir 60% penduduk seluruh dunia. Data tersebut menujukan bahwa selama sembilan tahun, kondisi disparitas tidak banyak berubah dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, ekonomi dunia tetap saja hanya dikuasai sedikit orang, sementara mayoritas lainnya harus puas dengan kondisinya yang sangat jauh tertinggal. Konsekuensi dari tumbuhnya kesenjangan secara ekstrem tersebut sangatlah besar, seperti upaya pengurangan kemiskinan lambat, keresahan sosial meluas, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut Byayima sebagai Direktur Oxfam Internasional, kesenjangan ekonomi global saat ini adalah buah yang dibesarkan karena

regulasi, kepemilikan perorangan (privatisasi), kerahasiaan keuangan, dan globalisasi yang tidak terkendali selama 30 tahun. Pengambil kebijakan di banyak negara, lebih berpihak kepada para pemilik kapital dan usaha besar untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibanding berpihak kepada masyarakat. Ketimpangan perekonomian antar negara juga sangat jelas terlihat, 85% perekonomian dunia dikuasasi hanya oleh 20 negara yang tergabung dalam G-20. Sementara sekitar 150 negara-negara lainnya hanya memiliki kontribusi 15% sisanya. (Mahri et al., 2021)

C. Paradok di Negara Indonesia

1. Paradok Ekonomi Semu di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap dipuji sebagai yang paling stabil di kawasan Asia itu, hal tersebut layaknya gedung pencakar langit yang keropos. Pertumbuhan ekonomi yang kerapkali diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), telah mengalami penguatan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap pengentasan masyarakat miskin, dengan kata lain yaitu sebagian besar manfaat yang ada hanya dinikmati oleh kalangan elit.

Pada kuartal pertama tahun 2016 ini misalnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran 5,1% hingga 5,2% (Kompas, 21/04/2016). Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut semata-mata didorong oleh belanja pemerintah, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung yang menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan belanja modal pada kuartal I 2016 hingga

mencapai 161% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain peningkatan pengeluaran infrastruktur pemerintah, akselerasi serupa juga terjadi pada belanja barang yang mencapai 56% pada kuartal I 2016. Sementara itu, menurut data dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kemiskinan absolut di Indonesia menunjukkan penurunan di tiap tahunnya.

Kemiskinan absolut Indonesia pada tahun 2010 sebesar 31.000.000, pada tahun 2011 menurun menjadi 30.000.000, hingga pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 28.000.000. Begitu pula dengan data kemiskinan relatif yang menunjukkan tren penurunan di tiap tahunnya, persentase angka kemiskinan relatif di Indonesia pada tahun 2010 hingga hingga 2015 secara berturut-turut adalah 13,3%, 12,5%, 11,7%, 11,5%, 11%, dan pada bulan September 2015 meningkat tipis sebesar 11,31%.

Pencapaian PDB Indonesia yang tinggi ternyata masih belum mampu menangkap dan menggambarkan fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Itulah mengapa pujian terhadap stabilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ibaratnya seperti gedung pencakar langit yang terlihat tinggi namun sebenarnya tak lebih daripada sekadar menara yang keropos. Meski pencapaian PDB Indonesia angkanya terlihat gemuk, namun sedikit banyak masih belum merepresentasikan aspek distribusi kesejahteraan rakyat Indonesia. (Hardini, 2016)

2. Paradok Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan menjadi masalah utama dalam pembangunan dan dialami oleh hampir semua negara. Kemiskinan selalu menjadi topik paling banyak dibahas dalam masalah pembangunan ekonomi dan sosial. Masalah yang nyaris tidak pernah hilang sepanjang sejarah umat manusia, yang terjadi

di berbagai belahan dunia. Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan sangat dasar manusia sebagai makhluk hidup, baik sandang, pangan maupun tempat tinggal yang layak. Menurut Naranjo (2012), kemiskinan menjadi penyebab utama kelaparan, keterlantaran, marginalisasi dan penyakit sosial lainnya di seluruh dunia.

Kemiskinan juga terkait dengan kesehatan, sebagai contoh banyak rumah tangga miskin tidak memiliki sanitasi layak. Individu yang tergolong miskin, tidak mampu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berada lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat, serta tidak mampu mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas

Kemiskinan akan berdampak pada kualitas dan standar hidup (levels of living) yang rendah. Kualitas hidup rendah bila dibandingkan dengan gaya hidup (lifestyle) penduduk kaya di negara tersebut, maupun dibandingkan dengan penduduk di negara-negara maju. Standar hidup yang rendah dapat secara nyata terlihat dari tingkat kemiskinan masyarakatnya yang tinggi, tingkat pendapatannya rendah, tingkat pendidikannya rendah, konsumsi nutrisi rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang rendah, sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, kondisi perumahan, pemukiman, dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tidak memadai, penduduknya merasa tidak aman, tidak nyaman dan putus asa.

Menurut Lembaga Riset Insititute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) baru-baru ini mengumumkan prediksi tingkat kemiskinan di Indonesia melonjak 10,81 persen pada tahun 2022. Jumlah ini didukung dengan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 mencapai 26,50 juta

orang (9,71). Angka tersebut naik signifikan dibanding sebelum pandemi. Disebabkan karena faktor berikut:

a. Kegagalan Pemerintah

   Berbagai upaya pemerintah untuk mengatur stabilitas harga dan kebijakan melalui arahan Presiden dengan mengandalkan BLT Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum dirasakan manfaatnya. Misalnya, masih banyak ditemukan penerima bantuan salah sasaran lantaran data yang dipakai belum diperbarui. Program-program lain dari pemerintah yang terkesan tumpang-tindih menyulitkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana. Birokrasi yang kaku antar sistem juga menjadi masalah. Antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Desa (Pemdes) acap menimbulkan kesalahpahaman alur program bantuan. Kegagalan pemerintah untuk mengakomondasi alur penanganan kemiskinan yang bersifat mikro memiliki dampak sama besarnya dengan kegagalan pemerintah mengakomondasi alur yang bersifat makro.

b. Kemiskinan dan Fungsinya

   Tak pelak keikutsertaan pemerintah dalam upaya mengentas kemiskinan akan jauh dari target apabila belum benar-benar menyentuh subsistensi masyarakat miskin. Namun dibalik wacana pengentasan kemiskinan di desa maupun di kota, kemiskinan memiliki fungsi dalam masyarakat. Di kalangan teori fungsionalisme (functionalism theory), kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak fenomena yang memberikan sumbangsih bagi masyarakat modern. Praktik-praktik yang memperlihatkan situasi kemiskinan dalam masyarakat digunakan untuk mencapai fungsi positif dan sebisa

mungkin menghindari disfungsi. Mengaitkan kemiskinan dengan fungsi bercorak positif nampaknya sekilas tak terbayangkan. Tetapi, pihak-pihak seperti rentenir, tuan-tanah, preman pasar, dan tengkulak dipandang sebagai orang jahat karena mengambil untung dari adanya kemiskinan. Lebih jauh, terminologi kapitalisme, neo-liberalisme, dan oligarki juga mendapat label "penindas" yang mengakibatkan disfungsi kemiskinan.

c. Fungsionalitas Kemiskinan: Titik Paradoks

Herbert J. Gans (1971) mengemukakan sekurang-kurangnya 13 fungsi kemiskinan. Fungsi-fungsi tersebut tidak dibahas semua, namun lima fungsi berikut cukup memberikan informasi betapa "perlu" kemiskinan pada masyarakat kita.

N. Kemiskinan mengakomondasi "pekerjaan kotor" yang secara fisik kotor, atau berbahaya.

O. Kemiskinan memunculkan lapangan kerja (profesional) untuk melayani masyarakat miskin atau melindungi dari masyarakat miskin. Biasanya diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan

P. Kemiskinan menghasilkan persepsi emosional dan empati masyarakat, dengan bantuan (charity) dan amal. Bahkan acap dijadikan referensi bagi masyarakat luas untuk "bersyukur" karena tidak berada di posisi tersebut.

Q. Kemiskinan memunculkan budaya-budaya seperti musik, artefak, dan lukisan yang banyak dijadikan komodifikasi serta banyak dibeli oleh kelas menengah dan kelas atas.

R. Kaum miskin sebagai konstituensi simbolik dari partai politik. Misalnya, revolusi kiri tidak mungkin terjadi

apabila tidak ada si miskin yang tertindas oleh kaum kapitalis. (Ekklesia, 2022)

3. Paradok Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Kita mungkin sering menjumpai paradoks yang ada di lingkungan sekitar kita, di satu sisi masih terdapat jutaan warga pedesaan yang menganggur atau mungkin hanya berprofesi sebagai petani desa. Namun di sisi lain kita dengan mudahnya menyaksikan segelintir masyarakat kota yang menikmati fasilitas modernisasi dengan berbagai surga belanja yang megah terpampang di tiap sudut perkotaan. Budaya konsumerisme tumbuh dengan subur seiring merambatnya kapitalisme di masyarakat. Realita tersebut membuktikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguat dalam 15 tahun terakhir ini, semata-mata manfaatnya lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sedangkan sekitar 80% penduduk sisanya atau lebih dari 205.000.000 orang masih jauh tertinggal di belakang. Meningkatnya kesenjangan standar hidup dan semakin terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang, menyebabkan tingkat ketimpangan Indonesia relatif tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur (The World Bank, 8/12/2015).

Perlu dicermati lebih dalam bahwa adanya ketimpangan yang terlalu tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan dan melemahkan kerukunan sosial. Memang data menunjukkan bahwa setelah krisis keuangan Asia, PDB riil perkapita Indonesia tumbuh rata-rata 5,4% per tahun antara tahun 2000 hingga 2014. Pertumbuhan ini membantu banyak penduduk di Indonesia keluar dari jangkar kemiskinan. Angka kemiskinan berkurang lebih dari 24% saat krisis, sehingga persentasenya menjadi 11% pada tahun 2014. Namun kelompok orang

Indonesia yang mapan secara ekonomi tersebut meninggalkan 205.000.000 orang sisanya yang masih jauh di belakang.

Memang terbukti bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan lebih rendah. Dampak semakin buruk ketika ketimpangan disebabkan oleh perilaku cari untung sendiri, mencoba menguasai sumber daya yang ada tanpa menghasilkan kekayaan baru melalui kegiatan produktif. Oknum-oknum tertentu mencari perlakuan khusus dan perlindungan terhadap posisi mereka, sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme yang ujung-ujungnya menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap lembaga publik.

4. Paradok Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Hal utama yang dapat mengurangi ketimpangan adalah alokasi belanja negara yang tepatIndonesia sejak dahulu telah menghabiskan banyak biaya untuk kebijakan yang dampaknya paling kecil untuk mengurangi ketimpangan, seperti subsidi misalnya, dan sedikit biaya untuk kebijakan yang memberi efek paling besar, contohnya program bantuan sosial seperti PKH (sejenis bantuan tunai bersyarat), BSM (sekarang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yaitu program beasiswa untuk siswa yang tidak mampu), dan kesehatan. Padahal penting kaitannya untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih adil semacam ini. Belanja negara harusnya dapat dibuat lebih pro kepada rakyat miskin.

Upaya permasalahan yaitu dengan menggalakkan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melatih keterampilan mereka. Saat keterampilan dan

skill mereka telah meningkat, pemerintah dapat membantu dengan memastikatersedianya pekerjaan yang lebih baik melalui iklim investasi yang lebih kondusif dan peraturan perlindungan tenaga kerja yang tidak kaku melainkan lebih efektif. Namun realitanya yang ada menunjukkan bahwa peraturan pasar dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang paling kaku secara regional, memiliki perlindungan de facto yang rendah dan menghalangi penciptaan lapangan kerja formal.

Reformasi peraturan dan program tertentu secara sedikit demi sedikit sulit untuk dilakukan karena jika ada perubahan dalam hubungan industri, keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian bagi pihak yang lain. Mengatasi ketimpangan sebagian besar merupakan usaha jangka panjang yang membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang pula. Mustahil jika mengharapkan penurunan ketimpangan sosial terjadi hanya dalam kurun waktu yang singkat, karena setiap tindakan perbaikan membutuhkan waktu agar efeknya mulai terasa, artinya aksi penanggulangan ketimpangan harus dimulai dari sekarang. Walau demikian, mengatasi ketimpangan sosial tidak dapat dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi. Pemutusan rantai kemiskinan tersebut harus diusahakan secepat mungkin yang tentu saja akan membutuhkan pengumpulan pendapatan negara yang lebih tinggi, pengalihan anggaran belanja negara yang berujung pada penargetan dan penyediaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik (Hardini, 2016)

5. Paradok Daya Saing di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,31 persen lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Kegiatan ekspor

yang meningkat 16,28 persen sepanjang tahun lalu menjadi penyokong utama kinerja ekonomi. Sementara kegiatan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,93 persen dan investasi tumbuh 3,87 persen. Meski mengagumkan, pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi seiring naik turunnya harga serta permintaan komoditas ekspor di pasar global. Ekspor kita masih didominasi dua komoditas utama, yaitu batubara dan minyak sawit. Harga dan permintaan kedua komoditas ini sangat fluktuatif (super-cycle commodities).

Pada 2023, permintaan dan harga komoditas ekspor diperkirakan tak akan sebaik tahun lalu sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi turun. Diperlukan mitigasi agar perlambatan ekspor terkompensasi dengan pertumbuhan bidang lain. Potensinya adalah mendorong investasi, selain menjaga konsumsi domestik. Pengeluaran pemerintah sudah waktunya kembali konservatif dengan defisit anggaran di bawah 3 persen. Kebijakan larangan ekspor beberapa mineral mentah dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dirancang untuk mendorong investasi. Jika investasi meningkat, serapan tenaga kerja membaik, pendapatan penduduk otomatis naik Peningkatan investasi, selain dalam jangka pendek mengoptimalkan pertumbuhan, dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syaratnya, kebijakan ini harus dikelola dan dijalankan dengan baik, secara inklusif dan berkelanjutan. Jika tidak, justru akan meningkatkan kesenjangan pendapatan penduduk serta menggerus daya saing. Karena industri yang tumbuh bukanlah kegiatan yang mengandalkan inovasi dan peningkatan produktivitas. Akan tetapi, pelaku usaha yang mengandalkan fasilitas pemerintah yang dikeluarkan tergesa-

gesa guna mengejar target investasi dalam rangka hilirisasi

Meskipun kaya sumber daya alam dan manusia, daya saing Indonesia tidak meningkat signifikan. Menurut survei indeks daya saing dunia, peringkat kita memang meningkat ke posisi ke-44 tahun 2010, tetapi sejatinya tak ada perubahan mendasar dalam kemudahan menjalankan usaha di Indonesia. Indeks iklim usaha (doing business index) 2011 justru merosot ke posisi ke-121 dari posisi ke-115 tahun sebelumnya. Banyak lembaga investasi menyatakan Indonesia memiliki keuntungan demografi (demographic dividend) sehingga tahun 2025 bisa menjadi salah satu negara dengan tingkat produktivitas tertinggi di dunia. Ini karena rasio orang usia produktif terhadap orang yang tidak bekerja cukup tinggi. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan sumber daya manusia agar keuntungan demografi itu menjadi kenyataan.

Belum lagi soal sumber daya alam yang hancur karena pilihan strategi ekspor komoditas primer yang tidak tepat. Bagaimana mungkin pabrik yang berdiri di Kalimantan kekurangan listrik? Bagaimana mungkin anggaran Indonesia yang kaya minyak ini babak belur karena harga minyak di pasar dunia naik mendekati 120 dollar AS per barrel? (Prasetyantoko, 2023)

6. Paradok Sektor Usaha di Indonesia

Pasar merupakan mekanisme pertukaran produk (barang/jasa) yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar mempunyai bentuk yang berbeda-beda, di mana bentuk pasar dipengaruhi oleh struktur pasar. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar yang ada di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Realitanya, pasar tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada

campur tangan dari pemerintah. Terjadinya kegagalan pasar akibat ketidakmampuan pasar dalam menjalankan fungsinya merupakan alasan utama diperlukannya kehadiran pemerintah. Seberapa besar intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Kendati demikian, intervensi pemerintah yang melebihi kapasitas bisa menghasilkan hasil yang beragam, seringnya menyebabkan distorsi ekonomi. Secara tidak langsung, intervensi pemerintah yang berlebih dapat juga berdampak hingga pada persaingan usaha dalam sektor tertentu. Secara teori, persaingan usaha dapat ditelaah melalui penentuan strategi perusahaan dalam bersaing.

Namun, dalam praktiknya, persaingan usaha juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Sayangnya, dalam perkembangannya tidak sedikit kebijakan yang menyangkut sektor usaha yang diwarnai dengan berbagai kepentingan dari pihak tertentu. Berkaca pada zaman Orde Baru, persaingan usaha menjadi terdistorsi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan oligopoli. Pada saat itu kesempatan yang diperoleh oleh industri kecil untuk mendapat akses dan masuk industri dan pasar yang ada sangat minim. Sehingga, hanya para pelaku usaha bermodal kuatlah yang dapat masuk dan menguasai pasar. Terbatasnya jumlah perusahaan ada di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru akan sulit untuk masuk ke pasar monopoli maupun oligopoli. Produksi barang dalam pasar monopoli maupun oligopoli menunjukkan biaya rata-rata yang menurun pada berbagai tingkat output. Perusahaan yang relatif besar

akan lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan kecil. Setelah monopoli atau oligopoli terbentuk, perusahaan lain yang ingin masuk akan menemui kesulitan karena setiap perusahaan baru akan memproduksi output pada tingkat yang rendah dan oleh karena itu biaya rata-ratanya menjadi relatif tinggi. Adapun salah satu dasar teknik yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bertahan dalam pasar monopoli adalah pengetahuan khusus mengenai metode produksi berbiaya rendah (*low-cost*). (Ananda, 2019)

D. Paradok Ekonomi di Negara Malaysia

Pemerintah sering mengaku hampir berhasil menghilangkan kemiskinan di negara itu. pelapor khusus PBB soal kemiskinan dan HAM, Philip Alston mengatakan, hasil analisis lembaga independen menunjukkan tingkat kemiskinan di Malaysia cukup lumayan. Hasil lembaga tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Malaysia mencapai 15%. Karena itu, kata Alston, angka-angka resmi pemerintah tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur. Terlebih cara mengukurnya sudah ketinggalan zaman. Selalu menggunakan indikator serupa dalam beberapa dekade meski biaya hidup semakin tinggi.

Dikatakan Alston, ukuran tingkat kemiskinan di Malaysia, pengeluaran per rumah tangga mencapai 980-ringgit atau setara US$ 234 per bulan. Dengan 4 anggota keluarga, maka setiap orang harus bertahan hidup dengan 8-ringgit atau kurang dari US$ 2 per hari. Tentu saja ukuran ini dinilai Alston sudah ketinggalan zaman. Karena, ukuran demikian bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat atau luar biasa. Karena angka demikian, maka kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tidak efektif. Alston karena itu mendesak pemerintah Malaysia untuk mengkaji ulang metode mereka

dalam mengukur tingkat kemiskinan. Juga penting untuk memperhitungkan kelompok-kelompok yang rentan dan tidak dimasukkan sebagai tolak ukur (Ginting, 2019)

E. Paradok Ekonomi di Negara Kuwait

Kuwait memiliki sejumlah besar usaha kecil dan menengah (UKM), terutama dalam layanan ritel dan non-keuangan, tetapi kontribusi mereka terhadap ekonomi secara keseluruhan kecil - hanya 3% dari PDB. Paradoks ini sangat meresahkan jika dibandingkan dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dan berkembang, di mana UKM menyumbang sebagian besar kegiatan ekonomi sektor swasta, masing-masing menyumbang 50% dan 40% dari PDB. UKM Kuwait hanya mempekerjakan sekitar 23 persen dari total tenaga kerja negara, kurang dari setengah tingkat pekerjaan UKM di negara berpenghasilan tinggi dan ekonomi berkembang. Pada tahun 2014, Bank Dunia melakukan survei terhadap 502 UKM di Kuwait untuk memahami hambatan utama pertumbuhan bisnis bagi UKM di Kuwait. Lebih dari 35% responden menyebutkan perizinan dan izin usaha sebagai faktor utama yang menghambat pertumbuhan mereka. Jawaban atas regulasi ketenagakerjaan, ketidakpastian regulasi, dan korupsi administrasi juga menjadi sorotan. Dua puluh empat persen responden survei juga menyebutkan kurangnya tenaga kerja terdidik sebagai kendala pertumbuhan. Mereka mengatakan butuh rata-rata 41 hari untuk mendapatkan izin beroperasi di Kuwait. Berurusan dengan peraturan pemerintah lainnya memakan waktu 14%-20% dari waktu seorang manajer.

Membangun ekosistem yang dinamis untuk pengembangan UKM dipandang sebagai kunci untuk mempromosikan diversifikasi ekonomi jangka panjang Kuwait. Selama 20 tahun

ke depan, sektor swasta diharapkan memainkan peran utama dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi Kuwait selanjutnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada apakah Kuwait telah menciptakan lingkungan yang mendukung dalam bentuk ekosistem kewirausahaan. Pemerintah Kuwait membentuk Dana Nasional untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada April 2013. Ini adalah perusahaan yang terdaftar secara independen dengan modal total KWD 2 miliar (US$ 7 miliar) dan bertujuan untuk membantu menciptakan peluang kerja produktif bagi para profesional Kuwait, meningkatkan partisipasi swasta dalam ekonomi dan diversifikasi secara keseluruhan. penghasilan. National Fund bangga menjadi entitas tunggal pertama untuk UKM di kawasan Teluk. "Dana nasional di negara lain setara dengan empat atau lima entitas pemerintah yang berbeda, satu untuk pembiayaan, satu untuk dukungan bisnis, dan seterusnya," kata Mohammad Al-Zuhair, yang mengepalai dana tersebut.

Bank Dunia berfokus untuk mendukung pembangunan lembaga IMF, sebuah proyek bantuan teknis selama dua tahun. Sejak November 2013, Bank Dunia telah mendukung tiga tahap implementasi Dana secara berturut-turut: pengembangan peraturan pelaksana, strategi dan rencana aksi, dan pengaturan organisasi Dana.

Lingkup dukungan Bank terus mencakup lima bidang utama:

1. lingkungan bisnis untuk UKM, termasuk dukungan untuk menciptakan "toko serba ada" untuk membantu pelanggan mendaftar dan mendapatkan izin usaha.
2. pengembangan bisnis UKM, termasuk peningkatan dan pelatihan bisnis, untuk membantu perusahaan menghubungkan rantai nilai lokal dan global.

3. pengembangan budaya kewirausahaan, yang mencakup ruang online untuk interaksi antar pengusaha, serta serangkaian acara komunitas.

Bank juga mendukung kemajuan Dana Nasional Kuwait, mengumpulkan data dan memantau serta mengevaluasi dampaknya. Pada Oktober 2015, IMF menjadi tuan rumah Forum UKM Nasional pertama. Anabel Gonzalez, Direktur Senior Perdagangan dan Daya Saing bank, berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh Wamda, yang menghubungkan calon pemuda dengan pengusaha mapan dan pakar industri. 70 pengusaha Kuwait dan 28 mentor lokal dan regional berpartisipasi dalam acara 'Mix N' Mentor'. Mereka membahas tantangan yang dihadapi startup, termasuk masalah terkait penggalangan dana, pengembangan bisnis, pembangunan tim, serta pertumbuhan pengguna dan pelanggan. Acara ini juga menampilkan lokakarya untuk membangun dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan.

Diterima dengan baik oleh para peserta. Sekitar 78% responden kemudian merasa bahwa hal itu membantu memotivasi mereka untuk menjadi pengusaha. Hampir 90 persen mengatakan mereka akan memasukkan informasi yang mereka terima dari mentor mereka, dan lebih dari tiga perempat responden yakin mentor mereka akan menanggapi mereka. "Mereka sangat jujur tentang pemikiran kami. Mereka memberi kami umpan balik positif, tetapi yang lebih penting, mereka berbagi dengan kami aspek negatif bisnis, yang sangat ingin saya dengar dan membuat saya ingin bekerja lebih keras," kata seorang peserta, seorang anggota pendiri Dotz N Pixels.

Grup Bank Dunia, bermitra dengan Wamda, mendukung kegiatan dana negara. Platform bercerita Wamda, Nuwait, merayakan cerita dari Kuwait dan berbagi wawasan, tren,

dan sumber daya. Platform ini berfungsi sebagai referensi virtual untuk komunitas wirausaha lokal. “Ketika pengusaha membawa hasrat mereka ke meja, mereka harus sangat disiplin dalam mewujudkannya,” kata Parth Tewari, kepala spesialis sektor swasta bank, kepada Nuwait. Dia menyarankan pengusaha untuk “bekerja sama untuk menciptakan budaya kolaboratif yang merayakan kesuksesan dan kegagalan dalam beberapa cara.”

Dengan berbagi cerita dan informasi lainnya, Nuwait menyediakan ekosistem UKM yang dibutuhkan masyarakat. Ini juga bertujuan untuk mendorong orang lain untuk meluncurkan startup mereka sendiri. Ali Abu Kumail, Spesialis Sektor Swasta Senior di Bank Dunia, mengatakan kepada Nuwait: “Momentum [untuk UKM] sekarang meningkat dalam perekonomian, tetapi perubahan akan membutuhkan waktu untuk terjadi dan pengusaha harus mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan ide bisnis dan bisnis mereka. Menuju Tren Bisnis Global terbuka.”

BAB XIII
POPULASI DAN KEPENDUDUKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dinamika penduduk merupakan kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi yang meliputi kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (Bappenas, 2013). Populasi penduduk Indonesia menurut sensus BPS pada tahun 2021 adalah sebanyak 271,58 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Badan Pusat Statistik memperkirakan populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai angka 292,5 juta sampai 294,1 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai angka antara 311,6 juta sampai 318,9 juta (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan pemerataan tingkat pendapatan. Posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu negara dapat menjadi suatu keuntungan sekaligus dapat menjadi bencana jika tidak di imbangi dengan

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah penduduk akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, pertumbuhan jumlah penduduk di sisi lain akan menjadi bencana karena dapat menimbulkan beban anggaran negara meningkat akibat gelombang pengangguran. Penduduk dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari aktivitas penduduk dan juga merupakan alat ukur dari kesejahteraan penduduk.

A. Pengertian Penduduk dan Populasi

Populasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), populasi adalah seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam satu wilayah atau daerah. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut.
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Adapun definisi penduduk menurut para ahli, antara lain;

1. UUD Pasal 26 tahun 1945, Penduduk adalah sekelompok warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayah tersebut dijadikannya domisili atau wilayah sementara dan dapat juga untuk ditinggali secara menetap.
2. Mantra (2009), Penduduk adalah individu dengan status sosialnya sebagai pribadi, anggota dalam keluarga, masyarakat, warga negara, dan serangkaian himpunan

kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

3. AA Nurdiman, Arti penduduk adalah individu dalam status sosialnya yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara yang bisa disebut sebagai warga negara maupun bukan.(Dosen, n.d.)

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi 3 indikator yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), tingkat kematian (mortalitas) dan tingkat perpindahan penduduk (migrasi).

1. Kelahiran (fertilitas atau natalitas)
   Kelahiran dapat didefinisikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Fertilitas merupakan taraf kelahiran penduduk yang sesungguhnya berdasarkan jumlah kelahiran yang terjadi. Definisi ini digunakan untuk menunjukkan pertambahan jumlah penduduk. Fertilitas biasa juga disebut dengan natalitas.
2. Kematian (death/mortalitas)
   Kematian adalah parameter demografi yang berfungsi untuk mengurangi jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah tersebut.
3. Migrasi (perpindahan)
   Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Apabila perpindahan itu dari sebuah negara maka disebut dengan migrasi nasional. Apabila perpindahan itu dari suatu negara ke negara lain maka disebut dengan migrasi internasional. Migrasi bisa yang bersifat sementara dan bisa juga yang sifatnya menetap. Migrasi sementara adalah penduduk bertempat di daerah atau negara yang baru hanya dalam waktu yang sementara

yakni kurang dari enam bulan sedangkan migrasi menetap adalah penduduk yang tinggal di tempat yang baru minimal selama enam bulan. (D. R. B. Suharto, 2020)

E. Qanun Kependudukan dan Pertumbuhan Penduduk

Berikut beberapa hadis dan ayat Al-Qur'an yang meliputi kependudukan dan pertumbuhan penduduk.

1. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam lalu berkata: 'Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: 'Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.' (HR. Abu Dawud, No. 1754, Kitāb: Nikah, Bāb: Larangan Menikahi Wanita yang Tidak Bisa Punya Anak. Hadits ini dipandang hasan dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban)
2. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Dari Ka'b bin Ujrah ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu laki-laki di antara kalian yang menjadi penghuni surga? Nabi di surga, orang yang jujur di surga, orang yang mati syahid di surga, anak yang meninggal saat dilahirkan di surga, seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota semata karena Allah di surga. Maukah kalian aku beritahu wanita di antara kalian yang menjadi penghuni surga?!

Setiap wanita yang penuh kasih (kepada suaminya), banyak keturunannya." (HR. At-Thabrani, Mu'jam Al-Kabir, No. 15637, Imam As-Suyuty memandang hadits ini hasan)

3. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Aku bertanya kepada Tsumamah bin Abdullah bin Anas tentang *'azl*, Ia berkata: "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 'Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam dan bertanya tantang *'azl*.' Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam pun bersabda: 'Sekiranya air mani yang menjadi bakal anak itu engkau tuangkan ke atas batu, sungguh Allah 'Azza wa Jalla akan mengeluarkan bayi daripadanya.' Atau beliau mengatakan, 'Sungguh akan keluar seorang anak darinya, -perawi masih ragu- Dan sungguh, benar-benar Allah akan menciptakan jiwa yang memang ingin Dia ciptakan.'" (HR. Ahmad, No. 11970, Kitāb: Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits. Imam Al-Haitsami memandang hadits ini hasan, Bāb: Musnad Anas bin Malik Radliallahu 'Anhu)
4. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Dari Ibnu Mas'ud, berkata tentang *azl*: *Azl* adalah kuburan kecil yang tidak tampak (HR. Abdu Razāq, No.12580. Imam Al-Haitsami memandang *rijal* hadits ini *rijal shahih*)
5. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishak, menceritakan kepada kami Zaidah bin Umair At-Taaiyu, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Bagaimana pendapatmu tentang *azl*?' Dia menjawab: 'Jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam mengatakan sesuatu

mengenai hal itu maka itu seperti apa yang beliau katakan, jika tidak maka aku akan mengatakannya tentangnya (istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja) [Al-Baqarah: 223] barang siapa yang mau, kerjakan dan jika tidak mau tinggalkan.'" (HR. At-Thabrani, No. Imam Al-Haitsami memandang hadits ini rawinya shahih)(Kahf, 2022)

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: Istri-istrimu adalah tempat menabur benih untukmu, maka datanglah ke tempat penanamanmu sesukamu dan tanamkan [kebenaran] untuk dirimu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengan-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah 2: 223)

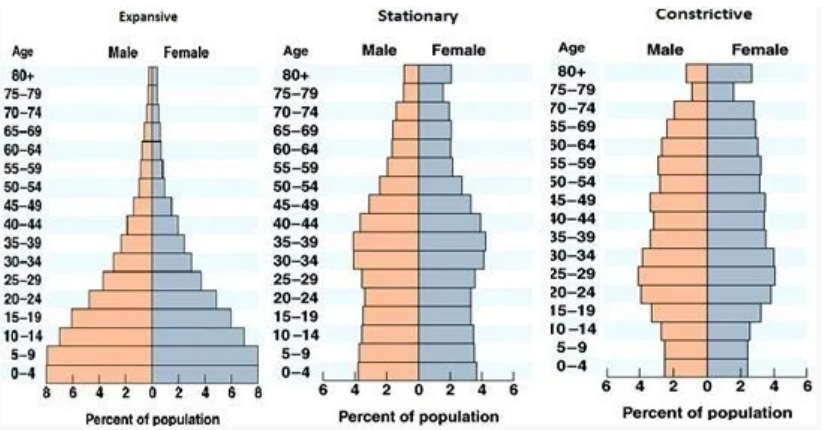
F. Piramida Kependudukan

Piramida penduduk merupakan grafik gabungan penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang dijelaskan secara visual. Berdasarkan usia dan demografi jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Ekspansif

   Jika mayoritas penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Jenis ini ada di negara-negara dengan hierarki Pertumbuhan penduduk yang cepat karena masih tingginya Angka kelahiran dan tingkat kematian yang mulai menurun. Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, India, dan Costa Rica.

2. Konstruktif
   Jika populasinya termasuk dalam kelompok termuda dengan jumlah sedikit. Jenis ini ada di negara-negara yang angka kelahirannya turun dengan cepat, sedangkan angka kematiannya turun rendah. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah: Jepang dan negara-negara Eropa Barat seperti Swedia.
3. Stasioner
   Jika jumlah penduduk pada setiap kelompok umur hampir sama Kecuali untuk kelompok umur tertentu. Jenis ini ada di negara dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi rendah, seperti Jerman.(Alma, 2019)



G. Teori Kependudukan

Dibawah ini secara singkat akan diuraikan pandangan dari masing-masing teori kependudukan sebagai berikut.

1. Aliran Malthusian

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Pada permulaan tahun 1748 lewat karangannya yang berjudul

"Essay on Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Spekulation of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers". Menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang baik dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini (Weeks, 1992). Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak bisa di stop. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia.

2. Aliran Marxist

Karl Marx dan Friedrich Engels (1834). Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Namun kelemahan teori ini, teori ini hanya berlaku pada negara-negara berpaham kapitalis yang memang menganut sistem ekonomi kapitalis. Namun, untuk negara-negara yang menganut aliran selain itu, misalnya non blok, masalah seperti itu masih bisa diatasi, diantaranya

dengan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis masyarakat, sehingga kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan ekonomi lemah tidak terlalu jauh.

Lebih lanjut, Menurut Marx, pemerintah di negara kapitalis akan mempertahankan pertumbuhan penduduk agar upah tetap rendah. Tetapi di dalam pemerintahan sosialis, hal tersebut tidak akan terjadi. Jadi, dalam hal ini letak persoalannya adalah apakah suatu negara itu kapitalis atau sosialis. Tetapi pengalaman di Kuba setelah revolusi menunjukkan bahwa justru yang terjadi adalah apa yang diungkapkan oleh Malthus. Pada saat itu tingkat kematian kasar melonjak tinggi, usia kawin cenderung turun dan pelarangan terhadao keluarga berencana. Jelas hal-hal tersebut merupakan "Malthusian response". Menyangkut solusi yang ditawarkan oleh Marx, dia berpendapat bahwa sistem kapitalis harus diubah menjadi sistem sosialis. Implikasinya seperti alat-alat produksi dikuasai buruh, serta gaji buruh tidak dipotong.

Selain itu, kelompok ini percaya bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa semua masalah yang berhubungan dengan kurangnya pembangunan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan masalah sosial lainnya, bukan karena pertumbuhan penduduk, tetapi semata-mata sebagai hasil dari ketidakbenaran dari institusi sosial maupun ekonomi di daerah yang bersangkutan.

3. Aliran Neo-Malthusians

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok yang mendukung aliran Malthus tetapi lebih radikal disebut dengan kelompok Neo Malthusian. Untuk keluar dan perangkap

Malthus, mereka menganjurkan menggunakan semua cara preventive checkspenggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi kelahiran, guguran kandungan. Tahun 1960 an dan 1970 an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Aliran Neo-Malthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya: jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 milyar (2015) dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12 – 15 milyar di tahun 2050. Paul Ehrlich dan Garrett Hardin dalam essaynya 'The Population Boom' menjelaskan hubungan antara penduduk dunia dan kondisi lingkungan anatara lain:

1. Jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat.
2. Pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk sehingga dibeberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan.
3. Lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar.

4. Aliran Dumont

Arsene Dumont, seorang ahli Demografi bangsa Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1890 dia menulis sebuah artikel berjudul *Depopulation et Civilization*. Ia membuat teori penduduk baru yang disebut dengan teori

Kapilaritas social (*teory of social capillarity*) kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya: seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Untuk dapat mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi dimana tiap-tiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai kedudukan tinggi di masyarakat.

5. Aliran Durkheim

Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologi Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkhiem menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi (Weeks, 1992). Ia mengatakan, pada suatu wilayah di mana angka kepadatan penduduknya tinggi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam usaha memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini kan jelas terlihat pada masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat

industry akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat industry tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya tinggi. Tesis dari Durkhiem ini didasarkan atas teori evolusi dari Darwin dan juga pemikiran dari Ibn Khaldun. (Amna, n.d.)

H. Konsep Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi sebuah potensi sekaligus tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya peran penduduk adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan. Sementara itu sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.



Untuk mempelajari penduduk dapat dilakukan pendekatan demografi yaitu hubungan antara jumlah, karakteristik seperti umur dan jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan, serta persebaran tempat tinggal. Perubahan jumlah, sifat dan persebaran dapat disebabkan oleh perubahan kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Selain pendekatan demografis, kita juga dapat mengkaji penduduk dalam kaitannya dengan kebutuhan hidupnya, seperti penduduk dengan pangan, sandang, penduduk dengan pemukiman, penduduk dengan pendidikan dan pekerjaan, penduduk dengan kesehatan dan masalah lingkungan, dan lain-lain. Pendekatan kedua ini sering disebut studi populasi, sedangkan pendekatan pertama disebut demografi.

I. Perkembangan Penduduk Di Indonesia

Menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 271,58 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, penduduk Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN dan terbesar keempat di dunia.

Faktanya, semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin cepat populasi berlipat ganda. Perkembangan penduduk yang cepat ini menyebabkan kepadatan tinggi karena negara di sisi lain tidak berkembang. Selain itu, angkanya menjadi rumit karena distribusi atau penyebarannya tidak merata. Misalnya di Pulau Jawa pada tahun 2021 berpenduduk sekitar 126,59 juta jiwa. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan pulau lainnya.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga faktor

utama, yaitu angka kelahiran yang meningkatkan jumlah penduduk, kematian yang menurunkan jumlah penduduk, dan migrasi yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk tergantung apakah imigrasi lebih besar daripada emigrasi dan sebaliknya. Untuk menganalisis jumlah penduduk, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, perlu diketahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Penentuan jumlah penduduk menurut umur penting antara lain untuk menentukan beban tanggungan, konsumsi makanan setelah umur tertentu, program kesehatan untuk anak kecil, jumlah penduduk usia sekolah, angkatan kerja dan pasangan melahirkan, usia, dll.

Cara-cara Pengukuran Perkembangan Penduduk dari Pencatatan Vital Statistik

Jika suatu daerah mempunyai suatu sistem pencatatan penduduk berjalan dengan baik, jumlah penduduk pada akhir suatu periode waktu dari daerah yang bersangkutan dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan:

$$P_t = P_o + B - D + I - E$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada akhir periode t

P_o = Jumlah penduduk pada awal periode

B = Jumlah kelahiran yang terjadi dalam periode t

D = Jumlah kematian yang terjadi dalam periode

I = Jumlah imigran atau migran masuk.

E = Jumlah emigran atau migran ke luar.

Persamaan di atas dikenal dengan persamaan penduduk berimbang atau *balancing equation*. Karena jumlah kelahiran, kematian, migrasi masuk/imigran, migrasi ke luar/emigran dapat diketahui, dan juga jumlah penduduk untuk setiap saat

dapat diketahui, angka perkembangan penduduk untuk tahun tertentu dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{B - D + I - E}{P_{\text{tengah tahun}}} \times 100 \text{ persen}$$

Keterangan:

a) $P_{\text{tengah tahun}}$ = jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pertambahan penduduk alami, semata-mata merupakan selisih jumlah kelahiran terhadap jumlah kematian.
b) r = angka pertumbuhan penduduk.
c) Kalau jangka waktunya lama, kemungkinan berubahnya struktur umur lebih besar.
d) Berupa sistem registrasi kejadian-kejadian vital dan registrasi penduduk pada umumnya.

Jika angka-angka jumlah kematian dan kelahiran tak tersedia, dan yang tersedia hanya angka jumlah penduduk pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu-waktu sensus, perkembangan penduduk dapat diperlakukan antara lain dengan menggunakan rumus-rumus geometrik dan eksponensial.

Rumus persamaan geometrik: $\mathbf{P_t=P_o\ (1+r)^t}$ atau dengan persamaan eksponensial : $\mathbf{P_t = P_o e^{rt}}$

J. Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan merupakan fenomena yang relatif baru. Kebijakan tersebut antara lain menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menginginkannya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan penduduk lainnya. Menurut PBB, kebijakan kependudukan adalah kebijakan dan program yang membantu mencapai tujuan ekonomi, sosial,

demografis, dan tujuan umum lainnya.

Dalam pedoman politik negara, arah pembangunan jangka panjang adalah untuk memajukan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam masyarakat pancasila ini disimpulkan bahwa kehendak bangsa Indonesia adalah mengusahakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, dan keselarasan antara keinginan untuk hidup di dunia ini dan mengejar kebahagiaan di akhirat. Selain itu, kebijakan kependudukan dalam GBHN dirinci sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
2. Pelaksanaan kebijakan dan program kependudukan perlu ditingkatkan antara lain kontrasepsi, penurunan angka kematian anak, peningkatan usia harapan hidup dan pemerataan penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan berimbang.
3. Program KB mempunyai dua tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengendalian kelahiran, dan pengendalian pertumbuhan dari jumlah penduduk Indonesia.
4. Untuk memperlambat pertumbuhan penduduk, langkah-langkah harus diambil untuk mempercepat penurunan angka kelahiran. Oleh karena itu, pelaksanaan program KB diperluas ke semua sektor dan lapisan masyarakat, termasuk pemukiman baru, dan menjadi lebih efektif.

5. Peningkatan jumlah peserta KB secara sadar dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Selain itu, keberlangsungan peserta KB yang ada tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan ketersediaan pelayanan KB kepada masyarakat luas.
6. Penanganan masalah kependudukan dan pendidikan pada semua lapisan masyarakat, dan antara perempuan dan laki-laki, terutama di kalangan generasi muda, harus lebih ditingkatkan dan diperluas, sehingga urgensi masalah kependudukan dan pentingnya keluarga kecil mengarah pada cara hidup yang layak dan bertanggung jawab semakin diakui.

K. Jumlah Penduduk dan Pembangunan

Salah satu ciri negara berkembang biasanya adalah jumlah penduduk yang besar, sedangkan jumlah yang besar cenderung tidak produktif karena kualitasnya sangat buruk. Hal ini sering dikaitkan dengan munculnya pengangguran tersembunyi, khususnya di sektor pertanian.

Banyaknya jumlah penduduk di negara berkembang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kelahiran dan kematian. Apalagi dengan kemajuan di bidang kesehatan, baik kesehatan bayi atau ibu hamil maupun penurunan angka kematian dan kelahiran, sepertinya lebih dari itu. Meski sudah sejak lama dianggap mengendalikan jumlah kelahiran melalui keluarga berencana (KB). Masalah jumlah penduduk yang besar baik di negara terbelakang maupun di negara berkembang telah lama menjadi perhatian.

Tingkat kelahiran yang rendah berkorelasi dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan tingkat pendidikan

dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan masyarakat, serta biaya metode kontrasepsi yang efektif dan nyaman. Begitu banyak pekerjaan pada pertumbuhan populasi menekankan bahwa efeknya selalu negatif. Ini menurut Lester Brown. Menurut artikelnya, pertumbuhan atau kepadatan populasi memperumit kebutuhan akan makanan berlebih dan perubahan iklim, yang menyebabkan inflasi, pengangguran, dan hilangnya kebebasan individu setiap saat.

Efek positif dari pertumbuhan populasi disebabkan oleh mekanisme yang terkait dengan skala ekonomi, percepatan model, tekanan populasi, dan perubahan teknologi. Pertumbuhan penduduk sebenarnya banyak membantu perekonomian suatu negara karena mereka sudah kaya dan punya banyak modal sementara kekurangan tenaga kerja. Faktanya, pertumbuhan populasi menghasilkan PDB yang meningkat lebih dari proporsional.

Di negara berkembang tentu saja terjadi sebaliknya, karena perkembangan penduduk berbeda dengan di negara maju. Ini karena ekonomi negara-negara berkembang miskin, modal tidak mencukupi dan tenaga kerja berlimpah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangannya sangat besar, bahkan berbeda dengan negara kaya atau negara maju. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk di negara berkembang dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan tekanan lapangan kerja dan menyebabkan pengangguran. Masalah pangan juga semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk khususnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap pendapatan perkapita, taraf hidup, pembangunan pertanian dalam kaitannya dengan pekerjaan, tenaga kerja dan akumulasi modal.(Sanusi, 2004).

L. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Pada Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan tekanan pada negara dan menyebabkan pengangguran. Belum lagi masalah persediaan makanan yang luar biasa besar. Padahal, kebutuhan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat cenderung mengalihkan belanja pemerintah dari aset-aset produktif. Penyediaan layanan pendidikan dan sosial yang memadai semakin sulit dicapai. Tekanan populasi semakin menyebabkan masalah neraca pembayaran. Makanan, barang konsumsi, bahan baku, barang modal, dll harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Tekanan inflasi semakin meningkat karena permintaan tidak dapat dipenuhi.

1. Penduduk dan Pendapatan Perkapita

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita umumnya merugikan. Pertumbuhan populasi memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara: i) menambah beban penduduk pedesaan; ii) meningkatkan biaya barang-barang konsumen tanpa adanya faktor-faktor yang dapat meningkatkan pasokannya; dan (iii) mengurangi akumulasi modal ketika lebih banyak anggota keluarga menambah biaya. Efek buruk ini diperkuat ketika proporsi anak-anak dalam populasi total tinggi, seperti di semua negara terbelakang. Setiap peningkatan produksi nasional dibarengi dengan peningkatan jumlah konsumen. Proporsi anak-anak yang tinggi dalam populasi sangat membebani perekonomian, karena anak-anak hanya mengkonsumsi dan tidak berkontribusi pada produk nasional. Faktor lainnya adalah umur pendek. Artinya, jumlah anak yang menjadi tanggungan dalam keluarga lebih banyak daripada yang produktif, sehingga pendapatan per kapita rendah. Oleh

karena itu, dampak pertumbuhan penduduk adalah penurunan pendapatan per kapita.

2. Penduduk dan Standar Kehidupan

Karena salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi standar hidup adalah pendapatan per kapita, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan relatif terhadap pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi standar hidup. Pertambahan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan akan sandang, pangan dan perumahan, dll. Namun, karena kurangnya faktor pendukung seperti bahan baku, pekerja terampil, modal, dll, pasokan barang tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Biaya dan harga barang-barang ini meningkat, membuat biaya hidup orang lebih mahal. Karena itu standar hidup yang sudah rendah semakin menurun. Kemiskinan melahirkan banyak anak, yang menurunkan taraf hidup penduduk. Lingkaran setan antara kemiskinan dan standar hidup yang rendah ini semakin terpelintir. Menurut Hirschman, di sisi lain, "tekanan pada tingkat standar hidup populasi menghasilkan tekanan balik dan mengarah pada kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan standar hidup guna memperkuat kemampuan penduduk untuk mengelola lingkungannya dan mengatur diri sendiri". Colin Clark juga setuju, mencatat bahwa pertumbuhan populasi "membawa kesulitan ekonomi bagi orang-orang yang hidup dengan metode tradisional; tetapi dengan kekuatan yang cukup, orang dapat mengubah metode mereka dan, dalam jangka panjang, menjadi masyarakat yang jauh lebih berkembang dan produktif. Sebagai sebuah akibat pertumbuhan penduduk, taraf hidup menurun.(M.L., 2014)

3. Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Negara dengan anggaran pendidikan terendah cenderung memiliki angka kelahiran yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak hanya mempengaruhi kualitas dan kuantitas pendidikan, tetapi juga cenderung melemahkan keseimbangan pendidikan. Kurangnya kesempatan pendidikan menghalangi program kesetaraan/keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, pedesaan dan perkotaan, dan masyarakat kaya dan miskin.

Pengaruh dinamika kependudukan terhadap pendidikan juga tampak pada keluarga. Studi yang dilakukan di beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berbeda menunjukkan bahwa keluarga dengan banyak anak dan kehamilan dekat serta kemiskinan menghambat perkembangan pikiran, bahasa dan kemauan serta kesehatan dan perkembangan fisik anak. Kesulitan yang dihadapi orang tua dalam menghidupi banyak anaknya semakin memperumit masalah ini. Pertumbuhan populasi yang cepat menghambat program untuk memperluas pendidikan, yang juga melahirkan sikap apatis di dunia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tingkat pendidikan merupakan sarana penting untuk menginformasikan orang tentang perlunya perubahan dan mendorong mereka untuk menerima ide-ide baru.(Soerjani et al., 1987).

4. Penduduk dan Lapangan Kerja

Populasi yang berkembang pesat menjerumuskan ekonomi ke dalam pengangguran. Seiring pertumbuhan populasi meningkat, proporsi karyawan dalam total populasi juga meningkat. Tetapi tanpa sumber tambahan tidak mungkin mengembangkan lapangan kerja. Populasi yang berkembang pesat mengurangi pendapatan, tabungan, dan investasi.

Sehingga pembentukan modal melambat dan kesempatan kerja turun dan menyebabkan pengangguran meningkat. Selain itu, ketika angkatan kerja meningkat secara relatif terhadap tanah, modal, dan sumber daya lainnya, faktor pelengkap yang tersedia bagi seorang pekerja menurun dan, akibatnya, pengangguran dan setengah pengangguran meningkat. Negara terbelakang dirundung oleh pengangguran yang terus menumpuk akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, yang cenderung menambah jumlah pengangguran dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang sebenarnya. Solusinya tidak hanya dengan meningkatkan kesempatan kerja relatif terhadap jumlah pengangguran, tetapi secara aktif mengelola penduduk melalui program keluarga berencana.

5. Overhead Populasi dan Sosial

Populasi yang berlipat ganda dengan cepat membutuhkan investasi besar dalam biaya sosial dan transfer langsung sumber daya dari aset produktif. Karena kurangnya sumber daya, negara tidak dapat menyediakan layanan pendidikan, perawatan kesehatan, perawatan medis, transportasi dan perumahan untuk seluruh penduduk. Kepadatan dapat dilihat di mana-mana. Akibatnya, kualitas layanan memburuk. "Pertambahan jumlah penduduk memperlemah kualitas manusia sebagai faktor produksi. Pertumbuhan penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja juga menambah beban kesempatan pendidikan dan memperlambat peningkatan kualitas pendidikan terlalu padat penduduk atau pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dengan cepat memperburuk masalah peningkatan kesehatan penduduk."

6. Penduduk dan Tenaga Buruh

Angkatan kerja dalam perekonomian adalah rasio penduduk yang bekerja terhadap total penduduk. Dengan asumsi rata-rata harapan hidup negara-negara terbelakang adalah 50 tahun, populasi pekerja pada dasarnya adalah kelompok usia 15 sampai 50 tahun. Selama transisi demografi, angka kelahiran meningkat dan angka kematian menurun. Akibatnya, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia 1-15 tahun dan hanya sebagian kecil yang merupakan usia kerja. Kehadiran anak-anak yang sudah dewasa dalam angkatan kerja berarti sangat sedikit orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan produktif. Bahkan jika angka kelahiran mulai turun, tenaga kerja yang tersedia untuk pekerjaan produktif tidak akan berubah dalam jangka pendek. Sebaliknya, jumlah anak menurun dan pendapatan nasional meningkat karena jumlah konsumen menurun. Namun, ini hanya mungkin setelah transisi populasi, yang tidak mungkin dilakukan sampai negara-negara terbelakang dapat menurunkan tingkat kelahirannya. Ini tidak berarti bahwa angkatan kerja tidak akan tumbuh dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah saat ini. Artinya, peningkatan pada kelompok usia muda lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia kerja. Oleh karena itu, angkatan kerja cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

7. Penduduk dan Pembentukan Modal

Pertumbuhan populasi memperlambat pembentukan modal. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita menurun. Dengan pendapatan yang sama, masyarakat terpaksa memberi makan lebih banyak anak. Artinya, sebagian besar pendapatan dihabiskan untuk konsumsi. Pertumbuhan

penduduk juga menyebabkan pergeseran investasi modal dari kegiatan produktif langsung ke modal sosial umum. Pertambahan penduduk yang cepat membutuhkan penyediaan fasilitas yang lebih mendasar seperti sekolah, jalan, rumah sakit, air, dan lain-lain, yang semuanya berdampak memberikan kontribusi terhadap produk nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dimasa mendatang. Keuntungan modal yang diinvestasikan dalam aktivitas produktif langsung lebih tinggi daripada modal sosial umum. Mengalihkan sumber daya pemerintah dari tujuan yang lebih produktif untuk membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang lebih mendesak akan merusak pembentukan modal. Tabungan pemerintah dan pembentukan modal menurun sebagai akibat dari populasi yang berkembang pesat.

Bahkan jika populasi tumbuh dengan cepat, konsumsi barang ekspor dalam negeri akan meningkat dan surplus barang ekspor akan berkurang. Di sisi lain, lebih banyak makanan atau barang konsumsi lainnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hal ini meningkatkan pertumbuhan impor. Penurunan ekspor dan peningkatan impor menyebabkan memburuknya neraca pembayaran. Pemerintah mungkin perlu mengurangi investasi modal. Dan ini berdampak negatif pada program investasi. Ini memperlambat pembentukan modal. Akhirnya, populasi yang berkembang pesat dengan tingkat kapitalisasi yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat teknologi. Ringkasnya, populasi yang tumbuh pesat memperlambat upaya pembangunan apa pun di negara-negara terbelakang kecuali jika disertai dengan pembentukan modal dan perkembangan teknologi yang cepat. Tetapi faktor-faktor penetral ini tidak ada, dan ledakan populasi yang diakibatkannya menyebabkan

penurunan produktivitas pertanian, pendapatan per kapita yang rendah, standar hidup yang rendah, pengangguran dan pembentukan modal yang rendah." (M.L., 2014)

M. Pertumbuhan Penduduk Yang Cepat Di Negara Berkembang

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di negara-negara berkembang tahun-tahun terakhir ini adalah sekitar 1,9-2,0% per tahun, sedangkan dinegara-negara maju hanya 0,4% hingga 0,7% per tahu. Perbedaan negara berkembang dan negara maju dalam hal laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dijelaskan secara sederhana oleh karena kenyataan bahwa pertama-tama tingkat kelahiran (fertilitas) dinegara berkembang pada umumnya jauh lebih tinggi dari pada di negara maju. Demikian pula tingkat kematian (mortalitas) negara berkembang juga lebih tinggi, namun perbedaanya tidak begitu besar seperti perbedaan pada tingkat kelahiran.



Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan yakni: makin rendah pendapatan per kapita maka akan makin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk alami di negara yang bersangkutan. Dan sebaliknya makin tinggi pendapatan per kapita maka akan semakin rendah tingkat pertumbuhan penduduk alami di negara yang bersangkutan.

N. Fenomena Bonus Demografi Di Indonesia

Secara historis, tanda-tanda munculnya fenomena bonus demografi di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an melalui keberhasilan progam Keluarga Berencana (KB). (Jati, 2015) Keberhasilan keluarga Brencana di Indonesia menyebabkan angka kelahiran menurun dan angka kematian

bayi menurun. Sementara itu kondisi kesehatan juga semakin baik. Hal ini menyebabkan struktur penduduk Indonesia berubah. Berdasarkan SUPAS 2015 *dependency ratio* di Indonesia sebesar 49, sudah dibawah 50. *Dependency ratio* atau rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk dibawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Berarti Indonesia telah memasuki era bonus demografi dimana bonus demografi suatu negara dicapai bila *dependency ratio* sudah dibawah 50. Puncak bonus demografi di Indonesia adalah tahun 2020-2030.

Di awal era pertumbuhan demografi, Indonesia harus siap memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya, agar bonus demografi ini benar-benar bermanfaat menjadi anugerah dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Namun jika tidak, maka bonus demografi ini percuma bahkan merusak dapat menjadi penyebab kemerosotan ekonomi.

Mengingat sebagai negara berpenduduk 271,58 juta jiwa dan negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk, tidak dapat dipungkiri bahwa modal manusia Indonesia sangat besar. Modal manusia yang sangat besar ini harus dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. Memasuki tahun 2015, Indonesia berada dalam era pertumbuhan demografis dengan jumlah penduduk kerja yang sangat besar. Penduduk usia kerja ini merupakan angkatan kerja yang dapat dikerahkan untuk pembangunan Indonesia. Peningkatan angkatan kerja ini dapat dimanfaatkan apabila terdidik, terampil, sehat dan memiliki kesempatan kerja.

Pemerintah Indonesia mempromosikan pendidikan dan keterampilan pemuda Indonesia yang akan memasuki pasar

tenaga kerja antara tahun 2020 dan 2030. Pendidikan Indonesia telah ditingkatkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah atas dengan meningkatkan wajib belajar selama 12 tahun. Untuk melatih spesialis, sekolah menengah kejuruan (SMK) dan balai pelatihan lulusan sekolah juga telah disiapkan.

Di sisi lain, kesehatan penduduk juga diperhatikan yaitu dengan adanya jaminan kesehatan negara berupa BPJS. Pemerintah juga telah mengembangkan kebijakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang menyadarkan akan kemauan dan kemampuan berperilaku dengan perilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan GERMAS adalah untuk mengurangi beban penyakit dan mencegah penurunan produktivitas penduduk.

Pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah berusaha menciptakan 10 juta lapangan kerja baru, dimana pada tahun 2014 terserap 2,6 juta tenaga kerja baru, disusul 2,8 juta tenaga kerja barudi tahun 2015, lalu 2,4 juta tenaga kerja baru di tahun 2016 dan 2,6 juta tenaga kerja baru di tahun 2017. Selain itu individu individu Indonesia mulai kreatif dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri di sektor ekonomi dan industri kreatif. Perempuan yang semakin berpendidikan dan efek suksesnya program KB, ikut meramaikan pasar kerja yang ada. Kalau semua ini berjalan baik, maka Indonesia akan memperoleh manfaat dari bonus demografi atau Indonesia akan mendapat anugerah dari bonus demografi.

Penduduk produktif dengan banyak pekerjaan adalah laki-laki maupun perempuan. Mereka berpendidikan dan sehat, sehingga produktif. Artinya, mereka bisa menghidupi diri sendiri secara maksimal dan juga mampu menghidupi warga yang tidak produktif. Karena tingkat produktivitasnya

tinggi dan pendapatannya bagus (maksimal), maka pendapatannya akan berlebih. Penghasilan tambahan tersebut dapat diinvestasikan untuk tujuan lain, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan. Penghasilan tambahan juga dapat diinvestasikan dalam bisnis penghasil pendapatan lainnya. Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan keuntungan finansial dari percepatan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang lebih kaya.

Di sisi lain, jika Indonesia tidak dapat menggunakan bonus demografi dengan baik dari tahun 2020 hingga 2030, maka Indonesia akan menghadapi penurunan ekonomi. Indonesia tidak akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, rakyat Indonesia tidak akan sejahtera, bahkan akan menjadi beban bagi negara Indonesia. Penduduk tahun 2020-2030 ini merupakan penduduk usia kerja yang perlu menopang penduduk yang tidak bekerja. Penyiapan penduduk yang bekerja menyangkut pendidikan dan kesehatan. Karena rata-rata pendidikan Indonesia hanya sampai SMA, penduduk usia kerja tampaknya sulit mencari pekerjaan, terutama di sektor formal, akhirnya berakhir di sektor informal. Kalaupun tidak masuk ke sektor informal, mereka menjadi pengangguran dan akan membebani negara. Menurut majalah Kompas November 2016, data Indonesia tentang penurunan pengangguran terbuka menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri rendah, sementara banyak penduduk usia produktif dengan pendidikan tinggi banyak yang ingin masuk ke sektor industri dan tidak tertampung. Pada suatu saat mereka menjadi pengangguran dan tidak memiliki modal untuk memulai usaha sendiri.

Ada hal lain yang mencegah penduduk usia kerja memasuki pasar tenaga kerja. Sejak tahun 2015, Indonesia telah

sepakat untuk bergabung dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Oleh karena itu, angkatan kerja Indonesia juga harus bersaing dengan angkatan kerja anggota MEA lainnya. Pekerja Indonesia tidak hanya memperebutkan lahan untuk pekerjaan atau pekerjaan di Indonesia, tetapi juga pekerja dari negara ASEAN lainnya. Dan yang mengkhawatirkan tenaga kerja Indonesia yang tidak kompetitif dengan tingkat pendidikan mereka yang tidak setinggi tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Masalah lain yaitu adanya serbuan TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari China. Mereka tampaknya juga berusaha mengambil alih pekerjaan penduduk produktif Indonesia. Mereka dengan mudah masuk ke Indonesia di bawah pengaruh Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dimana Perpres ini mengatur tentang pembukaan dan perbaikan sistem penanaman modal Indonesia. Namun menurut Perpres ini, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia adalah tenaga ahli atau spesialis sehingga dapat mentransfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia. Pekerja asing yang datang ke Indonesia bukanlah pekerja kasar, bahkan banyak juga yang terlihat di tambang-tambang Indonesia. Lalu bagaimana tenaga kerja Indonesia bisa bekerja ketika tenaga kerja buruh pun sudah dimasuki jajaran tenaga kerja asing itu berarti akan ada pengangguran lagi yang dapat membebani negara.

Selain sisi pendidikan, sisi kesehatan memegang peranan penting dalam penyiapan penduduk usia kerja. Produktivitas populasi yang sehat secara alami tinggi. Jadi, untuk mempersiapkan populasi usia subur yang sehat, harus dimulai sejak dalam kandungan. Keadaan Indonesia sebelum tahun 2000 tingkat angka kematian ibu dan anak yang tinggi. Tingkat kesehatan tidak baik. Ada juga anak kurang gizi

dan kurang berkembang (kecil/kerdil). Hingga 2010, kondisi ini terus ditentukan. Anak kurang gizi adalah anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal, sehingga kecerdasannya lebih rendah dari anak gizi baik. Akibatnya, mereka menjadi kurang produktif (karena pendidikannya tidak tinggi dan kesehatannya terancam). Tentu saja, jika tidak produktif, mereka tidak bisa bersaing. Bisa jadi mereka juga menjadi beban bagi negara. Belum lagi masuknya narkoba ke Indonesia yang efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Bonus demografi hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah perjalanan penduduk yang di Indonesia akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030. Dalam kondisi ini penduduk harus disiapkan dengan optimal. Hendaknya pemerintah Indonesia juga bijaksana sehingga Indonesia dapat memperoleh anugerah dari manfaat adanya bonus demografi ini. (Dewi et al., 2018)

O. Potensi Ekonomi Syariah dengan Mayoritas Penduduk Muslim Terbesar di Dunia



Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.(Bayu, 2022) Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah. Hal ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang meningkat didukung dengan total aset keuangan syariah. Selain itu juga didukung penyaluran KUR Syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat.

Saat ini, Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar US$99 miliar. Beberapa peluang yang diidentifikasi sebagai *enabler* dalam pengembangan keuangan syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan Islamic Fintech, regulasi keuangan syariah dan investasi berdampak (ESG).

Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif Pemerintah, untuk mendorong pengembangan industri halal. Pengembangan kegiatan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program, untuk

mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah. Sementara, penguatan infrastruktur ekosistem untuk pengembangan industri syariah diperlukan dukungan koordinasi strategis antar *stakeholders* untuk memperkuat infrastruktur ekosistem industri syariah. (Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi et al., n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

Aan Nasrullah. (2018). Ekonomi Politik Islam: Pemikiran, Pergerakan Dan Perkembangan Nya Di Indonesia. *AHKAM*, *Volume 6*, 125–148.

Abidin, Z. (2012). Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional. *Al-Islam*, *7*, 357–367.

Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Penyebabnya*. *1*(April), 43–50.

Adibah, I. Z. (2016). Islam , Muslim, dan Perilaku Politik (Konsep Nation State di Dunia Islam Kontemporer). *Madaniyah*, *4*(1), 1–19.

Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. 1–131.

Agama, K. R. I. (n.d.). *Pelayan Dua Tanah Suci, Salman Bin Abdul Aziz Alu Su'ud, Raja Kerajaan Arab Saudi, Mendapat Kehormatan Dengan Menjadi Penganjur Atas Dicetaknya Terjemah Makna Al Quran Ini*.

Agung, A. (2017). Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Al-Tarbawi Al-Haditsah : Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 43–53. https://doi.org/10.24235/tarbawi.v2i1.2026

Ahmad, L. M. & T. (n.d.). *Relokasi Ibukota Negara*.

Al, J., & Tanjung, A. (2019). Peran Partai Politik Islam Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone). *Jurnal Al-Dustur*, *2*(1).

Ali, K. (2015). Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin. *Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. https://

doi.org/10.47467/alkharaj.v2i1.18

Alma, L. R. (2019). *Penulis: Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH*. Wineka Media.

Amna, R. (n.d.). *Pendidikan Kependudukan*. 38–50.

Amzah. (2012). *Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam*. 16–30.

Ananda, C. F. (2019). *Paradoks Persaingan Usaha Industri*. Nasional.Sindonews.Com.

Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, *22*(2), 161–173. https://doi.org/10.32939/Islamika.v22i2.1080

Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Ensiklopedia*, *3*(1), 193–205.

Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Unisia*, *34*(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6

Bank Indonesia. (n.d.).

Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*.

Blog Archives - Laman 2 dari 3 - Gramedia Literasi. (n.d.).

Candrakusuma, M. (2020). Teladan Rasulullah SAW Sebagai Dasar Implementasi Sumber Daya Insani. *Journal of Islamic Banking*, *I*(2), 149–167.

Cantika, S. B. (2014). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics*, *4*(2), 101. https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114

Chang, F. Q. I. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Analisis

Moneter. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69).

Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia : Suatu Anugerah Atau Petaka. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research*, *2*(3), 17–23.

Dosen, P. (n.d.). *Pengertian Penduduk, Faktor, Jenis, dan 2 Contohnya*.

Ekklesia, J. (2022). *Paradoks Kemiskinan*. Kumparan.Com.

Fadilla, F. (2017). Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71

Fadilla, N., Konsentrasi, M., Perpustakaan, I., & Informasi, D. (2020). Kesenjangan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dan Hubungannya dengan Perpustakaan sebagai Penyedia Informasi. *Libria*, *12*(1), 1–14.

Farah, N. (2014). Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, *6*(2), 80–94.

Farina, A. (2022a). Reflection on History of Development Public Policy and Islamic Political Economy in the Period of Khulafa ' al-Rasyidin Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa ' al - Rasyidin. *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, *2*(1).

Farina, A. (2022b). Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin. *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, *1*(2), 91–103. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597

Fikri Hadi, & Ristawati Rosa. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia ' s capital city and the presidential powers in constitutional perspective. *Jurnal Konstitusi*, *17*(September), 530–537.

Firda Zulfa. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim. *El-Faqih:Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, *1*(2), 17–30.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Ekonomi Islam*, *9*(1), 151–177.

Ginting, K. (2019). *Angka Kemiskinan Malaysia Berbeda dengan Realitas*. Theiconomics.Com.

H.M. Yahya. (2018). Relocation of Capital City of Developed and Prosperous Countries. *Journal Study of Religion and Society*, *21*(30), 21–30. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan

Hakim, A. (2020). *Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam merupakan konsep lama . Persoalan polusi yang disebabkan oleh pembangunan indsustri pada pembangunan pasca berakhirnya konsep Millennum Developmen*. *5*(2), 179–189.

Hardini, A. (2016). *Paradoks Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tribunnews.Com.

Haryadi, B. (2010). *Political Economy of Sharia Accounting "Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah"* (p. 56).

Hasbullah, A. R. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai dalam Peristiwa Fathu Makkah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *3*(2). https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159

Herdiana, D. (2020). Menemukenali syarat keberhasilan pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *11*(1), 1–18.

Hindarjo, A. (2018). Analisa Zakat dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam. *Asy-Syukriyyah*, *19*(2), 35–60.

HT, M. N. I. A., & Nur, A. (2022). Pemikiran dan Praktek Akuntansi di Masa Dinasti Turki Usmani. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *3*(2), 28–40. https://doi.org/10.55623/au.v3i2.121

Ibrahim, R. H. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, *Vol.40*, *No*, 6305–6328.

Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, *14*(2), 164–176.

Indonesia, E., & Tumbuh, T. I.-. (2013). *Pertumbuhan EKonomi Indonesia T Riwulan II-2013*. *55*, 1–8.

iqbal. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 8–21. https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/63

Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(7), 86–103. https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018

Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia ? *Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan*, *26*(1),

1–19.

Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, *24*(2), 187–200.

Jayanti, D. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa rasulullah dan Khulafah Al-Rasyidin. *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa-NTB*, *6469*, 2746–6469.

Kadafi, M. F. (2013). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Kota Malang*. *11150331000034*, 1–147.

Kahf, P. D. M. (2022). *Ayat dan Hadist tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(1), 41. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187

Kemenparekraf.go.id. (n.d.). *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.

Kementerian_PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Naskah Akademik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.).

Kemhan RI. (2022). Pemindahan Ibukota Baru Ke Kalimantan Timur dari Tinjauan Aspek Pertahanan Dan Keamanan Aktualisasi Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi di Kemhan untuk Pertahanan Negara. *WIRA Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 22–25.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan P., Perekonomian, K. K. B., & Limanseto, H. (n.d.). *Potensi*

Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia.

Kurniawan, B. (2020). Pengembangan Sdm Dalam Pendidikan Islam. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, *4*(2), 105–125. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.323

Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jkmp (ISSN. 2338-445X)*, *2*(2), 103–220.

Kuswandi. (n.d.). *Ini Sejarah 3 Kali Indonesia Pindah Ibu Kota Negara - Jawa Pos*. JawaPos.Com.

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Modernisasi*, *11*(2), 124–134.

Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 84–92. https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270

Lincolin arsyad, Wahyudi, D., Malisa, M., Fakhruddin, Rofii;, A. M., Ardyan, P. S., Nuraini, Mahrita, Mintarti, S., Fitriadi, Investasi, D. T., Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Arsyad, L., Statistik, B. P., Timur, P. K., Dan, L. T. I.-, Ii-, P. T., Sebesar, I.-, Wongso, F., … Wihastuti, L. (2017). Data dan Statistik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *12*(1), 13–34.

M. Amin, Z. (2017). Moderenisasi Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, *3*(2), 63–93. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.3273

M.L., J. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada.

Mahri, J. W., Nur, C. M., Al, R., Arundina, T., Widiastuti, T.,

Mubarok, F., Fajri, M., & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi pembangunan Islam* (M. I. S, A. Sakti, S. E. Hidayat, & M. S. Nurzaman (Eds.); pertama). Dapartemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

Matondang, E. (2014). *Kesenjangan Ekonomi Antara Negara-Negara Oil Economies (Oe) Dan Diversified Economies (De) Di Kawasan Timur Teng ...*

Menurut, D., Islam, E., & Johari, E. (2020). *Buhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari'ah, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 19. 1. 3*.

Merlinda, S., Aniqa, R., Alam, H., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). *Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia) Qorry Anggita Rishaq*. *20*, 114–134.

Moch. Zainuddin. (2017). *Volume 1 Nomor 2 Juli 2017 Volume 1 Nomor 2 Juli 2017*. *1*, 79–85.

Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, *8*(2), 189–210.

Munawwir, Nikmah, K., & Nuroniyah, S. S. (2018). *Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*. *05*(04), 11655–11660.

Musyaddad, K. (2017). Prinsip Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam. *Neliti.Com*, *6*(2), 1–14. https://www.neliti.com/publications/56533/prinsip-prinsip-manajemen-sumber-daya-manusia-dalam-perspektif-Islam

Nugroho, W. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Ekonomi Islam*, *5*(2), 163–180.

Nurul Huda. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam* (Ria (Ed.); Pertama). Keencana.

Perpres. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

Prasetyantoko, A. (2023). *Hilirisasi dan Paradoks Daya Saing*. Kompas.Id.

Qur'an, A. A. (2018). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(1), 1–24. https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621

Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *4*(2), 177. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481

Rencana Pemindahan IKN, Kemenhub Siapkan Sistem Transportasi Cerdas, Terintegrasi, dan Ramah Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.).

richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). KONSEP Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *6*(1), 2013–2015.

Ruslan, O. :, & Marasabessy, H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *18*, 132.

Saifullah, E. (2016). Pembangunan ekonomi pada Masa Pemerintahan Rasulullah Saw. *Islamic Banking*, *2*(1), 77–88.

Sanusi, B. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Rineka Cipta.

Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Eko Widianto (Ed.); Pertama). Kencana.

Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. (n.d.).

Semnas UTM Madura 2016.pdf. (n.d.).

Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan

implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *17*(1), 15–28. https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271

Siregar, P. P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Net*, *1*(1), 2021–3982.

Sitanggang, S. P. (2017). Peran United Nations Development Programme (Undp) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Bangladesh Tahun 2007 – 2017. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, *5*(Organisasi Internasional), 818.

Soerjani, M., Ahmad, R., & Munir, R. (1987). *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soryan, S. (2016). Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam) Syaakir. *Jurnal Studia Islamika*, *13*(2), 287–314.

Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Peneltian Mahasiswa*, *5*(2), 4–10.

Suharto, D. R. B. (2020). *Teori Kependudukan*. RV Pustaka Horizon.

Suharto, T. (2002). Kebijakan Ekonomi Global Di Negara Sedang Berkembang. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 91–110).

Uliyah, T. (2021). Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan dan Kemunduranya. *An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu KeIslaman*, *Vol. 7*, *No*, 325–333.

Ulum, F. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga

Masa Kontemporer). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1–293.

World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability. (n.d.).

BIODATA PENULIS



Iskandar, M.Si, biasa memakai Nama Iskandar Chang, Aktivis Muslim Keturunan Tionghoa, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Jawa Tengah, adalah Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Salatiga sejak tahun 2016. Menjadi santri kalong dibeberapa Pondok Pesantren seperti Pondok Pesantren Annida Salatiga, Pondok Pesantren An–Nuur Pakis Magelang, Pondok Pesantren Amsilati Jepara. Pendidikan S1 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga Jurusan PAI, S2 diselesaikan di Program studi Ekonomi Pembangunan UKSW Salatiga pada tahun 2001, Melanjutkan Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang sejak tahun 2018, saat ini sedang menyelesaikan Disertasi S3. Aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan dan Bisnis, Mengelola Pondok Pesantren Mahasiswa Mutiara Hati Beriman Salatiga. Aktif dalam bergabagai seminar regional, nasional dan Internsional dalam bidang ilmu ekonomi, politik dan pariwisata. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (CESDEP) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pernah menjadi Kontributor Kompas TV pada acara Kalam Hati untuk beberapa Episode. Saat Ini diamanahi sebagai Kepala Pusat Halal Center UIN Salatiga (2023- Sekarang).

Kegiatan akademis, sosial, dakwah dan bisnis di lakukan melalui beberapa organisasi dan menjabat sebagai:

1. Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jateng 2021 – 2025.
2. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat IAIN Salatiga 2021 – 2025.
3. Ketua 1 Ikatan Saudagar Muslim Indonesai (ISMI) Jawa Tengah 2020 – 2023.
4. Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Salatiga 2020 – 2023.
5. Wabendum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) 2021 -2024.
6. Direktur Sinergy Lintas Sukses, Lembaga Pelatihan pemberdayaan, pengembangan dan spiritualitas.
7. Dewan Pakar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Salatiga 2020 – 2024.